



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, berkat, dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran, sekaligus sebagai implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dokumen ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja pemerintah daerah yang diukur berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

LKjIP ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi kinerja, bahan perbaikan berkelanjutan, serta dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan perencanaan kinerja pada periode berikutnya. Selain itu, dokumen ini juga menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan pelaksanaan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah dan pihak-pihak terkait yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga LKjIP Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Borong, 26 Maret 2026

BUPATI MANGGARAI TIMUR



AGAS ANDREAS, S.H., M.Hum.

IKHTISAR EKSEKTUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, serta sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur telah diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah. Capaian kinerja yang disajikan dalam LKjIP ini merupakan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama (IKU) pemerintah daerah dan indikator kinerja perangkat daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur telah tercapai dengan kategori cukup baik hingga baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber daya, dinamika kebijakan, serta tantangan geografis dan sosial ekonomi daerah.

LKjIP ini juga mengungkapkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, hasil evaluasi kinerja dalam dokumen ini menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan, serta penetapan target kinerja pada tahun berikutnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas SAKIP melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan kualitas indikator kinerja, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, diharapkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah semakin meningkat dan berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUPATI MANGGARAI TIMUR



AGAS ANDREAS, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.4. Gambaran Umum.....	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	14
2.1.Rencana Strategis.....	14
2.2. Visi.....	14
2..3. Misi.....	15
2.4. Tujuan dan Sasaran.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	42
3.1. Taerget Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.....	42
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja dengan Target.....	47
3.3. Pengukuran Capaian Knerja dengan Tahun Sebelumnya.....	52
3.4. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Target RPJMD.....	56
3.5. Analisis Penggunaan Sumber Daya.....	59
3.6. Analisis Program yang Mendukung Capaian Kinerja.....	61
3.7. Realissi Anggaran.....	67
BAB IV PENUTUP	101
4.1. Kesimpulan	101
4.2. Saran	101
4.3. Lampiran	102

DAFTAR GAMBAR

1.1. Peta Kabupaten Manggarai Timur.....	3
--	---

DAFTAR TABEL

1.1. Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Manggarai Timur.....	4
1.2. Kondisi Topografi Manggarai Timur.....	7
1.3. Kondisi Kelempengan Wilayah Manggarai Timur.....	7
1.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	8
1.5. Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan.....	9
1.6. Komposisi PPPK Berdasarkan Pendidikan.....	9
1.7. Komposisi PNS Berdasarkan Golongan.....	10
1.8. Komposisi PPPK Berdasarkan Golongan.....	10
1.9. Rincian Aset Tetap Daerah Kab. Manggarai Timur.....	13

2.1. Tujuan dan Indikator Tujuan.....	16
2.2. Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD.....	23
2.3. Target Kinerja dan Indikator Kinerja Utama.....	25
2.4. Perjanjian Kinerja.....	37

3.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.....	43
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja.....	48
3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibanding Tahun Sebelumnya.....	53
3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibanding dengan Target RPJMD.....	57
3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	60
3.6. Program yang Mendukung Capaian Kinerja.....	63
3.7. Realisasi Anggaran Program Dinas Sosial.....	67
3.8. Realisasi Anggaran Program Dinas Kesehatan.....	68
3.9. Realisasi Anggaran Program Dinas PPKBPPPA.....	69
3.10. Realisasi Anggaran Program Dinas Tenaga Kerja.....	71
3.11. Realisasi Anggaran Program Dinas Perdagangan.....	74
3.12. Realisasi Anggaran Program Dinas PUPR.....	82
3.13. Realisasi Anggaran Program Dinas Lingkungan Hidup.....	83
3.14. Realisasi Anggaran Program BPBD.....	85
3.15. Realisasi Anggaran Program Bagian Organisasi.....	88
3.16. Realisasi Anggaran Program Badan Keuangan Daerah.....	95
3.17. Realisasi Anggaran Program Inspektorat Daerah.....	96
3.18. Realisasi Anggaran Program Dinas KOMINFO.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019 merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Proses dan sistematika penyusunan LKjIP berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LAKIP merupakan alat akuntabilitas dan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan padanya. LKjIP juga bertujuan mewujudkan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah disusun dan ditetapkan secara periodik. Dengan demikian laporan ini dapat dipergunakan sebagai umpan balik bagi upaya peningkatan Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur pada masa yang akan datang.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP adalah :

1. Proses dan mekanisme efektif untuk mendorong seluruh Aparat Pemerintah Daerah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip *good Governance (Civil Governance, Corporate Governance, dan State Governace)* dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat asas.
2. Instrumen penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Sarana efektif meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur.
4. Media untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan/kegagalan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
5. Wahana untuk mendorong penyempurnaan struktur Organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja dan prosedur pelayanan, berdasarkan permasalahan nyata dalam pelaksanaan tata manajemen Pemerintahan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah yaitu :

1. Tugas Pokok

Pemerintah Daerah memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:
 - Peningkatan pelayanan publik;
 - Pemberdayaan masyarakat;
 - Pelaksanaan pembangunan daerah;
 - Peningkatan daya saing daerah.

2. Fungsi

Selain melaksanakan tugas pokok, Pemerintah Daerah juga menjalankan fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi Pengaturan (Regulasi)

Menetapkan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

b. Fungsi Pelayanan

Memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

c. Fungsi Pembangunan

Merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

d. Fungsi Pemberdayaan

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Selain itu juga terdapat beberapa urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan yaitu :

a. Urusan Pemerintahan Wajib

1. Pelayanan Dasar, meliputi:

- Pendidikan
- Kesehatan
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- Sosial

2. Non Pelayanan Dasar, antara lain:

- Tenaga Kerja
- Lingkungan Hidup
- Perhubungan
- Komunikasi dan Informatika
- Koperasi dan UKM
- Penanaman Modal
- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan urusan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Urusan Pemerintahan Pilihan

Disesuaikan dengan potensi unggulan daerah, seperti:

- Pertanian
- Pariwisata
- Perikanan
- Perdagangan
- Perindustrian
- dan sektor strategis lainnya

D. Gambaran Umum

1. Batas Administrasi

Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu wilayah kabupaten yang terletak di Pulau Flores, Provinsi NTT. Secara astronomis Kabupaten Manggarai Timur terletak antara 08°.14' - 09°.00 Lintang Selatan dan 120°.20' - 120°.55'' Bujur Timur. Batas-batas wilayah administratif adalah:

- Sebelah Selatan: Laut Sawu
- Sebelah Utara: Laut Flores
- Sebelah Barat: Kabupaten Manggarai
- Sebelah Timur: Kabupaten Ngada

Luas Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 264,293 ha, yang terdiri atas luas wilayah daratan sebesar 251.955 ha dan luas wilayah lautan sebesar 12,438 ha. Sedangkan berdasarkan kajian dan penyelerasan dengan regulasi terbaru dalam penyusunan RTRW Kabupaten Manggarai Timur, Luas wilayah daratan Kabupaten Manggarai Timur adalah 238.952 Ha.



Gambar 1.1. Peta Kabupaten Manggarai Timur

Kabupaten Manggarai Timur pada awalnya terbagi atas 9 (sembilan) kecamatan, namun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kecamatan Kota komba Utara, Kecamatan Lamba Leda Utara dan Kecamatan Congkar, maka Kabupaten Manggarai Timur bertambah 3 (tiga) kecamatan baru menjadi 12 (dua belas) Kecamatan yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kelurahan dan 159 (seratus lima puluh

sembilan) desa. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Nama Kecamatan Poco Ranaka Menjadi Kecamatan Lamba Leda Selatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Nama Kecamatan Poco Ranaka Timur Menjadi Kecamatan Lamba Leda Timur, dengan pusat pemerintahan di Borong, Kecamatan Borong.

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah Daratan (Ha)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	Borong	Borong	17.728	3	15
2	Rana Mese	Golo Mongkok	20.933	-	21
3	Lamba Leda Selatan	Mano	12.190	3	21
4	Lamba Leda Timur	Lawir	10.415	-	18
5	Lamba Leda	Benteng Jawa	12.174		13
6	Sambi Rampas	Pota	28.815	4	6
7	Elar	Lengko Elar	28.057	1	14
8	Elar Selatan	Wukir	22.342	1	13
9	Kota Komba	Wae Lengga	32.755	3	8
10	Congkar	Watu Nggong	8.007	2	8
11	Kota Komba Utara	Rana Mbeling	18.300	-	11
12	Lamba Leda Utara	Dampek	27.237	-	11
Kabupaten Manggarai Timur			238.952	17	159

Tabel 1.1. Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Manggarai Timur

Sumber: RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045

2. Topografi

a) Kondisi Topografi

Keadaan topografi dapat digambarkan melalui ketinggian beberapa wilayah. Faktor ketinggian merupakan unsur yang penting dalam merencanakan peruntukan penggunaan tanah. Secara umum topografi di Kabupaten Manggarai Timur terdiri atas 0-250 m, 250-500 m, 500-750 m, 750-1.000 m, 1.000-1.250 m, 1.250-1.500 m, 1.500-1.750 m, 1.750-2.000 m, 2.000-2.250 m dan 2.250-2.500 m. Kabupaten Manggarai Timur didominasi oleh kondisi topografi 250-500 m seluas 59.077,90 ha. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Kecamatan	Klasifikasi Topografi	Luas (Ha)
1	Borong	0-250 m	5.310,82
		250-500 m	2.847,99
		500-750 m	2.847,99
		750-1.000 m	700,58
		1.000-1.250 m	164,03
		1.250-1.500 m	6,81
		1.500-1.750 m	2.956,92
		1.750-2.000 m	1.963,67
		2.000-2.250 m	1.840,49
Jumlah			17.744,13
		250-500 m	1.750,53

2	Congkar	500-750 m	1.102,78
		750-1.000 m	999,17
		1.000-1.250 m	137,79
		1.250-1.500 m	0,34
		1.500-1.750 m	127,28
		1.750-2.000 m	1.094,29
		2.000-2.250 m	2.801,57
		Jumlah	8.013,75
3	Elar	0-250 m	5.712,54
		250-500 m	1.497,92
		500-750 m	808,26
		750-1.000 m	142,69
		1.000-1.250 m	4,69
		1.250-1.500 m	7.122,34
		1.500-1.750 m	8.664,89
		1.750-2.000 m	4.119,61
		Jumlah	28.072,94
4	Elar Selatan	0-250 m	26,41
		250-500 m	2.689,68
		500-750 m	1.155,00
		750-1.000 m	274,73
		1.000-1.250 m	12,81
		1.250-1.500 m	4.650,63
		1.500-1.750 m	7.072,92
		1.750-2.000 m	6.474,70
		Jumlah	22.356,87
5	Kota Komba	0-250 m	14.066,90
		250-500 m	430,65
		500-750 m	12.046,93
		750-1.000 m	4.882,43

No	Kecamatan	Klasifikasi Topografi	Luas (Ha)
		1.000-1.250 m	1.350,62
Jumlah			32.777,53
6	Kota Komba Utara	0-250 m	0,02
		250-500 m	3.191,14
		500-750 m	1.749,82
		750-1.000 m	844,73
		1.000-1.250 m	144,89
		1.250-1.500 m	0,36
		1.500-1.750 m	2.828,35
		1.750-2.000 m	5.304,17
		2.000-2.250 m	4.249,91
Jumlah			18.313,38
7	Lamba Leda	0-250 m	586,12
		250-500 m	205,75
		500-750 m	3.093,07
		750-1.000 m	4.798,89
		1.000-1.250 m	3.501,29
Jumlah			12.185,11
8	Lamba Leda Selatan	250-500 m	2.969,95
		500-750 m	1.837,26
		750-1.000 m	462,43
		1.000-1.250 m	179,81
		1.250-1.500 m	157,08
		1.500-1.750 m	4,82
		1.750-2.000 m	700,19
		2.000-2.250 m	2.305,61
		2.250-2.500	3.584,93
Jumlah			12.202,08
9	Lamba Leda Timur	250-500 m	1.900,84
		500-750 m	1.976,51
		750-1.000 m	1.538,53
		1.000-1.250 m	305,79
		1.250-1.500 m	10,17
		1.500-1.750 m	106,20
		1.750-2.000 m	1.954,61
		2.000-2.250 m	2.631,07
Jumlah			10.423,71
10	Lambe Leda Utara	0-250 m	14.783,71
		250-500 m	21,39
		500-750 m	10.765,18
		750-1.000 m	1.304,05
		1.000-1.250 m	380,06
Jumlah			27.254,38
		0-250 m	2.652,50
		250-500 m	2.763,96
		500-750 m	2.350,83
		750-1.000 m	910,57

11	Rana Mese	1.000-1.250 m	508,88
		1.250-1.500 m	272,71
		1.500-1.750 m	2,38
		1.750-2.000 m	4.472,09
		2.000-2.250 m	3.750,64
		2.250-2.500	3.269,20
Jumlah			20.953,75
12	Sambi Rampas	0-250 m	12.341,44
		250-500 m	50,14
		500-750 m	10.208,72
		750-1.000 m	4.700,44
		1.000-1.250 m	1.528,40
Jumlah			28.829,14
Kabupaten Manggarai Timur			239.951,85

Tabel 1.2. Kondisi Topografi di Kabupaten Manggarai Timur

Sumber: RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045

b) Kondisi Lereng

kondisi kemiringan lereng pada wilayah Kabupaten Manggarai Timur terdiri atas 0-3 persen, 3-15 persen, 15-25 persen, 25-40 persen, dan >40 persen. Kabupaten Manggarai Timur didominasi kelerengan 3-15 persen seluas 102.144,79 ha. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini :

No	Kecamatan	Kelerengan (Ha)				
		0-3%	3-15%	15-25%	25-40%	>40%
1	Borong	1.283,39	7.992,29	5.005,35	2.994,83	453,45
2	Congkar	41,01	2.799,05	3.782,17	1.358,94	32,59
3	Elar	895,86	10.289,55	11.532,12	5.198,38	157,03
4	Elar Selatan	1.048,17	7.423,73	8.664,73	4.960,46	259,79
5	Kota Komba	1.256,77	19.423,41	8.354,07	3.447,46	295,62
6	Kota Komba Utara	189,29	7.226,84	6.521,27	3.794,58	581,41
7	Lamba Leda	92,87	3.687,22	5.284,64	2.981,21	139,17
8	Lamba Leda Selatan	87,39	4.500,09	4.932,42	2.460,87	221,31
9	Lamba Leda Timur	30,26	3.880,67	4.466,39	1.895,50	150,90
10	Lamba Leda Utara	1.492,77	13.019,38	9.062,89	3.561,14	116,67
11	Rana Mese	219,18	9.682,63	6.461,55	3.702,35	887,92
12	Sambi Rampas	1.691,27	12.219,93	10.089,00	4.501,38	327,53
Jumlah		8.328,21	102.144,79	84.156,59	40.857,09	3.623,40

Tabel 1.3. Kondisi Kelerengan di Kabupaten Manggarai Timur

Sumber: RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045

3. Penduduk

Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam

penentuan kebijakan daerah. Sesuai Undang-undang Nomor 37 tahun 2017 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi NTT, Luas Wilayah Kabupaten Manggarai Timur adalah 2.643,93 Km² dengan jumlah penduduk, merujuk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019 sebanyak 268.789 jiwa.

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2019 mencapai **268.789** jiwa. Tingkat Kepadatan Penduduk rata – rata 0,98 jiwa / km² dari luas wilayah sebesar **2.643,93** km².

No.	Kelompok Umur/Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1.	0 -4	7.828	7.346	15.174	5,65
2.	5 – 9	14.840	13.977	28.817	10,72
3.	10 – 14	17.284	16.417	33.701	12,54
4.	15 – 19	15.498	14.783	30.281	11,27
5.	20 – 24	13.872	13.219	27.091	10,08
6.	25 – 29	9.294	9.730	19.024	7,08
7.	30 – 34	9.004	10.004	19.008	7,07
8.	35 – 39	9.353	10.083	19.436	7,23
9.	40 – 44	8.393	9.259	17.652	6,57
10.	45 – 49	8.032	8.159	16.191	6,02
11.	50 – 54	7.311	7.358	14.669	5,46
12.	55 – 59	5.928	5.180	11.108	4,13
13.	60 – 64	3.976	3.038	7.014	2,61
14.	65 – 69	2.522	1.743	4.265	1,59
15.	70 – 74	1.581	1.124	2.705	1,01
16.	>75	1.789	873	2.662	0,99
	Jumlah	136.505	132.293	268.789	100,00

Tabel 1.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024
Sumber : BPS Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024

4. Kondisi ASN Kabupaten Manggarai Timur

Merujuk pada data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Manggarai Timur pertanggal 31 Desember 2025 menunjukkan bahwa Kondisi Aparatur Sipil Negeri (ASN) Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan 31 Desember 2019 berjumlah 2.971 orang untuk PNS dan 2.858 orang untuk PPPK, dengan rincian sebagai berikut :

1. Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SD	2	0	2
2	SLTP	11	1	12
3	SMK	56	45	101
4	SLTA	134	54	188
5	SPG	68	29	97
6	SGO	13	6	19
7	PGA	10	9	19
8	D1	0	16	16
9	D2	56	41	97
10	D3	210	476	686
11	D4	25	14	39
12	SARJANA	894	709	1603
13	S2	33	20	53
14	KEDOKTERAN	7	15	22
15	APOTEKER	2	15	17
JUMLAH		1521	1450	2971

Tabel 1.5. Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan

Sumber : BKPSDM Kabupaten Manggarai Timur 2025

2. Komposisi PPPK Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	Laki-Laki	Perempuan	JUMLAH
1	SLTA	75	21	96
2	D3	156	573	729
3	D4	3	60	63
4	Profesi	78	109	187
5	S1	881	885	1.766
6	S2	-	1	1
	Tidak Diketahui	8	8	16
JUMLAH		1.201	1.657	2.858

Tabel 1.6. Komposisi PPPK Berdasarkan Pendidikan

Sumber : BKPSDM Kabupaten Manggarai Timur 2025

3. Komposisi ASN Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	I/a	0	0	0
	I/b	1	0	1
	I/c	2	0	2
	I/d	3	0	3
JUMLAH GOL.1				6
2	II/a	9	1	10
	II/b	24	9	33
	II/c	74	101	175
	II/d	76	64	140
JUMLAH GOL.2				358
3	III/a	144	144	288
	III/b	189	244	433
	III/c	177	185	362
	III/d	463	504	967
JUMLAH GOL.3				2050
4	IV/a	235	131	366
	IV/b	108	62	170
	IV/c	15	5	20
	IV/d	1	0	1
JUMLAH GOL.4				557
TOTAL PNS		1521	1450	2971

Tabel 1.7. Komposisi PNS Berdasarkan Golongan

Sumber: BKPSDM Kabupaten Manggarai Timur 2025

NO	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	JUMLAH
1	Tidak Diketahui	8	8	16
2	III	-	5	5
3	IX	886	945	1831
4	V	70	21	91
5	VII	152	572	724
6	X	78	110	188
7	XI	1	2	3
JUMLAH		1.195	1.663	2.858

Tabel 1.8. Komposisi PPPK Berdasarkan Golongan

Sumber : BKPSDM Kabupaten Manggarai Timur 2025

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur .

Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah tipe A
- b. Sekretariat DPRD tipe B
- c. Inspektorat Daerah tipe A
- d. Dinas Daerah terdiri atas :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan
 2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
 3. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 5. Dinas Sosial tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial
 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi
 7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 8. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan serta bidang kelautan dan perikanan
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 11. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik dan bidang persandian
 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
 15. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan
 17. Dinas Pertanian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

pertanian dan perkebunan

18. Dinas Peternakan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub bidang urusan peternakan dan kesehatan hewan
 19. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan kebakaran
 20. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
- e. Badan Daerah terdiri atas :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan serta fungsi penunjang urusan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan inovasi yang terintegrasi di daerah
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
 3. Badan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia

- **Rincian Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024**

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Timur , maka pada laporan ini di sampaikan pula total Aset atau barang berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan tahun 2024, yang dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan publik dan bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat Manggarai Timur, yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Konstruksi dalam Pengerjaan, serta aset tetap lainnya yang diperoleh baik secara hibah

maupun melalui proses pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan APBD Kabupaten Manggarai Timur. Rincian Aset Tetap Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:

No.	Jenis Aset Tetap	Nilai Buku sesuai Hasil Audit BPK-RI (Rp.)	Keterangan
1.	Tanah Pemda	142.688.077.716,74	Tanah Untuk Gedung Perkantoran, Sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas, lapangan olahraga, tanah terminal, tanah calon bandara, dll
2.	Peralatan dan Mesin	161.450.426.633,80	Kendaraan Dinas berupa, Alat Berat, Roda 6, Roda 4, Roda 3, Roda 2, Perahu Motor, dll
3.	Gedung dan Bangunan	480.851.947.729,62	Gedung Perkantoran, Sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas, Gedung Terminal, dll
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.108.013.840.057,93	Jalan Kabupaten,Jalan antar Kecamatan, Irigasi , jaringan air, jaringan listrik, dll
5.	Aset Tetap Lainnya	16.643.603.270,12	Hewan/ternak, tumbuh-tumbuhan/anakan, buku, benda bersejarah, dll
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	55.685.721.173,81	Pekerjaan konstruksi yang belum selesai dikerjakan, antara lain lanjutan pengerjaan Rumah Sakit,
7.	Akumulasi Penyusutan	(598.515.607.131,99)	Total Penyusutan untuk semua jenis Aset, kecuali Tanah tidak mengalami penyusutan.
	Jumlah Aset Tetap	1.366.818.009.450,03	Total aset setelah dikurangi Penyusutan.

Tabel 1.9. Rincian Aset Tetap Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan Tahun 2024
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Tujuan dan Sarana Strategis

2.1. Rencana Strategis Tahun 2019-2024

Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan

2.2. Visi

Berdasarkan kondisi Kabupaten Manggarai Timur saat ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi selama 5 tahun ,maka Visi Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019 - 2024 sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT MANGGARAI TIMUR YANG SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERDAYA (MATIM SEBER)”

Penjelasan dari Visi tersebut di atas adalah sebagai berikut : SEBER merupakan sebuah akronim dari Sejahtera, Berdaya dan Berbudaya. Dalam bahasa Manggarai, kata SEBER diartikan sebagai rajin dan ulet. SEBER juga mengandung makna budaya kerja dan etos kerja. Pemerintah bersama masyarakat didorong untuk memiliki budaya kerja yang berorientasi pada hasil maksimal dan unggul. Untuk lebih detailnya dijabarkan dibawah ini :

1. Sejahtera

Sejahtera adalah harapan setiap manusia. Sejahtera dimaksudkan sebagai suatu kondisi masyarakat dengan keterpenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Selain itu, pendidikan, kesehatan dan keamanan juga merupakan bagian dari harapan masyarakat yang harus dipenuhi dalam kehidupan bersama.

2. Berbudaya

Kebudayaan adalah cerminan harkat dan martabat manusia yang perlu dijunjung oleh setiap masyarakat. Nilai-nilai budaya Manggarai merupakan penuntun tingkah laku bagi setiap masyarakat untuk menjadi penyelaras kehidupan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan lahiriah dan

batiniah dan menumbuhkan jati diri dan kepribadian bangsa.

3. Berdaya

Peningkatan standar hidup masyarakat ke arah hidup yang lebih baik sangat tergantung dorongan dari diri sendiri untuk maju; untuk menggunakan potensi dan kompetensi yang ada dalam diri sendiri dan lingkungan sekitarnya; untuk meyakinkan diri sehingga pantas dan layak melakukan sesuatu. Atas dasar itu pencapaian kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan adalah pemberdayaan dan peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya ke arah yang lebih baik.

2.3. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemerataan dan peningkatan ualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat
2. Mengembangkan ekonomi unggulan berbasis pertanian berkelanjutan, pariwisata berbasis masyarakat, industri kecil, koperasi dan UMKM serta mewujudkan pembangunan desa berbasis budaya lokal
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastrukturdaerah yang berbasis lingkungan hidup untuk memudahkan akses ke pelayanan dasar dan mendukung prioritas ekonomi unggulan
4. Mewujudkan kabupaten ramah perempuan dan layak anak
5. Menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif, efisien dan terpercaya melayani masyarakat

2.4. Tujuan dan Sasaran

2.4.1. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi pembagunan daerah Kabupaten Manggarai Timur ditetapkan beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Tujuan
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Angka Kemiskinan 3. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD 4. Angka Harapan Lama Sekolah 5. Rata-Rata Lama Sekolah 6. Usia Harapan Hidup 7. Prevalensi Stunting 8. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 9. Persentase PPKS yang Sejahtera 10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Meningktanya Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. Nilai PDRB Sektor Unggulan
Mewujudkan Infrastruktur Berkelanjutan	1. Indeks Pembangunan Infrastruktur 2. Indeks Kualitas Infrastruktur 3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 4. Capaian Penataaan Ruang 5. Capaian Penataan Tanah 6. Indeks Resiko Bencana

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Inovatif dan Berorientasi Pelayanan	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah 3. Opini Laporan Keuangan 4. Nilai Maturitas SPIP 5. Indeks dan Predikat Penilaian SPBE 6. Indeks Kepuasan Masyarakat
--	---

Tabel 2.1. Tujuan dan Indikator Tujuan

Sumber : RPJMD-P Kabupaten Manggarai Timur 2019-2024

Pada poin pertama yakni Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial terdapat 10 indikator tujuan yang menjadi penentu keberhasilan yaitu :

- 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah berdasarkan kualitas hidup masyarakatnya. IPM menunjukkan sejauh mana masyarakat dapat menikmati hidup yang sehat, berpengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak. Konsep IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan di Indonesia perhitungannya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Terdapat 3 indikator utama penentu keberhasilan IPM ini yaitu umur panjang dan kelayakan hidup sehat, kemajuan pengetahuan, dan standar hidup layak.
- 2) Angka Kemiskinan adalah ukuran yang menunjukkan persentase atau jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Di Indonesia, pengukuran angka kemiskinan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dengan menggunakan konsep garis kemiskinan (GK) yang dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk kebutuhan dasar. Indikator yang menjadi acuan dari keberhasilan pengentasan kemiskinan yaitu : Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Garis Kemiskinan (P3).
- 3) Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD adalah indikator yang menunjukkan persentase anak usia 5–6 tahun yang mengikuti layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibandingkan dengan jumlah seluruh anak usia 5–6 tahun di suatu wilayah. Indikator ini digunakan untuk mengukur akses dan keterlibatan anak usia dini dalam pendidikan pra-sekolah, yang merupakan tahap penting sebelum memasuki pendidikan dasar. Data indikator ini biasanya digunakan oleh pemerintah daerah dan dihimpun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia serta Badan Pusat Statistik dalam evaluasi pembangunan sektor pendidikan. Terdapat 5 indikator yang menjadi acuan dari keberhasilan yaitu : jumlah anak usia 5-6 tahun, jumlah anak usia 5-6 tahun yang mengikuti PAUD, Rasio Partisipasi PAUD, Ketersediaan Lembaga PAUD, dan Ketersediaan Tenaga Pendidik PAUD.
- 4) Angka Harapan Lama Sekolah adalah rata-rata perkiraan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak pada usia tertentu (biasanya usia 7 tahun) di masa mendatang, apabila pola partisipasi sekolah pada saat ini tetap sama sepanjang hidupnya. Indikator ini merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan atau

pendidikan. Di Indonesia, data HLS dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Indikator keberhasilan angka harapan lama sekolah yaitu : Tingkat Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, Angka Melanjutkan Sekolah, Ketersediaan dan Akses Pendidikan.

- 5) Rata-Rata Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh masyarakat. RLS merupakan salah satu komponen penting dalam pengukuran dimensi pendidikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan dihitung oleh Badan Pusat Statistik. Secara sederhana, RLS menggambarkan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat, misalnya apakah sebagian besar penduduk hanya tamat SD, SMP, SMA, atau sudah menempuh pendidikan lebih tinggi. Indikator yang menjadi penentu keberhasilan dari angka rata-rata lama sekolah yaitu : Tingkat Partisipasi Sekolah, Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan Pendidikan, dan Akses Ketersediaan Pendidikan.
- 6) Usia Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa pola tingkat kematian pada saat itu tetap berlaku sepanjang hidupnya. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah dan merupakan salah satu komponen utama dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik. Secara sederhana, semakin tinggi usia harapan hidup, semakin baik kondisi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Sedangkan untuk indikator dari keberhasilan usia harapan hidup (UHH) yaitu : Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Status Gizi Masyarakat, Akses Terhadap Layanan Kesehatan, Sanitasi dan Air Bersih, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- 7) Prevalensi Stunting adalah persentase balita yang mengalami gangguan pertumbuhan (tubuh pendek atau sangat pendek) dibandingkan dengan standar tinggi badan menurut umur yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dalam waktu lama, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun). Di Indonesia, pengukuran prevalensi stunting dilakukan melalui survei kesehatan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Badan Pusat Statistik. Secara sederhana, prevalensi stunting menunjukkan seberapa besar proporsi balita yang mengalami masalah gizi kronis dalam suatu wilayah. Indikator dari keberhasilan penanganan stunting yaitu : Penurunan Prevalensi Stunting, Status Gizi Balita, Cakupan Pemberian ASI Eksklusif, Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap, Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak, dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
- 8) Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kualitas hidup. IPG menunjukkan apakah perempuan memiliki kesempatan dan akses yang setara dengan laki-laki dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Di Indonesia, perhitungan IPG dilakukan oleh Badan Pusat Statistik sebagai bagian dari indikator pembangunan manusia dan kesetaraan gender. Secara sederhana, IPG membandingkan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Indikator dari keberhasilannya yaitu : Tingginya Tingkat Kesehatan, Tingginya Tingkat Pendidikan, dan Standar Hidup Layak.

- 9) Persentase PPKS yang Sejahtera adalah indikator yang menunjukkan proporsi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah mengalami peningkatan kondisi kesejahteraan sosial setelah mendapatkan intervensi atau layanan sosial dibandingkan dengan jumlah total PPKS yang menjadi sasaran program. Istilah PPKS merujuk pada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang karena suatu kondisi memerlukan pelayanan sosial agar dapat hidup layak dan menjalankan fungsi sosialnya secara wajar. Konsep ini digunakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Secara sederhana, persentase PPKS sejahtera menggambarkan tingkat keberhasilan program kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kondisi kehidupan kelompok rentan. Indikator keberhasilannya yaitu : Jumlah PPKS yang Mendapatkan Layanan Sosial, Peningkatan Kondisi Sosial Ekonomi PPKS, Penurunan Jumlah PPKS, Akses Terhadap Layanan Dasar, dan Kemandirian Sosial PPKS
- 10) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Yang dimaksud pengangguran terbuka adalah penduduk usia kerja yang:
- tidak memiliki pekerjaan,
 - sedang mencari pekerjaan,
 - sedang mempersiapkan usaha,
 - atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan tetapi sebenarnya siap bekerja.

Di Indonesia, indikator ini dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik melalui survei ketenagakerjaan. Secara sederhana, TPT menggambarkan kondisi pasar kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan di suatu daerah. Semakin rendah nilainya, berarti semakin banyak penduduk yang bekerja. Indikator keberhasilan dari penurunan tingkat pengangguran terbuka yaitu : Penurunan angka pengangguran terbuka, Peningkatan Kesempatan Kerja, Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Peningkatan Keterampilan Kerja, dan Pertumbuhan Usaha dan Investasi.

Untuk Tujuan kedua yaitu Meningkatnya Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat terdapat 2 indikator yaitu :

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah persentase perubahan atau peningkatan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu, biasanya diukur setiap tahun. Laju pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di Indonesia, indikator ini dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) oleh Badan Pusat Statistik. Secara sederhana, semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, semakin berkembang kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Indikator keberhasilannya yaitu : Peningkatan Nilai PDRB, Peningkatan Pendapatan Perkapita, Penyerapan Tenaga Kerja, Perkembangan Sektor Usaha dan Industri, dan Peningkatan Investasi.
- 2) Nilai PDRB Sektor Unggulan adalah nilai kontribusi sektor-sektor ekonomi tertentu yang memiliki peran dominan atau keunggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor unggulan merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, memiliki potensi berkembang, serta mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Data PDRB biasanya dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Secara sederhana, nilai PDRB sektor unggulan menunjukkan seberapa besar peran sektor tertentu dalam membentuk

perekonomian daerah. Indikator keberhasilannya yaitu : Peningkatan Kontribusi Sektor terhadap PDRB, Pertumbuhan Nilai Tambah Sektor, Penyerapan Tenaga Kerja, Peningkatan Investasi di Sektor Unggulan, dan Peningkatan Pendapaatan Masyarakat.

Untuk Tujuan ketiga yaitu : Mewujudkan Infrastruktur Berkelanjutan terdapat 2 indikator yaitu :

- 1) Indeks Pembangunan Infrastruktur adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan, kualitas, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di suatu wilayah. Indeks ini menggambarkan sejauh mana infrastruktur dapat mendukung aktivitas ekonomi, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, indikator ini sering digunakan oleh pemerintah daerah serta lembaga seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menilai perkembangan infrastruktur. Secara sederhana, Indeks Pembangunan Infrastruktur menunjukkan seberapa baik suatu daerah menyediakan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat. Indikator keberhasilannya yaitu : Infrastruktur Transporatasi Memadai, Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi Memadai, Infrastruktur Energi dan Kelistrikan Memadai, Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman, dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 2) Indeks Kualitas Infrastruktur adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas, kondisi, dan fungsi infrastruktur yang tersedia dalam mendukung aktivitas ekonomi, pelayanan publik, serta mobilitas masyarakat di suatu wilayah. Indeks ini tidak hanya menilai ketersediaan infrastruktur, tetapi juga kondisi, kelayakan, dan efektivitas penggunaannya. Infrastruktur yang berkualitas akan meningkatkan konektivitas wilayah, efisiensi ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, penilaian kualitas infrastruktur sering digunakan oleh instansi pemerintah seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta dalam perencanaan pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Indikator keberhasilannya yaitu : Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Kualitas Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi, Kualitas Infrastruktur Energi dan Kelistrikan, Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman, dan Kualitas Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah secara komprehensif, yang mencakup kualitas udara, air, dan tutupan lahan. Indeks ini menggambarkan tingkat keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup serta upaya pelestarian sumber daya alam. Di Indonesia, IKLH dihitung dan dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai salah satu indikator kinerja pembangunan berkelanjutan. Secara sederhana, semakin tinggi nilai IKLH, semakin baik kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah. Indikator keberhasilannya yaitu : Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.
- 4) Capaian Penataan Ruang adalah tingkat keberhasilan pemerintah dalam merencanakan, memanfaatkan, dan mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah secara tertib, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Penataan ruang bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara dilakukan secara terencana dan tidak menimbulkan konflik pemanfaatan lahan maupun kerusakan lingkungan. Pelaksanaan penataan ruang di Indonesia diatur dan dibina oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Secara sederhana, capaian penataan ruang menunjukkan sejauh mana rencana tata ruang wilayah dapat diterapkan secara efektif dalam pembangunan daerah. Indikator keberhasilannya yaitu : Ketersediaan Dokumen Rencana Tata

Ruang, Tingkat Kesesuaian Penataan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengurangan Konflik Pemanfaatan Ruang, dan Ketersediaan Infrastruktur dan Kawasan yang Tertata.

- 5) Capaian Penataan Tanah adalah tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengatur, menata, dan mengelola penggunaan serta pemanfaatan tanah secara tertib, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penataan tanah bertujuan untuk memastikan bahwa penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta mendukung pembangunan wilayah. Pelaksanaan penataan tanah di Indonesia berada di bawah kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Secara sederhana, capaian penataan tanah menunjukkan sejauh mana pengelolaan tanah dilakukan secara tertib, jelas status hukumnya, dan dimanfaatkan secara produktif. Indikator keberhasilannya yaitu : Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Penataan dan Pengaturan Penguasaan Tanah, Penyelesaian Konflik dan Sengketa Tanah, Pemanfaatan Tanah Produktif, dan Ketersediaan Data dan Administrasi Pertanahan
- 6) Indeks Resiko Bencana adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat potensi risiko bencana di suatu wilayah berdasarkan kemungkinan terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat, lingkungan, serta aset pembangunan. Indeks ini menggambarkan seberapa besar risiko suatu daerah terhadap berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan bencana lainnya. Di Indonesia, pengukuran IRB dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Secara sederhana, semakin tinggi nilai indeks risiko bencana, semakin besar potensi risiko bencana yang dihadapi suatu wilayah. Indikator keberhasilannya yaitu : Penurunan Indeks Resiko Bencana, Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana, Penguatan Infrastruktur Mitigasi Bencana, Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Masyarakat, dan Integrasi Pengurangan Resiko Bencana dan Perencanaan Pembangunan

Untuk tujuan keempat yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Inovatif dan Berorientasi Pelayanan terdapat 6 indikator yaitu :

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Secara sederhana, Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan sejauh mana perubahan dan perbaikan sistem birokrasi telah dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah. Indikator keberhasilannya yaitu : Meningkatnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi dari tahun ke tahun, Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Menurunnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam birokrasi.
- 2) Nilai SAKIP Pemerintah Daerah adalah hasil penilaian terhadap tingkat penerapan sistem manajemen kinerja pada instansi pemerintah yang bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara/daerah dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil (outcome). SAKIP merupakan sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penilaian nilai SAKIP dilakukan oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terhadap kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Secara sederhana, nilai SAKIP menunjukkan seberapa baik instansi pemerintah mengelola kinerja dan anggarannya untuk mencapai hasil pembangunan yang nyata. Indikator keberhasilannya yaitu : Meningkatnya nilai SAKIP dari tahun ke tahun, Kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, Penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, Tercapainya target kinerja pembangunan daerah, Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

- 3) Opini Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu organisasi atau instansi dalam periode tertentu. Laporan ini digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam konteks pemerintahan, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Secara sederhana, laporan keuangan menggambarkan bagaimana keuangan pemerintah dikelola dan digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Indikator keberhasilannya yaitu : Opini audit dari BPK, Kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, Ketepatan waktu penyampaian pelaporan, Akurasi dan kelengkapan data keuangan, dan Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
- 4) Nilai Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam suatu instansi pemerintah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. SPIP merupakan sistem pengendalian yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai, pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, aset negara terjaga, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terjamin. Penilaian tingkat maturitas SPIP di instansi pemerintah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Secara sederhana, nilai maturitas SPIP menunjukkan seberapa baik sistem pengendalian internal telah diterapkan dalam pengelolaan pemerintahan. Indikator keberhasilannya yaitu : Meningkatnya level maturitas SPIP dari tahun ke tahun, Penerapan manajemen risiko yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan, Penguatan sistem pengendalian internal di setiap unit kerja, Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Menurunnya potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset negara.
- 5) Indeks dan Predikat Penilaian SPBE adalah nilai yang menunjukkan tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada instansi pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan terintegrasi. Penilaian indeks SPBE dilakukan secara nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Secara sederhana, Indeks SPBE menunjukkan seberapa baik instansi pemerintah memanfaatkan sistem digital dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator keberhasilannya yaitu : Meningkatnya nilai Indeks SPBE dari tahun ke tahun, Tersedianya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi, Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital, Efisiensi dan efektivitas dalam proses administrasi

pemerintahan, Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- 6) Indeks Kepuasan Masyarakat adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. IKM digunakan sebagai alat evaluasi untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan, harapan, dan standar pelayanan yang ditetapkan. Pengukuran IKM biasanya dilakukan melalui survei kepada masyarakat pengguna layanan sesuai pedoman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Secara sederhana, IKM menunjukkan seberapa puas masyarakat terhadap pelayanan yang mereka terima dari pemerintah. Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun ke tahun, Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, Pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan, Petugas pelayanan yang profesional, ramah, dan responsif, Berkurangnya jumlah keluhan atau pengaduan masyarakat terhadap pelayanan

2.4.2. Sasaran

Berdasarkan RPJMD-P 2019-2024 dan juga sasaran dari indikator kinerja utama maka ditetapkanlah beberapa sasaran yang perlu direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur yaitu :

Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Angka Kemiskinan 3. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pendidikan	1. Angka Harapan Lama Sekolah 2. Rata-Rata Lama Sekolah
Meningkatknya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Usia Harapan Hidup 2. Pravelensi Stunting
Meningkatnya Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender
Meningkatnya Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang Sejahtera
Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka
Meningkatnya Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Manggarai Timur Berbasis Potensi Lokal	Nilai PDRB Sektor Unggulan
Mewujudkan Infrastruktur Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik	Indeks Kualitas Infrastruktur
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Penataan Ruang dan Pembangunan Tanah	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Capaian Penataan Ruang

	3. Capaian Penataan Tanah
Meningkatnya Kesiagaan Terhadap Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Inovatif, dan Berorientasi Pelayanan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Efektivitas Pemerintah Daerah	1. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah 2. Opini Laporan Keuangan 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Indeks dan Predikat Penilaian SPBE
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.2. Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD
Sumber : RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2019-2024

Pada tabel diatas ini terdapat 15 sasaran yang menjadi acuan dari keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan program indikator yang sebelumnya telah ditetapkan. Dalam 15 sasaran ini terdapat 25 indikator program sebagai penunjang keberhasilan yaitu : (1) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial dengan indikator sasarannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Angka Kemiskinan, Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD, (2) Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pendidikan dengan indikator sasaran Angka Harapan Lama Sekolah, dan Rata-Rata Lama Sekolah, (3) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator sasarannya Usia Harapan Hidup, dan Pravelensi Stunting, (4) Meningkatnya Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan indikator sasarannya Indeks Pembangunan Gender, (5) Meningkatnya Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator sasarannya Persentase PPKS yang Sejahtera, (6) Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan indikator keberhasilannya Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka, (7) Meningkatnya Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat dengan indikator sasarannya Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi, (8) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Manggarai Timur Berbasis Potensi Lokal dengan indikator sasarannya Nilai PDRB Sektor Unggulan, (9) Mewujudkan Infrastruktur Berkelanjutan dengan indikator sasarannya Indeks Pembangunan Infrastruktur, (10) Meningkatkan Infrastruktur Publik dengan indikator sasarannya Indeks Kualitas Infrastruktur, (11) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang serta Pembangunan Tanah dengan indikator sasarannya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Capaian Penataan Ruang, dan Capaian Penataan Tanah, (12) Meningkatnya Kesiapsiagaan Terhadap Resiko Bencana dengan indikator sasarannya Indeks Resiko Bencana, (13) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Inovatif, dan Berorientasi Pelayanan dengan indikator sasarannya Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), (14) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Efektivitas Pemerintah Daerah dengan indikator sasarannya Nilai SAKIP PEMDA, Opini Laporan Keuangan, Nilai Maturitas SPIP, dan Indeks dan Predikat Penilaian SPBE, (15) Mening ktnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasarannya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

B. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja/Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67,82
Angka Kemiskinan	Persentase (%)	24,29
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	Persentase (%)	-
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,90
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,96
Usia Harapan Hidup	Tahun	69,08
Pravelensi Stunting	Persentase (%)	8,00
Indeks Pembangunan Gender	Nilai	99,2
Persentase PPKS yang Sejahtera	Persentase (%)	100
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	1,50
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase (%)	4,72
Nilai PDRB Sektor Unggulan	Nilai	1.483.845
Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persentase (%)	69,47
Indeks Kualitas Infrastruktur	Persentase (%)	53,57
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	82,91
Capaian Penataan Ruang	Persentase (%)	70
Capaian Penataan Tanah	Persentase (%)	100
Indeks Resiko Bencana	Nilai	140
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	45,14 Kategori (CC)
Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	62,95
Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP

Nilai Maturitas SPIP	Level	3
Indeks dan Predikat Penilaian SPBE	Nilai	2,68 BAIK
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,00

Tabel 2.3. Target Kinerja dan Indikator Kinerja Utama

Target kinerja dalam Perjanjian Kinerja merupakan ukuran keberhasilan utama yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu instansi pemerintah. Target Kinerja menggambarkan hasil yang paling penting (outcome) yang ingin dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Target Kinerja biasanya ditetapkan dalam beberapa dokumen perencanaan strategis dan menjadi acuan utama dalam pengukuran kinerja instansi pemerintah, terutama dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dibina oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Secara sederhana, IKU adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan utama organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan atau pelayanan publik. Target Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk Tahun 2025 yakni sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2025 ini ditargetkan menyentuh nilai indeks 67,82. Tentunya untuk memenuhi target tersebut ada beberapa program yang tentunya harus dijalankan sebagai penyelaras sasaran ini yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Pendidikan, (2) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, (3) Peningkatan Kesejahteraan dan Pendapatan Masyarakat, (4) Pengurangan Nilai Ketimpangan Sosial, dan juga (5) Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar.
2. Pengurangan Angka Kemiskinan
Pengurangan Angka Kemiskinan ditargetkan pada tahun 2025 ini turun 24,29%. Tentunya diperlukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memenuhi target ini yaitu sebagai berikut : (1) Peningkatan Kesempatan Kerja, (2) Peningkatan Akses Pendidikan, (3) Peningkatan Layanan Kesehatan, (4) Penguatan Program Perlindungan Sosial, dan (5) Pembangunan Ekonomi Berbasis Lokal.
3. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD
Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD berdasarkan data yang ada pada Dinas PPO tidak dicantumkan secara spesifik sehingga dalam dokumen LAKIP kali ini untuk persentase dan target yang ingin dicapai tidak dapat dijelaskan atau jika dimasukkan ke dalam angka berarti 0%.
4. Angka Harapan Lama Sekolah
Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah ditargetkan meningkat 12,90% di tahun 2025 ini. Maka dari itu diperlukan beberapa program penunjang sebagai langkah utama untuk meningkatkan angka tersebut yaitu sebagai berikut : (1) Peningkatan Akses Pendidikan, (2) Mengurangi Angka Putus Sekolah, (3) Meningkatkan Partisipasi Anak Usia Dini, (4) Peningkatan Kualitas Pendidikan, (5) Pemberian Bantuan Kepada Peserta Didik yang Membutuhkan.
5. Rata-Rata Lama Sekolah
Rata-Rata Lama Sekolah ditargetkan menyentuh angka 7,96 di tahun 2025 ini, maka dari itu untuk merealisasikan hal ini diperlukan beberapa program penunjang yakni sebagai berikut : (1) Mengurangi Angka Putus Sekolah, (2) Meningkatkan Akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan, (3) Program Pendidikan Kesetaraan, (4) Pemberian Bantuan Pendidikan, (5)

Peningkatan Kualitas Pendidikan, dan (6) Sosialisasi Pentingnya Pendidikan.

6. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup menunjukkan perkiraan rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi pola mortalitas (angka kematian) pada saat itu tetap berlaku. Indeks Usia Harapan Hidup pada tahun 2025 ini ditargetkan menyentuh angka 69,08, maka dari itu dibutuhkan beberapa program yakni sebagai berikut : (1) Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan, (2) Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, (3) Penurunan Angka Stunting dan Gizi Buruk, (4) Peningkatan Sanitasi dan Akses Air Bersih, (5) Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, dan (6) .Peningkatan Kesadaran Hidup Sehat.

7. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting adalah persentase balita yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis, yang ditandai dengan tinggi badan anak lebih rendah dari standar usianya. Stunting biasanya terjadi karena kekurangan gizi dalam waktu lama, pola asuh yang kurang baik, serta sanitasi dan layanan kesehatan yang tidak memadai. Prevalensi Stunting pada tahun 2025 ini ditargetkan turun ke 8,0%. Maka dari itu untuk memenuhi tujuan ini diperlukan beberapa program seperti : (1) Perbaikan Gizi Ibu Hamil, (2) Pemenuhan Gizi Bayi dan Balita, (3) Peningkatan Layanan Kesehatan, (4) Perbaikan Sanitasi dan Akses Air Bersih, (5) Edukasi Pola Asuh dan Gizi Keluarga, dan (6) Program Kesejahteraan Sosial.

8. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender ditargetkan pada tahun 2025 nilainya naik menjadi 99,2. Maka dari itu diperlukan beberapa program penunjang yakni sebagai berikut : (1) Meningkatkan Akses Pendidikan Bagi Perempuan, (2) Meningkatkan Kesehatan Perempuan, (3) Meningkatkan Partisipasi dan Ekonomi Perempuan, (4) Meningkatkan Kesempatan Kerja Bagi Perempuan, (5) Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan, dan (6) Peningkatan Program Pemberdayaan Perempuan.

9. Persentase PPKS yang Sejahtera

Persentase PPKS yang Sejahtera pada tahun 2025 ini ditargetkan naik menjadi 100%. Maka dari itu diperlukan program penunjang sebagai berikut : (1) Peningkatan Program Bantuan Sosial, (2) Pemberdayaan Ekonomi PPKS, (3) Peningkatan Bagi Warga yang Masuk ke dalam Daftar PPKS, (4) Peningkatan Layanan Kesehatan, (5) Penguatan Rehabilitasi Sosial, dan (6) Penguatan Perlindungan Sosial.

10. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau menunggu pekerjaan. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2025 ini ditargetkan turun ke 1,50. Maka dari itu diperlukan program penunjang seperti berikut ini : (1) Peningkatan Lapangan Kerja Baru, (2) Pengembangan UMKM Lokal, (3) Peningkatan Keterampilan Kerja, (4) Peningkatan Sektor Perekonomian Daerah, dan (5) Peningkatan Investasi Dalam Daerah.

11. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah indikator yang menunjukkan persentase peningkatan nilai produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah dalam periode tertentu. Pada tahun 2025 ini Laju Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan naik 4,72%. Maka dari itu agar tujuan ini tercapai diperlukan program penunjang yakni sebagai berikut : (1) Peningkatan Investasi, (2) Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan, (3) Pengembangan UMKM, (4) Peningkatan Kualitas SDM, dan (5) Peningkatan Akses Infrastruktur.

12. Nilai PDRB Sektor Unggulan

Nilai PDRB Sektor Unggulan merupakan nilai kontribusi sektor-sektor ekonomi utama yang menjadi kekuatan atau potensi utama suatu daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2025 ini Nilai PDRB Sektor Unggulan menyentuh nilai 1.483.845, maka dari itu dibutuhkan program penunjang keberhasilan yakni sebagai berikut : (1) Mengembangkan Potensi Sektor Unggulan Daerah, (2) Meningkatkan Produktivitas Sektor Unggulan, (3) Peningkatan Infrastruktur Pendukung, (4) Pengembangan Industri Pengolahan Sektor Unggulan, (5) Peningkatan Investasi di Sektor Unggulan dan (6) Peningkatan Akses Pasar.

13. Indeks Pembangunan Infrastruktur

Indeks Pembangunan Infrastruktur pada tahun 2025 ditargetkan mencapai angka 69,47%, maka dari itu untuk mencapai target ini dibutuhkan beberapa program penunjang yakni sebagai berikut : (1) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa, (2) Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, (3) Peningkatan Kualitas Infrastruktur, (4) Peningkatan Investasi Infrastruktur, (5) Perencanaan Infrastruktur yang Terintegrasi.

14. Indeks Kualitas Infrastruktur

Indeks Kualitas Infrastruktur Pada Tahun 2025 ini naik ke 53,57 %. Maka dari itu untuk memenuhi target tersebut dibutuhkan program penunjang yaitu sebagai berikut : (1) Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur, (2) Peningkatan Standar Kualitas Pembangunan, (3) Modernisasi Infrastruktur, (4) Peningkatan Infrastruktur Pendukung Pelayanan Publik, (5) Penguatan Sistem Pengelolaan Infrastruktur, dan (6) Peningkatan Partisipasi Masyarakat.

15. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 ini ditargetkan naik ke angka 82,91, maka dari itu untuk memenuhi target tersebut dibutuhkan program penunjang sebagai berikut : (1) Pengendalian Pencemaran Air, (2) Pengendalian Pencemaran Udara, (3) Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan, (4) Pengelolaan Sampah yang Benar, (5) Pengembangan Ruang Hijau Terbuka, dan (6) Peningkatan Kesadaran Lingkungan Masyarakat.

16. Capaian Penataan Ruang

Capaian Penataan Ruang pada tahun 2025 ini ditargetkan mencapai persentase 70%. Maka dari itu untuk menyelaraskan hal ini, dibutuhkan program penunjang seperti : (1) Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang, (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang, (3) Peningkatan Kualitas Perencanaan Wilayah, dan (4) Peningkatan Partisipasi Masyarakat.

17. Capaian Penataan Tanah

Capaian Penataan Tanah di tahun 2025 ini ditargetkan menyentuh angka 100%, maka dari itu dibutuhkan program penunjang seperti berikut ini : (1) Percepatan Sertifikasi Tanah, (2) Penataan Administrasi Pertanahan, (3) Penyelesaian Konflik dan Sengketa Tanah, (4) Pemanfaatan Tanah dengan Optimal, (5) Pengendalian Penggunaan Tanah.

18. Indeks Resiko Bencana

Indeks Resiko bencana pada tahun 2025 ini ditargetkan di angka 140, maka dari itu dibutuhkan program penunjang sebagai berikut ini : (1) Peningkatan Mitigasi Bencana, (2) Peningkatan Sistem Peringatan Dini, (3) Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana, (4) Peningkatan Infrastruktur Tahan Bencana, dan (5) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Bencana.

19. Indeks Reformasi Birokrasi 45,14 (cc)

Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun ini ditargetkan meraih predikat cc yaitu di kisaran angka 45,14, maka dari itu dibutuhkan program penunjang yakni sebagai berikut : (1) Penguatan Manajemen Perubahan, (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan, (3) Penataan dan Penguatan Organisasi, (4) Penataan Tata Laksana, (5) Penataan Sistem Manajemen Aparatur, dan (6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja

20. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

Pada tahun 2025 ini Nilai SAKIP Pemerintah Daerah ditargetkan mencapai 62,95, maka dari dibutuhkan berbagai program penunjang yakni seperti : (1) Peningkatan Kualitas Perencanaan Kinerja, (2) Penguatan Casacading Kinerja, (3) Peningkatan Kualitas Peningkatan Kinerja, (4) Penguatan Monitorng dan Evaluasi Kinerja.

21. Opini Laporan Keuangan

Opini Laporan Keuangan ditargetkan memperoleh WTP, maka dari itu dibutuhkan program penunjang yakni sebagai berikut : (1) Peningkatan Kualias Pengelolaan Keuangan Daerah, (2) Penyusunan Keuangan Daerah yang Sesuai Standar, (3) Penguatan Sistem Pengendalian Internal, (4) Penataan danPengelolaan Aset Daerah, (5) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dan (6) Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keuangan.

22. Nilai Maturitas SPIP

Nilai Maturitas SPIP pada tahun 2025 ini ditargetkan menyentuh level 3, maka dari itu dibutuhkan program penunjang yakni sebagai berikut : (1) Penguatan Lingkungan Pengendalian, (2) Peningkatan Manajemen Resiko, (3) Penguatan Kegiatan Pengendalian, (4) Penguatan Sistem Informasi dan Komunikasi, (5) Penguatan Monitoring dan Evaluasi, dan (6) Peningkatan Kapasistas SDM.

23. Indeks dan Penilaian Predikat SPBE

Indeks dan Penilaian Predikat SPBE ditargetkan 2025 ini memperoleh predikat BAIK dengan nilai 2,68, maka dari itu dibutuhkan program penunjang sebagai berikut : (1) Penguatan kebijakan dan Regulasi SPBE, (2) Integrasi Sistem Informasi Pemerintah, (3) Peningkatan Teknologi Infrastruktur Informasi, (4) Pengembangan Layanan Publik Digital, (5) Penguatan Tata Kelola SPBE, dan (6) Peningkatan Kompetensi SDM Teknologi Informasi.

24. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 ini ditargetkan mencapai nilai 80,00, maka dari itu perlu beberapa aspek penunjang yaitu sebagai berikut : (1) Kebijakan , (2) Profesionalisme SDM, (3) Sarana dan Prasarana. (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (5) Konsultasi dan Pengaduan, (6) Inovasi .

C. Penetapan Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis Utama	Indikator Kinerja Utana	Satuan	Target	Target (RPD)	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
----	-------------------------	-------------------------	--------	--------	--------------	------------------	---------------

1	Menigkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67,82			
		2. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	-	-			
	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pendidikan	3. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,90			
		4. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,96			
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	1. Angka Kemiskinan	-	-	-	-	-
	Menigkatnya Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	2. Persentase PPKS yang Sejahtera	-	-	-	-	-
	Meningkanya Layanan Sosial Dasar Kepada PPKS	1. Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial	Persen	-	80	1. Program Rehabilitasi Sosial	655.585.300
						2. Program Penanganan Bencana	197.195.400
						3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	47.000.000
						4. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	4.500.000

		2. Persentase PSKS yang Berperan Aktif	Persen	-	7	1. Program Pemberdayaan Sosial	37.321.000
3	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Usia Harapan Hidup	Tahun	69,08	-	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	31.726.282.480
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.068.523.254
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	431.210.344
		2. Pravelensi Stunting	Persen	8	-	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.532.454.006
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	586.115.000
4	Meningkatnya Kesetaraan Gender , Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1. Indeks Pembangunan Gender	-	-	-	Program Pengarusutamaan Gender	163.560.000
		1. Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	-	55	1. Program Perlindungan Perempuan	20.224.800
						2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	20.114.800
						3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	565.602.500

5	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,8	-	1. Program Penempatan Tenaga Kerja	85.598.500
						2. Program Hubungan Industrial	88.210.000
						3. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	115.948.500
						4. -	-
6	Meningkatnya Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	-	-	-	-	-
	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Manggarai Timur Berbasis Potensi Lokal	2. Nilai PDRB Sektor Unggulan	-	-	-	Perencanaan dan Pembangunan Industri	499.483.200
	Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Perindustrian	1. Nilai PDRB Sektor Pengolahan	Nilai		311,376	1. Pengendalian Izin Usaha Industri Pengelolaan	15.000.000
						2. Sistem Informasi Industri Nasional	25.000.000
						3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	329.000.000
		2. Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Nilai		12,520	1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan	50.997.000

						Pokok dan Barang Penting	
						2. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	8.000.000
						3. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	9.164.700
						4. Pengembangan Ekspor	8.550.000
						5. Program Perizinan dan Pendftaran Perusahaan	20.845.000
						6. -	-
7	Mewujudkan Infrastruktur Berkelanjutan	1. Indeks Pembangunan Infrastruktur	-	-	-	-	-
	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik	2. Indeks Kualitas Infrastruktur	-	-	-	-	-
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, dan Pembangunan Tanah	1. Capaian Penataan Ruang	-	-	-	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	231.177.900
	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	1. Indeks Kualitas Infratraktur Dasar	Persen	-	57,03	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11.237.203.520

	Meningkatkan SPM Bidang Perumahan	2. Persentase Capaian SPM Perumahan	Persen	-	100	2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11.237.203.520
	Meningkatkan Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh	3. Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	Persen	-	13	3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.262.027.000
	Meningkatkan Kesesuaian dan Ketaatan Pemanfaatan Ruang	4. Persentase Kesesuaian dan Ketaatan Pemanfaatan Ruang	Persen	-	40	4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.262.027.000
						5. Program Penataan Bangunan Gedung	150.000.000
						6. Program Penyelenggaraan Jalan	55.736.763.883
						7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	898.550.000
						8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.592.508.000
						9. Program Pengembangan Perumahan	389.541.475
						10. Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	873.867.750
						11. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	3.890.172.000

						(PSU)	
						12. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	281.998.800
8	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruangm dan Pembangunan Tanah	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	82,91	-	-	-
		2. Capaian Penataan Tanah	-	-	-	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	176.000.000
	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	3. Persentase Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase	-	54,90	1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	281.998.800
						2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	63.999.700
						3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	123.000.000
						4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	125.000.000

						5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	40.000.000
						6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	28.999.400
						7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	20.000.000
						8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	15.000.000
						9. Program Pengelolaan Persampahan	814.932.400
9	Meningkatnya Kesiagaan Terhadap Resiko Bencana	1. Indeks Resiko Bencana 2. Indeks Ketahanan Daerah	- Poin	- -	- 0,5	Program Penanggulang an Bencana	662.999.900

10	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Inovatif dan Berorientasi Pelayanan	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,84	-	1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 2. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	14.107.000 39.574.400
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Efektivitas Pemerintah Daerah	2. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	62,95	-	1. -	-
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan						
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	3. Program Penataan Organisasi	324.420.900
		2. Indeks Pelayanan Publik	Indeks	-	3,88	1. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	36.399.600
						2. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	21.672.000
11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Efektivitas	1. Opini Laporan Keuangan	-	-	-	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	212.574.789.010

	Pemerintah Daerah	1. Persentase Capaian Kinerja Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persen	-	100	1. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	434.413.000
		2. Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah dalam APBD	Persen	-	4,5	2. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	842.100.830
12	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Efektivitas Pemerintah Daerah	1. Nilai Maturitas SPIP	Level	3	-	1. Program Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	184.404.000
13	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi	1. Indeks dan Predikat Penilaian SPBE	Skor	2,68 (BAIK)	-	1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	70.000.000

Tabel 2.4. Tabel Penetapan Kinerja
Sumber : Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik penjelasan yakni sebagai berikut :

1. Dinas PPO

Sampai saat LAKIP ini diunggah, dinas PPO belum mengunggah LAKIP mereka.
2. Sasaran strategis dari Dinas Sosial yakni Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial serta Meningkatkan Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial mendapat pergeseran menjadi 1 sasaran strategis utama akibat RPJMD Peralihan yakni menjadi Meningkatkan Layanan Sosial Kepada PPKS. Begitu pula pada Indikator Kinerja Utama nya menjadi Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial dan Persentase PSKS yang Berperan Aktif . Target yang dicanangkan oleh Dinas Sosial pada Tahun 2025 yakni sebesar 80% sesuai pada dokumen RPD Dinas Sosial, sedangkan program yang dijalankan untuk memenuhi indikator terebut dibagi menjadi 5 program yang dibagi menjadi :
 1. Indikator Pertama yakni Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial dibagi menjadi 4 program yaitu :
 - Program Rehabilitasi Sosial mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 655.585.300,00
 - Program Penanganan Bencana mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 197.195.400,00

- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 7.000.000,00
 - Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 4.500.000,00
2. Indikator Kedua yakni Persentase PSKS yang Berperan Aktif dengan 1 programnya yaitu Program Pemberdayaan Sosial mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 37.321.000,00
 3. Dinas Kesehatan hanya mengalami perubahan pada sasaran saja yang awalnya Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial menjadi Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. Selain itu terdapat beberapa program yang menjadi indikator keberhasilan dari sasaran Dinas Kesehatan yakni : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 31.726.282.480,00, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 10.068.523.254,00, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan anggaran Rp. 431.210.344,00, Program Upaya Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 92.532.454.006,00, dan yang terakhir Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan serta Minuman dengan anggaran sebesar Rp. 586.115.000,00
 4. Perubahan RPJMD Peralihan juga berdampak Indikator dari Dinas P2KBP3A. Indikator yang pada awalnya Indeks Pembangunan Gender berubah menjadi Indeks Pemberdayaan Gender. Target dari indikator ini diharapkan dapat menyentuh angka 55%. Maka dari itu untuk memenuhi target tersebut perlu dijalankan program-program yakni : Program Pengarusutamaan Gender, Program Perlindungan Perempuan, dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
 5. Perubahan RPJMD Peralihan tidak memengaruhi Sasaran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi begitu pula pada indikator kinerja utamanya. Sasaran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetap pada alurnya yaitu Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka. Targetnya sendiri yaitu sebesar 1,8 % , untuk memenuhi target tersebut maka diperlukan program yang harus dijalankan beserta dengan besaran pagu anggarannya. Maka dari itu terdapat 4 program yang dijalankan untuk memenuhi indikator kinerja utama dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yakni sebagai berikut :
 - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 565.602.500,00
 - Program Penempatan Tenaga Kerja mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 85.598.500,00
 - Program Hubungan Industrial mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 88.210.000,00
 - Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 115.948.500,00
 6. RPJMD Peralihan turut memengaruhi juga sasaran dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang awalnya Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat dan Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Manggarai Timur Berbasis Potensi Lokal menjadi Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Perindustrian. Begitu pula pada indikator kinerja utamanya menjadi Nilai PDRB Sektor Pengolahan dan Nilai PDRB Sektor Perdagangan. Untuk indikator pertama yaitu Nilai PDRB Sektor Pengolahan target yang ingin dicapai di tahun 2025 yakni naik sebesar Rp. 12.520,00, sedangkan untuk indikator keduanya yakni Nilai PDRB Sektor Perdagangan target yang harus dicapai yaitu naik sebesar Rp. 311.376,00. Selain itu terdapat 9 program penunjang yang menjadi acuan dasar keberhasilan dari kedua indikator tersebut yakni sebagai berikut :
 1. Nilai PDRB Sektor Pengolahan memiliki 3 program yaitu :

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 499.483.200,00
 - Program Pengendalian Izin Usaha Industri Pengolahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00
 - Program Sistem Informasi Industri Nasional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00
2. Nilai PDRB Sektor Perdagangan memiliki 6 program yaitu :
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 329.000.000,00
 - Program Satabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.997.000,00
 - Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.000.000,00
 - Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan pagu angaaran sebesar Rp. 9.164.700,00
 - Program Pengembangan Ekspor dengan pagu anggaran sebesar RP. 8.550.000,00
 - Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.845.000,00
7. Dampak RPJMD Peralihan pun turut dirasakan oleh Dinas PUPR yang semulanya sasaran strategis yang dicapai yaitu Mewujudkan Infrastruktur Berkelanjutan, Meningkatkan Infrastruktur Publik, dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Pembangunan Tanah menjadi Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar, Meningkatkan SPM Bidang Perumahan, Meningkatkan Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh, dan Meningkatkan Kesesuaian dan Ketaatan Pemanfaatan Ruang. Begitu pula pada indikator kinerja utamanya berubah menjadi Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (Target 57,03%), Persentase Capaian SPM Perumahan (Target 100%), Persentase Penanganan Kawasan Kumuh (Target 13%), dan Persentase Kesesuaian dan Ketaatan Pemanfaatan Ruang (Target 40%). Untuk memenuhi target tersebut maka dibuatlah program penunjang yakni sebagai berikut :
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.231.177.900,00
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.237.203.520,00
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.262.027.000,00
 - Program Penataan Bangunan Gedung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00
 - Program Penyelenggaraan Jalan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 55.736.763.883,00
 - Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 898.550.000,00
 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.592.508.000,00
 - Program Pengembangan Perumahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 389.541.475,00
 - Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh dengan pagu anggaran sebesar Rp. 873.867.750,00
 - Program Peningkatan Sarana, Prasaran, dan Utilitas Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.890.172.000,00

8. Dinas Lingkungan Hidup pun terkena dampak dari RPJMD Peralihan, sasaran utama yang semula Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, dan Pembangunan Tanah menjadi Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain itu salah satu indikator kinerja utama juga berubah yang semulanya Persentase Capaian Tanah menjadi Persentase Pengelolaan Lingkungan Hidup. Target yang harus dicapai di tahun 2025 untuk 2 indikator kinerja utama dari sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup yaitu (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Target 82,91), dan (2) Persentase Pengelolaan Lingkungan Hidup (Target 53,90% Berdasarkan RPD Dinas Lingkungan Hidup). Untuk memenuhi kedua target tersebut maka diperlukan program penunjang yakni sebagai berikut :
1. Indikator dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup hanya memiliki 1 program yakni Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan pagu anggaran sebesar Rp. 281.998.800,00
 2. Indikator dari Persentase Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki 10 program yakni sebagai berikut :
 - Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan pagu anggaran sebesar Rp. 176.000.000,00
 - Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan pagu anggaran sebesar Rp. 281.998.800,00
 - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan pagu anggaran sebesar Rp. 63.999.700,00
 - Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan pagu anggaran sebesar Rp. 123.000.000,00
 - Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan pagu anggaran sebesar Rp. 125.000.000,00
 - Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00
 - Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 28.999.400,00
 - Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00
 - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00
 - Program Pengelolaan Persampahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 814.932.400,00
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah pun merasakan dampak dari perubahan RPJMD Peralihan indikator kinerja utama yang awalnya Indeks Resiko Bencana berubah menjadi Indeks Ketahanan Daerah. Target yang perlu dicapai untuk memenuhi indikator kinerja utama yaitu sebesar 0,5. Tentunya untuk memenuhi target tersebut diperlukan program penunjang, maka dari itu program penunjang yang dibuat yaitu berupa Program Penanggulangan Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 662.999.900,00
10. Bagian Organisasi merupakan salah satu dari banyaknya Perangkat Daerah yang juga terdampak karena perubahan RPJMD Peralihan, sasaran strategis utama yakni Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Inovatif, dan Berorientasi Pelayanan serta Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Efektivitas Pemerintah Daerah berubah menjadi satu sasaran strategis saja yakni Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Selain itu salah satu indikator kinerja utama juga turut menyesuaikan yang awalnya Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi Indeks

Pelayanan Publik. Target dari beberapa indikator yang ada yakni : (1) Indeks Reformasi Birokrasi (Target 67,84), (2) Nilai SAKIP Pemerintah Daerah (Target 62,93), dan (3) Indeks Pelayanan Publik (Target 3,88 diambil dari RPD Bagian Organisasi). Untuk memenuhi ketiga target tersebut perlu dibuatkan program penunjang yakni :

- Program dari Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi adalah Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 39.574.400,00
 - Program dari Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP Pemerintah Daerah adalah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.107.000,00
 - Program dari Indikator Kinerja Utama Indeks Pelayanan Publik adalah : (1) Penataan Organisasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 324.420.900,00, (2) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.399.600,00, dan (3) Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 21.672.000,00
11. Badan Keuangan Daerah tak luput juga dari dampak RPJMD Peralihan, indikator kinerja utama yang awalnya berupa Opini Laporan Keuangan bergeser menjadi Persentase Capaian Kinerja Keuangan dan Barang Milik Daerah serta Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah dalam APBD. Target dari kedua indikator ini yakni sebesar 100% untuk Persentase Capaian Kinerja Keuangan dan Barang Milik Daerah serta 4,5% untuk Rasio Terhadap Total Pendapatan Daerah dalam APBD. Untuk memenuhi target tersebut maka diperlukan program penunjang yakni :
- Persentase Capaian Kinerja Keuangan dan Barang Milik Daerah memiliki 2 program yaitu : (1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 212.574.789.010,00 dan (2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 434.413.000,00
 - Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah dalam APBD dengan program Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 842.100.830,00
12. Inspektorat Daerah memiliki sasaran strategis yakni Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Efektivitas Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja utamanya yaitu Nilai Maturitas SPIP dengan target Level 3. Agar indikator dapat berjalan dengan baik diperlukan program penunjang yaitu Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 184.404.000,00
13. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi dengan indikator kinerja utamanya yaitu Indeks dan Predikat Penilaian SPBE dengan target skor 2,68 (BAIK). Maka dari itu untuk menyeleraskan indikator tersebut diperlukan program penunjang yaitu Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 70.000.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Kinerja adalah keluaran/ hasil dari program/ kegiatan/ sub kegiatan yang hendak dan telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud dari kegiatan tahun- tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun- tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja tiap tahunnya.

Kinerja Setiap Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi tersebut dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kebijakan, pelaksanaan, dan hasil pelayanan publik yang diberikan oleh setiap instansi.

Berdasarkan hasil evaluasi, Perangkat Daerah telah melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain melalui penetapan standar pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta penerapan mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat. Pelaksanaan pelayanan juga didukung oleh upaya peningkatan kompetensi aparatur dan penguatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Pemerintah Daerah secara berkelanjutan terus melakukan perbaikan terhadap aspek-aspek pelayanan publik dan aspek lainnya dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi KemenPANRB. Upaya tersebut mencakup penyempurnaan proses bisnis pelayanan, peningkatan efektivitas pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan. Secara keseluruhan, hasil evaluasi KemenPANRB menjadi dasar bagi seriap Instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Target kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur yang ada dalam target kinerja di setiap perjanjian kinerja ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

No	Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025
	2	3	4	5
1	Dinas PPO (Belum)			

2	Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial	Persen	80	81,54
	Persentase PSKS yang Berperan Aktif	Persen	7	39,27
3	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,08	73,19
	Prevelensi Stunting	Persen	8	8,4
4	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	55	47,8
5	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,8	1,24
6	Nilai PDRB Sektor Pengolahan	Nilai (Satuan Juta)	12.519.058.000	24.200.000.000
	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Nilai (Satuan Juta)	311.376.009.000	607.016.000.000
7	Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar	Persen	57,03	41,88
	Persentase Capaian SPM Perumahan	Persen	100	33,33
	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	Persen	13	0
	Persentase Kesesuaian dan Ketaatan Pemanfaatan Ruang	Persen	40	94,12
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	82,91	76,51
	Persentase Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	54,90	20,14
9	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,5	0,46
10	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,84	Belum Dapat Dinilai
	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	62,95	Belum Dapat Dinilai
	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,88	3,36
11	Persentase Capaian Kinerja Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persen	100	82,51
	Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah dalam	Persen	4,5	5,76

	APBD			
12	Nilai Maturitas SPIP	Level	3	2
13	Indeks dan Predikat Penilaian SPBE	Skor	2,68	2,64

Tabel 3.1. Target Kimerja dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Tabel diatas dapat ditarik suatu kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. Dinas PPO

Sampai saat LAKIP ini diunggah, LAKIP dinas PPO belum diunggah.
2. Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial Target 80% dengan realisasi 81,54%, keberhasilan realisasi dari indikator ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : Ketepatan Data dan Validasi, Koordinasi Lintas Sektor yang Baik, Mekanisme Penyaluran yang Efektif, Sosialisasi Program yang Masif, Dukungan Aparatur dan Pendamping Sosial, Komitmen Pemerintah Daerah, serta Partisipasi Lingkungan Masyarakat.

Persentase PSKS yang Berperan Aktif Target 7 % dengan realisasi 39,27% . Tentu saja keberhasilan indikator ini tidak terlepas dari berbagai faktor yaitu sebagai berikut : Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas PSKS, Dukungan Anggaran dan Fasilitas, Koordinasi Sinergi yang Baik, Kejelasan Peran dan Tugas PSKS, Monitoring dan Evaluasi secara Konsisten, dan Tingginya Kepedulian Masyarakat.
3. Realisasi kinerja Indikator Tujuan “Usia Harapan Hidup” adalah 73,19 tahun (Data BPS Kabupaten Manggarai Timur) dari target yang telah ditetapkan 69,08 tahun dan “Prevalensi Stunting” sebesar 8,4 dari target 8,0. Adapun realisasi capaian dari indikator tujuan ini dapat dipengaruhi oleh capaian dari 5 (lima) indikator kinerja utama kepala dinas dan 9 (sembilan) indikator kinerja turunan/program/kegiatan.
4. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan target kinerja sebesar 55% dan realisasinya sebesar 47,8%. Realisasi yang masih rendah ini disebabkan oleh banyaknya faktor sehingga diharapkan kedepannya diperlukan peningkatan kembali program strategis untuk mendukung indikator ini.
5. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Target 1,8% dengan realisasinya 1,24%. Rendahnya realisasi dari indikator ini diebakkan karena beberapa faktor yakni sebagai berikut : Rendahnya Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Manggarai Timur, Kurangnya Sektor Informal bagi Tenaga Kerja yang Mencari Kerja, Tingginya Persentase Angkatan Kerja yang Tidak Sebanding dengan Lapangan Pekerjaan, Rendahnya Mobilitas Penduduk, serta Rendahnya Tingkat Pendidikan.
6. Nilai PDRB sektor Perdagangan yang di targetkan Rp.311,376,08 miliar dan realisasi nya

Rp.607,16 Miliar. Kenaikan nilai PDRB Sektor perdagangan dari yang ditargetkan disebabkan oleh beberapa factor antara lain :

- Peningkatan Volume Transaksi : Kenaikan ini mencerminkan aktivitas jual-beli barang dan jasa yang meningkat, yang bisa dipicu oleh pembukaan pusat perbelanjaan baru, peningkatan daya beli masyarakat, atau efektivitas distribusi logistik.
- Kontribusi dari perdagangan berbasis platform digital (e-commerce) dan ekonomi kreatif sering kali memberikan tambahan nilai tambah yang signifikan
- Sektor perdagangan sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor lain seperti industri pengolahan atau pertanian. Jika pasokan barang dari sektor ini meningkat, maka nilai tambah di sektor perdagangan otomatis ikut terkerek naik.

Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan yang di targetkan Rp.12,519,58 miliar dan realisasinya adalah Rp24,20 Miliar, kenaikan ini disebabkan karena Ketersediaan bahan baku yang melimpah, investasi modal yang berkelanjutan, serta dukungan infrastruktur yang meningkat Selain itu, adopsi teknologi inovatif, tenaga kerja terampil, serta kebijakan pemerintah yang mendukung memacu produktivitas melalui Palatihan - pelatihan pengoalahan bahan mentah menjadi barang jadi, Pemberian bantuan peralatan industti pengolahan terhadap UMKM dan sosialisasi pentingnya legalitas usaha sehingga mempermudah pelaku IKM untuk mendapatkan akses permodalah yang merupakan fondasi utama dalam mengembangkan usahanya, selain itu Permintaan pasar yang terus berkembang juga memberikan insentif kuat bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi.

7. Pada indikator Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar, realisasi kinerja tercatat sebesar 41,88%, sementara target kinerja tahun 2025 ditetapkan sebesar 57,03%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian saat ini masih berada di bawah target, sehingga diperlukan upaya percepatan dan optimalisasi program pembangunan infrastruktur dasar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal

Selanjutnya, pada indikator Persentase Kesesuaian dan Ketaatan Pemanfaatan Ruang, realisasi kinerja mencapai 94,12%, melampaui target kinerja tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 40,00%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melebihi ekspektasi, yang mengindikasikan efektivitas pengawasan, pengendalian, serta kepatuhan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pada indikator Persentase Capaian SPM, realisasi kinerja baru mencapai 33,33%, sedangkan target kinerja tahun 2025 ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemenuhan Standar Pelayanan Minimal masih memerlukan perhatian serius, karena terdapat selisih yang cukup besar antara realisasi dan target. Diperlukan langkah strategis, penguatan koordinasi, serta optimalisasi sumber daya agar target dapat tercapai secara maksimal.

Terakhir, pada indikator Penanganan Kawasan Kumuh, realisasi kinerja masih berada pada angka 0%, sementara target kinerja tahun 2025 ditetapkan sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa program penanganan kawasan kumuh belum terealisasi pada periode pelaporan, sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan, dukungan anggaran, serta sinergi lintas sektor guna mencapai target yang telah direncanakan.

8. Pada indkator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup target yang ingin dicapai yaitu sebesar 82,91 sedangkan realisasinya hanya mencapai angka 76,51. Rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) umumnya disebabkan oleh kombinasi faktor tekanan manusia, kelemahan tata kelola, dan perubahan alam, maka dari itu diperlukan percepatan pada peningkatan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan, Pengelolaan Sampah yang Benar, Penguatan Tata Kelola Lingkungan, serta Peningkatan Kesadaran Masyarakat agar kedepannya

realisasi dari indikator ini dapat meningkat dan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan

Sedangkan pada indikator Persentase Pengelolaan Lingkungan Hidup target yang ditetapkan sebesar 54,90% namun realisasinya hanya menyentuh angka 20,14%. Rendahnya realisasi ini disebabkan oleh Rendahnya persentase pengelolaan lingkungan hidup disebabkan oleh : Keterbatasan Fasilitas dan Anggaran, Lemahnya Tata Kelola, dan Rendahnya Partisipasi Masyarakat. Maka dari itu diperlukan kombinasi solusi untuk meningkatkan target ini yaitu dengan melakukan : Penguatan Sistem Manajemen, Penyediaan Infrastruktur yang Memadai, serta Memberikan Sosialisasi Perubahan Perilaku Kepada Masyarakat.

9. Pada Indikator Indeks Ketahanan Daerah Target yang ingin dicapai yaitu sebesar 0,5 namun realitanya realisasi yang tercapai hanya sebesar 0,46. Penyebab dari rendahnya indikator ini yaitu karena faktor : Rendahnya Kerentanan Daerah terhadap Suatu Bencana Alam, Lemahnya Ketahanan Ekonomi, Mobilitas Infrastruktur yang Belum Memadai Sehingga Mobilisasi Bantuan Bencana Menjadi Agak Terhambat, Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan yang Masih Rendah, serta Degradasi Lingkungan. Maka dari itu perlu adanya peningkatan terhadap faktor-faktor tersebut agar kedepannya indeks yang tercapai dapat lebih tinggi.
10. Indikator berikutnya yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dengan target 67,84 Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu indikator kinerja organisasi yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah. Pada Tahun 2025, target kinerja untuk Indeks Reformasi Birokrasi ditetapkan sebesar 67,84 dengan satuan indeks. Namun demikian, sampai dengan penyusunan laporan ini, realisasi kinerja Tahun 2025 belum dapat disajikan karena hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih dalam proses dan nilai resmi belum diterbitkan. Nilai realisasi tersebut akan diperbarui setelah hasil evaluasi resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diterima.

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada Tahun 2025, target kinerja untuk indikator Nilai SAKIP Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 62,95 dengan satuan indeks. Namun demikian, hingga saat penyusunan laporan ini, realisasi kinerja Tahun 2025 belum dapat disajikan, karena hasil evaluasi Nilai SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih dalam proses dan nilai resmi belum diterbitkan. Nilai realisasi tersebut akan diperbarui setelah hasil evaluasi resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diterima.

Selain itu Pada Tahun 2025, Bagian Organisasi menetapkan target kinerja Indeks Pelayanan Publik sebesar 3,88. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi yang dicapai adalah sebesar 3,36 atau 86,59% dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator ini belum memenuhi target yang direncanakan. Belum tercapainya target tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: Belum Optimalnya Pemenuhan Standar Pelayanan Pada Beberapa Unit Layanan, Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan yang Belum Sepenuhnya Memenuhi Standar Pelayanan Publik, Kualitas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang Masih Perlu Ditingkatkan, Konsistensi Penerapan Budaya Pelayanan Prima yang Belum Merata Pada Seluruh Perangkat Daerah.

Meskipun demikian, capaian sebesar 3,36 menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik telah berjalan dalam kategori cukup baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek standar pelayanan, kualitas SDM, serta sistem pengelolaan pelayanan.

11. Indikator yang berikutnya Persentase Capaian Kinerja Keuangan dan Barang Milik Daerah mencapai realisasi sebesar 82,51% dari target kinerja sebesar 100%, sehingga capaian kinerja

mencapai 82,51%. Dengan demikian capaian indikator kinerja Persentase capaian kinerja keuangan dan barang milik daerah tahun 2025 berdasarkan skala pengukuran kinerja berkategori “Tinggi”. Capaian Indikator Persentase capaian kinerja keuangan dan barang milik daerah merupakan hasil akumulasi capaian indikator kinerja dari 3 program pendukung capaian kinerja utama yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Target realisasi indikator kinerja Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah dalam APBD pada tahun 2025 adalah sebesar 4,5%. Target mengacu pada Renstra Badan Keuangan Daerah tahun 2025 – 2026, sedangkan perhitungan realisasi mengacu pada realisasi APBD kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025. Dari target Realisasi Indikator kinerja Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah dalam APBD sebesar 4,5%, realisasi yang diperoleh mencapai 5,76% atau 128,57%, dengan demikian capaian indikator kinerja Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah dalam APBD berkategori “ Sangat Tinggi“ bahkan melampaui target.

- 12. Indikator berikutnya yaitu Nilai Maturitas SPIP dengan targetnya 3, namun pada pelaksanaannya hanya mampu memenuhi 2. Hal ini diakibatkan karena beberapa faktor yaitu : Komitmen Pimpinan Lemah, Pemahaman ASN Terbatas, Manajemen Risiko Belum Optimal, Pengawasan dan Evaluasi Belum Efektif, Sistem Belum Terintegrasi.
- 13. Pada tahun 2025, target Indeks SBBE adalah nilai 2,68 dengan predikat baik. Realisasi adalah 2,64 Realisasi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2025 mencapai skor 2,64 dengan predikat Baik, atau sebesar 99% dari target proyeksi yang ditetapkan senilai 2,68. Meskipun belum melampaui target yang diproyeksikan, capaian ini menunjukkan tren peningkatan (progresif) dibandingkan dengan indeks tahun 2023 sebesar 2,62. Tidak tercapainya target secara maksimal dipengaruhi secara dominan oleh keterbatasan anggaran yang menyebabkan belum disusunnya dokumen Peta Rencana atau Masterplan SPBE sebagai instrumen strategis utama penilaian. Mengingat nilai ini akan menjadi basis data performa untuk tahun 2024 hingga 2025 sebelum bertransformasi menjadi Indeks Pemerintah Digital pada tahun 2027, maka pemenuhan dokumen perencanaan strategis menjadi urgensi organisasi guna mengoptimalkan tata 9 kelola digital secara komprehensif di masa mendatang.Tingkat Kematangan SPBE pada Domain Tata Kelola SPBE.

2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Keberhasilan perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengendalian dan evaluasi sehingga dapat memberikan informasi penting untuk membantu pemangku kepentingan maupun pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, memperbaiki dan menentukan tindak lanjut yang cepat, tepat, dan terukur. Maka dari itu diperlukan suatu pengukuran untuk menjadi pembanding antara target dan realiasi kinerja. Dibawah ini disajikan tabel data pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

No	Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
	2	3	4	5 (4/3)*100%
1	Dinas PPO (Belum)			
2	Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial	80	81,54	1,01

	Persentase PSKS yang Berperan Aktif	7	39,27	5,61
3	Usia Harapan Hidup	69,08	73,19	1,06
	Prevelensi Stunting	8	8,4	1,05
4	Indeks Pemberdayaan Gender	55	47,8	0,86
5	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	1,8	1,24	0,68
6	Nilai PDRB Sektor Pengolahan	12.519.058.000	24.200.000.000	1,93
	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	311.376.009.000	607.016.000.000	1,94
7	Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar	57,03	41,88	0,73
	Persentase Capaian SPM Perumahan	100	70	0,7
	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	13	0	0
	Persentase Kesesuaian dan Ketaatan Pemanfaatan Ruang	40	94,12	2,35
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82,91	76,51	0,92
	Persentase Pengelolaan Lingkungan Hidup	54,90	20,14	0,36
9	Indeks Ketahanan Daerah	0,5	0,46	0,92
10	Indeks Reformasi Birokrasi	67,84	Belum Dapat Dinilai	N/A
	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	62,95	Belum Dapat Dinilai	N/A
	Indeks Pelayanan Publik	3,88	3,36	0,86
11	Persentase Capaian Kinerja Keuangan dan Barang Milik Daerah	100	82,51	0,82
	Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah dalam APBD	4,5	5,76	1,28
12	Nilai Maturitas SPIP	3	2	0,66
13	Indeks dan Predikat Penilaian SPBE	2,68	2,64	0,98

nNote : (Dibawah 1 Capaian Kinerja Lebih Rendah, 1 Capaian Kineja Seimbang, Diatas 1 Capaian Kinerja Lebih Tinggi)

Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Berdasarkan tabel yang telah diabarkan diatas dapat ditarik suatu penjelasan yakni :

1. Dinas PPO

Sampai satt LAKIP PEMDA ini diunggah, LAKIP dinas PPO belum juga diunggah.

2. Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial dengan Target 80% dan Realisasnya sebesar

81,54%; dengan Capaian Kinerja Capaian Kinerja sebesar 1,01. Sedangkan untuk Persentase PSKS yang Berperan Aktif dengan target 7% dan Realisasinya sebesar 39,27% untuk Capaian Kinerja nya sebesar 5,61. Untuk kedua indikator kinerja ini mendapatkan nilai capaian kinerja yang bagus yaitu diatas 1, hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan khususnya untuk kedua indikator sasaran ini di Dinas Sosial berjalan dengan baik.

3. Bagi Dinas Kesehatan sebagai OPD yang juga turut aktif sebagai penyelenggara indikator dari LAKIP PEMDA dengan kedua indikatornya yaitu Usia Harapan Hidup dan Prevelensi Stunting juga turut menyumbangkan nilai yang baik. Dimulai dari Usia Harapan Hidup dengan Target sebesar 69,08 dan Realisasinya sebesar 73,19 mendapatkan Nilai Capaian Kinerja sebesar 1,06 dan untuk Prevelensi Stunting dengan Target 8 dan Realisasinya sebesar 8,4 mendapatkan nilai Capaian Kinerja sebesar 1,05. Kedua indikator ini juga mendapatkan Capaian Kinerja yang baik dengan rata-rata Capaian Kinerja diatas 1.
4. Dinas P2KB3A di tahun 2025 ini belum mendapatkan hasil yang memuaskan hal ini ditunjukan dari indikator yang mereka jalankan yakni Indeks Pemberdayaan Gender yang hanya mendapatkan Capaian Kinerja sebesar 0,86. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan pada indikator ini belum berjalan dengan baik, sehingga kedepannya diperlukan kembali peningkatan untuk indikator ini.
5. Pada tahun 2025 jumlah angkatan kerja adalah sebesar 177.635 orang dan jumlah pengangguran terbuka adalah sebesar 2.210 orang. Maka berdasarkan rumus perhitungan tingkat pengangguran terbuka (TPT), nilai tingkat pengangguran terbuka atau Realisasinya di Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 adalah sebesar 1,24% , sedangkan untuk target yang harus dicapai sebesar 1,8%. Maka dari itu untuk Capaian Kinerja nya menyentuh angka 0,68. Hal ini menunjukkan bahwa program kegiatan untuk indikator kinerja ini belum dijalankan secara maksimal sehingga hanya memperoleh angka tersebut.
6. Nilai PDRB Sektor Perdagangan dengan Target 311,4 Miliar dan Realisasinya sebesar 607,2 Miliar dengan Capaian Kinerjanya sebesar 1,94. Kenaikan yang signifikan ini disebabkan oleh beberapa factor antara lain : Peningkatan Volume Transaksi dimana kenaikan ini mencerminkan aktivitas jual-beli barang dan jasa yang meningkat, yang bisa dipicu oleh pembukaan pusat perbelanjaan baru, peningkatan daya beli masyarakat, atau efektivitas distribusi logistik selain itu kontribusi dari perdagangan berbasis platform digital (e-commerce) dan ekonomi kreatif sering kali memberikan tambahan nilai tambah yang signifikan.

Sedangkan untuk Nilai PDRB Sektor Pengolahan dengan Target 12,52 Miliar dan Realisasinya adalah Rp24,20 Miliar dengan Capaian Kinerja nya 1,93. Kenaikan ini disebabkan karena Ketersediaan bahan baku yang melimpah, investasi modal yang berkelanjutan, dukungan infrastruktur yang meningkat, adopsi teknologi inovatif, tenaga kerja terampil, serta kebijakan pemerintah yang mendukung memacu produktivitas melalui Pelatihan - pelatihan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi, Pemberian bantuan peralatan industri pengolahan kepada pelaku UMKM dan Sosialisasi pentingnya legalitas usaha sehingga mempermudah pelaku UMKM untuk mendapatkan akses permodalan yang merupakan fondasi utama dalam mengembangkan usahanya, selain itu Permintaan pasar yang terus berkembang juga memberikan insentif kuat bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi.

7. Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar Realisasi kinerja tercatat sebesar 41,88%, dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 57,03%. Adapun capaian kinerja tahun 2025 menyentuh angka 0,73. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, capaian kinerja ini belum memenuhi target yang ada. Capaian Kinerja yang masih dibawah target ini mengindikasikan

bahwa pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar belum berjalan efektif.

Persentase Kesesuaian dan Ketaatan Pemanfaatan Ruang Realisasi sebesar 94,12%, dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 40%. Capaian Kinerja tahun 2025 menyentuh angka 2,35. Perbandingan ini menunjukkan bahwa indikator tersebut berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Tingginya capaian mencerminkan peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatnya tingkat kepatuhan terhadap rencana tata ruang.

Persentase Capaian SPM Perumahan Realisasi kinerja sebesar 70%, dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 100%. Capaian kinerja tahun 2025 berada di angka 0,7. Hasil ini menunjukkan bahwa capaian kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Selisih yang cukup besar antara target dan realisasi mengindikasikan perlunya percepatan pelaksanaan program serta optimalisasi sumber daya untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan.

Penanganan Kawasan Kumuh Realisasi kinerja tercatat sebesar 0%, dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 13%. Capaian kinerja tahun 2025 juga sebesar 0. Perbandingan ini menunjukkan bahwa indikator tersebut belum mencapai target. Tidak adanya capaian mengindikasikan bahwa kegiatan penanganan kawasan kumuh belum terlaksana atau belum menghasilkan output yang terukur pada tahun berjalan. Diperlukan perhatian khusus dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan agar target dapat direalisasikan.

8. Persentase Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target 82,91 sedangkan untuk realisasi nya sebesar 76,51 dengan capaian kinerja sebesar 0,92. Berdasarkan data yang sudah disajikan menunjukan bahwa indikator ini belum dijalankan secara maksimal, oleh karena itu dibutuhkan peningkatan program kegiatan kedepannya agar indikator ini dapat terpenuhi di kemudian hari.

Persentase Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan target 54,90% dan realisasinya 20,14% sedangkan untuk capaian kinerjanya hanya sebesar 0,36. Rendahnya Capaian Kinerja ini menunjukan bahwa program kegiatan dari indikator ini belum dijalankan secara maksimal, oleh karena itu kedepannya dibutuhkan komitmen kuat instansi untuk menyelaraskan program yang ada agar target dan capaian indikator ini dapat terpenuhi.

9. Indeks Ketahanan Daerah dengan target 0,5 dan realisasinya sebesar 0,46 menghasilkan capaian kinerja sebesar 0,92. Hasil Capaian Kinerja sudah menunjukan hasil yang cukup baik hanya dibutuhkan 0,08 untuk memenuhi target yang ada, namun kedepannya masih diperlukan kembali peningkatan agar realisasi kinerja yang ada dapat memenuhi target atau jika perlu dapat melampaui target yang ada.
10. Pada tahun 2025, indikator kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah memiliki target kinerja sebesar 62,95 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Penilaian terhadap indikator tersebut dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berwenang melakukan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pemerintah daerah. Namun demikian, hingga penyusunan laporan ini dilakukan, hasil evaluasi dan penilaian SAKIP Tahun 2025 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum diterbitkan. Oleh karena itu, realisasi atau capaian kinerja untuk indikator Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada tahun 2025 belum dapat disajikan. Sehubungan dengan kondisi tersebut, capaian kinerja indikator tersebut untuk sementara tercatat tidak dapat dihitung, karena nilai hasil evaluasi belum tersedia. Nilai realisasi akan diperbarui setelah hasil evaluasi resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diterbitkan.

Selain itu indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi yang memiliki target kinerja sebesar 67,84 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penilaian terhadap indeks tersebut dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah daerah. Namun demikian, hingga penyusunan laporan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025 ini dilakukan, hasil evaluasi dan penetapan nilai Indeks Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum diterbitkan. Oleh karena itu, realisasi atau capaian kinerja terhadap indikator tersebut belum dapat disajikan secara definitif. Sehubungan dengan kondisi tersebut, capaian kinerja sementara untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 masih tercatat belum dapat dinilai, karena nilai hasil evaluasi resmi belum tersedia. Nilai realisasi kinerja akan diperbarui setelah hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diterbitkan secara resmi.

Namun untuk target kinerja Indeks Pelayanan Publik sebesar 3,88. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, realisasi capaian kinerja sebesar 3,36 atau 86,59% dari target yang telah ditetapkan. Namun demikian, capaian indikator kinerja utama ini belum mencapai target yang direncanakan, capaian kinerja yang ada hanya menyentuh angka 0,86. Selisih sebesar 0,14 poin dari target menunjukkan masih terdapat beberapa aspek pelayanan publik yang perlu diperkuat, terutama pada pemenuhan standar pelayanan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, serta konsistensi penerapan budaya pelayanan prima pada seluruh perangkat daerah.

11. Pada tahun 2025 Indikator kinerja Persentase capaian kinerja keuangan dan barang milik daerah mencapai realisasi sebesar 82,51% dari target kinerja sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 0,82. Dengan demikian capaian indikator kinerja Persentase capaian kinerja keuangan dan barang milik daerah tahun 2025 berdasarkan skala pengukuran kinerja berkategori “Cukup Tinggi”. Capaian Indikator Persentase capaian kinerja keuangan dan barang milik daerah merupakan hasil akumulasi capaian indikator kinerja dari 3 program pendukung capaian kinerja utama yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Selain itu Target realisasi indikator kinerja Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah dalam APBD pada tahun 2025 adalah sebesar 4,5%. Target mengacu pada Renstra Badan Keuangan Daerah tahun 2025 – 2026, sedangkan perhitungan realisasi mengacu pada realisasi APBD kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025. Dari target Realisasi Indikator kinerja Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah dalam APBD sebesar 4,5%, realisasi yang diperoleh mencapai 5,76% atau capaiannya mencapai angka 1,28 dengan demikian capaian indikator kinerja Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah dalam APBD berkategori “ Sangat Tinggi” bahkan melampaui target.

12. Monitoring evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil dari pemeriksaan Nilai Maturitas SPIP dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2025 adalah sebesar 3 poin dengan realisasi Capaian Kinerja 2 poin dengan Capaian Kinerja sebesar 0,66. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai Maturitas SPIP belum menunjukkan peningkatan yang baik, sehingga kedepannya diperlukan kembali peningkatan untuk indikator ini.
13. Indikator Indeks dan Predikat Penilaian SPBE dengan target 2,8 dan realisasinya sebesar 2,64 menunjukkan hasil capaian kinerja sebesar 0,98. Persentase capaian kinerja yang cukup tinggi ini tentu saja dapat terpenuhi berkat program yang dijalankan yaitu Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Namun walaupun persentase capaian yang tinggi, diharapkan kedepannya persentase capaian kinerja yang diharapkan harus sesuai dengan terget dan realisasi yang dijalankan bahkan

jika perlu melampauinya.

3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

No	Kinerja	Target Kinerja Tahun			Realisasi Kinerja Tahun			Deviasi (-/+)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Dinas PPO (BELUM)									
2	Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial	-	-	80	-	-	81,54	-	-	1,54
	Persentase PSKS yang Berperan Aktif	-	-	7	-	-	39,27			32,27
3	Usia Harapan Hidup	70,5	71	69,08	68,49	72,98	73,19	-2,01	1,98	4,11
	Prevelensi Stunting	7,5	7	8,00	9,00	8,32	8,40	1,5	1,32	0,4
4	Indeks Pemberdayaan Gender	-	-	55	53,62	53,16	47,8	-	-	-7,2
5	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	-	-	1,8	-	1,63	1,24	-	N/A	-0,56
6	Nilai PDRB Sektor Pengolahan	-	-	12,52M	-	18,09%	24,2M (193%)	-	-	11,68 M
	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	-	-	311,4M	-	52%	607,2M (195%)	-	-	295,8 M
7	Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar	-	-	57,03	-	-	41,88	-	-	-15,15
	Persentase SPM Capaian Perumahan	-	-	100	-	-	70	-	-	-30
	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	-	-	13	-	-	-	-	-	-
	Persentase Kesesuaian dan Ketaatan Pemanfaatan Ruang	-	-	40	-	-	94,12	-	-	54,12
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	82,91	78,56	144,84	76,51	N/A	N,A	-6,4
	Persentase Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	54,90	71	0	20,14	N/A	N/A	-34,76
9	Indeks Ketahanan Daerah	-	-	0,5	0,48	0,44	0,46	N/A	N/A	-0,04
10	Indeks Reformasi Birokrasi	74	76	67,84	51,10	60,47	N/A	-22,9	- 15,53	N/A
	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	B (60-	B (60-70)	62,95	60,82	61,31	N/A	0 (B)	0 (B)	N/A

		70)								
	Indeks Pelayanan Publik	-	-	3,88	-	-	3,36	-	-	-0,52
11	Persentase Capaian Kinerja Keuangan dan Barang Milik Daerah	-	-	100	-	74,84	82,51	-	N/A	-17,49
	Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah dalam APBD	-	-	4,5	-	3,37	5,76	-	N/A	1,26
12	Nilai Maturitas SPIP	2	2	3	2	2	2	0	0	-1
13	Indeks dan Predikat Penilaian SPBE	-	-	2,68	-	2,63	2,64	-	-	-0,04

Tabel 3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibanding Tahun Sebelumnya

- Berdasarkan tabel yang telah disajikan diatas dapat ditarik kesimpulan yakni :
1. DINAS PPO Sampai saat LAKIP ini diunggah, dinasPPO belu mengunggah LAKIP mereka.
 2. Pada indikator kinerja Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial untuk deviasi di tahun 2025 sebesar 1,54, namun deviasi di tahun 2023 dan 2024 tidak disertakan karena indikator di tahun 2023 dan 2024 berbeda dengan tahun 2025. Maka dari itu ketika dibuat perbandingan antara deviasi tahun ini dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.
 Begitu pula untuk indikator Persentase PSKS yang Berperan Aktif tidak dapat dilakukan perbandingan deviasi dikarenakan bedanya indikator di tahun 2024 dan 2023, namun untuk deviasi di tahun 2025 berada di angka 32,27.
 3. Usia harapan hidup adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Usia Harapan Hidup merupakan indikator positif, dimana semakin tinggi nilainya menunjukkan kinerja yang semakin baik. Tahun 2025 merupakan tahun pertama dijalankannya RPD Tahun 2025-2026 dan Renstra Peralihan 2025-2026, sehingga dalam penentuan target memiliki perbedaan dengan target periode sebelumnya, dimana tahun 2025 target Usia Harapan Hidupnya cenderung lebih rendah. Tahun 2023 : Target sebesar 70,5, sedangkan realisasi 68,49, sehingga terdapat deviasi -2,01. Hal ini menunjukkan capaian masih di bawah target. Tahun 2024: Target 71, realisasi 72,98 dengan deviasi 1,98, yang berarti kinerja melampaui target yang ditetapkan. Untuk Tahun 2025: Target 68,08, realisasi 73,13 sehingga terdapat deviasi 4,11, yang menunjukkan target berhasil tercapai dan melampaui target.
 Prevalensi stunting merupakan indikator negatif, dimana semakin rendah nilainya menunjukkan kondisi yang semakin baik. Pada Tahun 2023 : Target 7,50, realisasi 9,00 dengan deviasi 1,5. Deviasi positif pada indikator negatif menunjukkan kinerja belum mencapai target, karena angka stunting lebih tinggi dari yang diharapkan. Tahun 2024 : Target 7, realisasi 8,32 dengan deviasi 1,32, yang juga menunjukkan capaian masih belum sesuai target. Tahun 2025 : Target 8, realisasi 8,40 dengan deviasi 0,4, yang menunjukkan realisasi masih lebih tinggi dari target, sehingga kondisi yang diharapkan belum tercapai
 4. Pada indikator Indeks Pemberdayaan Gender perhitungan deviasi tidak dapat dilakukan karena Target di tahun 2023 dan 2024 tidak dicantumkan pada LAKIP instansi pengampu. Namun jika mengacu pada realisasi yang ada terdapat penurunan di tahun 2023-2025. Pada tahun 2023-2024

deviasi nya turun sebesar 0,46 dari realisasi yang ada, begitu juga di tahun 2024-2025 terdapat penurunan kembali sebesar 5,36. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan masih perlu diperkuat, terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.

5. Berdasarkan komparasi data ketenagakerjaan tahun 2025 didapatkan hasil bahwa penduduk usia kerja tahun 2024 adalah sebesar 206.690 orang, sedangkan jumlah penduduk usia kerja tahun 2025 adalah sebesar 213.061 orang. Dari hasil komparasi data tahun 2024 dengan tahun 2025 dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan jumlah penduduk usia kerja sebesar 6.371 orang. Sehingga pada akhirnya setelah dikalkulasikan terdapat jumlah angkatan kerja tahun 2024 adalah sebesar 163.892 orang sedangkan jumlah angkatan kerja tahun 2025 adalah 177.635 orang. Dari hasil komparasi data tahun 2024 dengan tahun 2025 dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan jumlah angkatan kerja sebesar 13.743 orang. Jumlah pengangguran terbuka tahun 2024 adalah sebesar 2.666 orang atau sebesar 1,63%, sedangkan jumlah pengangguran terbuka tahun 2025 adalah sebesar 2.210 orang atau sebesar 1,24%. Namun jika deviasi tahun 2024 ditotal tidak ditemukan angka deviasi, hal ini disebabkan karena target di tahun 2024 tidak dicantumkan di tabel yang ada, untuk tahun 2025 nilai deviasi berada di angka -0,56, sedangkan di tahun 2023 indikator ini tidak ada sebab perbedaan indikator antara tahun 2023 dan 2024 2025. Namun jika mengacu pada realisasi kinerja di tahun 2024 dan tahun 2025 terdapat penurunan sebesar 0,39% yang menunjukkan hasil yang cukup baik dalam penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Manggarai Timur karena rumus perhitungan dari Tingkat Pengangguran Terbuka ini sendiri yaitu jika nilai yang didapat dari hasil selisih menurun maka indikator berjalan dengan baik.
6. Pada indikator Nilai PDRB Sektor Pengolahan nilai deviasi di tahun 2023, 2024 dan 2025 tidak dapat dibandingkan karena di tahun 2023 indikator ini tidak masuk dalam kinerja utama Dinas terkait, sedangkan di tahun 2024 nilai deviasi tidak dapat dicantumkan karena target kinerja dari instansi tidak dimasukan kedalam dokumen LAKIP. Namun jika dinilai berdasarkan penilaian realisasi maka terjadi peningkatan signifikan di indikator ini, hal ini terjadi di tahun 2025 dengan realisasi sebesar 193%, sedangkan di tahun sebelumnya hanya berada di 18,09% sehingga jika dikalkulasikan didapatkan hasil tingkat deviasi berdasarkan realisasi di angka 174,91%.
Begitu pula Nilai PDRB Sektor Perdagangan, nilai deviasi tidak dapat dihitung karena indikator ini tidak masuk dalam LAKIP di tahun 2023, sedang untuk tahun 2024 tidak terdapat target yang dijelaskan secara spesifik sehingga nilai deviasi tidak dapat dihitung. Namun jika penilaian dilakukan menggunakan tingkat capaian realisasi maka didapatkan hasil yang sangat baik dimana di tahun 2024 indikator ini hanya berada di angka 62% sedangkan di tahun 2025 naik drastis di angka 195%. Sehingga jika ditotal melalui capaian realisasi didapatkan hasil bahwa deviasi antara tahun 2025 dengan tahun 2024 sebesar 133%.
7. Untuk indikator Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar, Persentase SPM Capaian Perumahan, Persentase Penanganan Kawasan Kumuh, dan Persentase Kesesuaian dan Pemanfaatan Ruang tidak dapat diukur deviasinya dikarenakan keempat indikator ini pada tahun sebelumnya tidak masuk kedalam indikator kinerja dari Dinas PUPR.
8. Pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, deviasinya tidak dapat dihitung hal ini dikarenakan target tahun 2023 dan 2024 tidak dimasukan kedalam indikator kinerja yang ada, namun jika mengacu pada data realisasi capaian kita dapat melihat bahwa terdapat kenaikan signifikan di tahun 2024 dari realisasi yang awalnya 78,56 pada tahun 2023 menjadi 144,84 di tahun 2024, namun di tahun 2025 terdapat penurunan yang sangat signifikan juga menjadi 76,51. Maka jika kita total deviasi berdasarkan realisasi kinerja yang ada menyentuh angka 66,28% di rentang tahun 2023-2024 dan menurun drastis menjadi -68,3 di rentang tahun 2024-2025.

Begitu pula indikator kedua yakni Persentase Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dapat dihitung deviasinya karena target kinerja yang ingin dicapai di tahun 2023 dan 2024 juga tidak dimasukkan. Namun jika mengacu pada realisasi kinerja dari tahun 2023-2025 terdapat penurunan yang cukup signifikan antara rentang pada waktu tersebut, dimana di tahun 2023 indikator ini menyentuh angka 71 namun di tahun 2024 menjadi 0, hal ini disebabkan karena indikator ini tidak dijalankan pada tahun tersebut, dan di tahun 2025 indikator ini naik kembali menjadi 20,14. Meskipun mengalami kenaikan di tahun 2025 sebenarnya realisasi ini sangat turun jika dibandingkan di tahun 2023, penurunan yang terjadi di rentang tahun 2023-2025 mencapai -50,86. Kedepannya diperlukan peningkatan kembali pada indikator ini agar nantinya program yang dijalankan dapat membuahkan hasil yang baik sehingga indikator ini juga dapat kembali naik bahkan melampaui realisasi di tahun 2023.

9. Indikator berikutnya yaitu Indeks Ketahanan Daerah tidak dapat diukur juga deviasinya, lagi-lagi persoalan yang sama menjadi penyebab yaitu target yang ingin dicapai tidak dimasukkan kedalam LAKIP dari Instansi pengampu indikator ini yaitu BPBD Kabupaten Manggarai Timur. Namun jika hanya mengacu pada realisasi yang ada terdapat penurunan sebesar 0,04 yang dimana jika dilihat realisasi tahun 2023 menyentuh angka 0,48 sedangkan di tahun 2024 hanya menyentuh angka 0,44, namun di tahun 2025 terjadi peningkatan kembali sebesar 0,02 atau sebesar 0,46. Namun jika dibandingkan realisasi tahun 2025 masih lebih rendah dari realisasi di tahun 2023.
10. Berikutnya indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP Pemerintah Daerah belum dapat dinilai deviasinya karena untuk realisasi di tahun 2025 belum dikeluarkan oleh KemenpanRB sehingga belum dapat dinilai.

Sedangkan untuk Indeks Pelayanan Publik deviasi antara tahun sebelumnya tidak dapat dihitung karena indikator yang ada berbeda dengan indikator di tahun sebelumnya. Namun untuk deviasi antara target dan realisasi di tahun 2025 mendapatkan angka yang rendah yaitu di angka -0,52.

11. Pada tahun 2025 realisasi kinerja Persentase Capaian Kinerja Keuangan dan Barang Milik Daerah meningkat 10,13% dari 74,84% menjadi 82,42% dan indikator Rasio PAD terhadap pendapatan daerah juga mengalami peningkatan dari 3,37% menjadi 5,76% atau meningkat 71,13%.
12. Pada indikator Nilai Maturitas SPIP terjadi stagnansi di deviasi tahun 2023 dan 2024 yang sama-sama menyentuh angka 0. Namun di tahun 2025 turun menjadi -1.
13. Realisasi Indeks SPBE pada tahun 2025 tercapai sebesar 2,64 dengan predikat "Baik". Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 2,63, terdapat kenaikan absolut sebesar 0,01 poin. Analisis Deviasi : Meskipun terjadi kenaikan realisasi secara nominal, terdapat deviasi negatif sebesar - 1% terhadap target tahun 2025 (2,68). Hal ini disebabkan oleh penetapan target yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, secara substansi, instansi berhasil mempertahankan tren positif dan menjaga konsistensi predikat kinerja pada kategori "Baik". Namun jika kita mengacu pada deviasi utama antara rentang waktu di tahun 2023-2025 tidak dapat dilakukan karena di tahun 2023 indikator ini tidak dijalankan sama sekali dan di tahun 2024 tidak terdapat target yang ingin dicapai pada LAKIP instansi pengampu indikator ini yaitu Dinas Komunika dan Informatika.

4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah Serta Capaian Standar Nasional

No	Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Kinerja (RPJMD) 2025	Tingkat Capaian Kinerja (RPJMD) Tahun 2025
	2	3	4	5	6 = (4/5)*100%
1	Dinas PPO (Belum)				
2	Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial	80	81,54	93	0,9
	Persentase PSKS yang Berperan Aktif	7	39,27	10	4,00
3	Usia Harapan Hidup	69,08	73,19	N/A	N/A
	Prevelensi Stunting	8,00	8,40	18,8	Tidak Dapat Diukur Karena Berbeda Standar Pengukuran
4	Indeks Pemberdayaan Gender	55	47,8	54,66	0,87
5	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	1,8	1,24	1,75	0,7
6	Nilai PDRB Sektor Pengolahan	12.519.058.000	24.200.000.000	13.239.000.000	1,82
	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	311.376.009.000	607.016.000.000	329.280.000.000	1,83
7	Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar	57,03	41,88	53,78	0,8
	Persentase Capaian SPM Perumahan	100	70	100	0,7
	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	13	0	40	0
	Persentase Kesesuaian dan Ketaatan Pemanfaatan Ruang	40	94,12	40	2,4
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82,91	76,51	76,49	1,0
	Persentase Pengelolaan Lingkungan Hidup	54,90	20,14	-	-
9	Indeks Ketahanan Daerah	0,5	0,46	0,46	1,0
10	Indeks Reformasi Birokrasi	67,84	Belum Dapat Dinilai	74,36	N/A
	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	62,95	Belum Dapat Dinilai	65,58	N/A
	Indeks Pelayanan Publik	3,88	3,36	4,09	0,82

11	Persentase Capaian Kinerja Keuangan dan Barang Milik Daerah	100	82,51	100	0,82
	Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah dalam APBD	4,5	5,76	5,0	1,15
12	Nilai Maturitas SPIP	3	2	8	0,25
13	Indeks dan Predikat Penilaian SPBE	2,68	2,64	2,75	0,96

Note : (Dibawah 1 Capaian Kinerja Lebih Rendah, 1 Capaian Kineja Seimbang, Diatas 1 Capaian Kinerja Lebih Tinggi)

Tabel 3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Target RPJMD

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas dapat ditarik penjelasan yakni sebagai berikut :

- Dinas PPO
Sampai saat LAKIP ini diunggah, dinas PPO belum mengunggah LAKIP mereka.
- Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial dengan target kinerja Akhir Periode RPJMD sebesar 93%; realisasi/capaian kinerja 2025 sebesar 81,54%; tingkat Capaian Kinerja sampai tahun 2025 sebesar 0,9.
Persentase PSKS yan Berperan Aktif dengan target kinerja Akhir Periode RPJMD sebesar 10%; realisasi/capaian kinerja 2025 sebesar 39,27%; tingkat capaian kinerja sampai 2025 sebesar 4.
- Usia Harapan Hidup dan Prevelensi Stunting tidak dapat dinilai karena penilaian yang ada masih menggunakan Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026, sementara pada tingkat nasional Kementerian Kesehatan telah menggunakan RPJMD 2025–2029 tanpa melalui fase peralihan
- Pada indikator Indeks Pemberdayaan Gender realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 47,8 sedangkan target pada akhir RPJMD sebesar 54,66. Dengan demikian tingkat capaian terhadap RPJMD hingga tahun 2025 menyentuh angka 0,87. Hal ini menunjukan bahwa upaya pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender masih perlu ditingkatkan agar kesenjangan gender dalam berbagai sektor pembangunan dapat trus diperkecil dan targer RPJMD dapat terpenuhi bahkan bila perlu melampaui.
- Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target kinerja sesuai RPJMD sebesar 1,75 dan realisasi sebesar 1,24 maka tingkat capaian kinerja sesuai RPJMD sampai tahun 2025 sebesar 0,7.
- Pada tahun 2025 indikator kinerja Nilai PDRB Sektor Perdagangan dengan realisasi capaian kinerja sesuai RPJMD sebesar 1,83 dan realisasi capaian kinerja Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan dengan realisasi capaian kinerja 1,82.
- Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar dengan target sebesar 41,88 dengan terget berdasarkan RPJMD sebesar 53,78 mendapatkan Capaian Kinerja sebesar 0,8. Lalu untuk Persentase SPM Capaian Perumahan dengan realisasi 70 dan target RPJMD sebesar 100 mendapatkan hasil Capaian Kinerja sebesar 0,7. Untuk Persentae Penanganan Kawasan Kumuh dengan realisasi sebesar 0 dan target 40 mendapatkan hasil Capaian 0. Sedangkan untuk Persentase Kesesuaian dan Pemanfaatan Ruang dengan realisasi sebesar 94,12 dan target berasarkan RPJMD sebesar 40 mendapatkan Capaian Kinerja sebesar 2,4.
- Tingkat capaian kinerja dibanding dengan target dalam Pembangunan Jangka Menengah mengalami mengalami stagnansi di indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2025 sebesar 1,0. Lalu untuk Indeks Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak

dapat dinilai karena tidak memiliki perbandingan didalam dokumen RPJMD.

9. Dari tabel pengukuran capaian kinerja yang sudah dipaparkan jika kita bandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) indeks ketahanan daerah target kinerja 2025 berdasarkan RPJMN sebesar 0,46, dengan realisasinya juga 0,46 maka capaian nya mengalami stagnansi di angka 1,00.
10. Pengukuran capaian kinerja pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan dengan membandingkan target kinerja tahunan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Pembangunan Jangka Menengah serta standar penilaian yang ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, target Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2026 ditetapkan sebesar 74,36. Sementara itu, target kinerja tahunan yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebesar 67,84. Namun demikian, hingga saat penyusunan laporan ini dilakukan, realisasi atau capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 belum dapat diketahui karena hasil evaluasi dan penilaian dari Kementerian PANRB belum diterbitkan. Oleh karena itu, tingkat capaian kinerja sampai dengan Tahun 2025 belum dapat diukur maupun dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen pembangunan jangka menengah maupun standar nasional. Nilai capaian kinerja tersebut akan diperbarui setelah hasil evaluasi resmi dari Kementerian PANRB diterima.

Pengukuran capaian kinerja pada indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah dilakukan dengan membandingkan target kinerja tahunan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen pembangunan jangka menengah daerah serta standar penilaian yang ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, target Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada Tahun 2026 ditetapkan sebesar 65,58, yang menunjukkan arah peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah secara bertahap. Sementara itu, target kinerja tahunan yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 62,95. Namun hingga saat penyusunan laporan ini dilakukan, realisasi atau capaian kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2025 belum dapat diketahui, karena hasil evaluasi dan penilaian dari Kementerian PANRB belum diterbitkan. Oleh karena itu, tingkat capaian kinerja sampai dengan Tahun 2025 belum dapat diukur maupun dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen pembangunan jangka menengah maupun standar nasional. Nilai capaian tersebut akan disajikan setelah hasil evaluasi resmi dari Kementerian PANRB diterima.

Sedangkan Pada Tahun 2025, Bagian Organisasi menetapkan target kinerja indikator Indeks Pelayanan Publik sebesar 3,88. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan, realisasi capaian kinerja tahun 2025 mencapai 3,36, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 0,82. Apabila dibandingkan dengan target kinerja berdasarkan RPJMD maka Capaian Kinerjanya berada di angka 0,82. Adanya kesenjangan ini menunjukkan bahwa perlu segera adanya tindak lanjut melalui langkah-langkah perbaikan yang lebih terstruktur dan sistematis.

11. Indikator Persentase capaian kinerja keuangan dan barang milik daerah Target Indikator capaian kinerja keuangan dan barang milik daerah pada RPD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 – 2026 yaitu 100%. Realisasi sampai tahun 2025 sebesar 82,51% dengan indikator capaian kinerjanya sebesar 0,82

Sedangkan Indikator kinerja Rasio PAD terhadap pendapatan daerah Target Indikator Rasio PAD terhadap pendapatan daerah pada RPD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 – 2026 yaitu 5,0%, Realisasi sampai pada tahun 2025 mencapai 5,76% atau capaian kinerja sebesar 1,15.

12. Monitoring evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Nilai Maturitas SPIP Tahun 2025 jika dilihat dari targetnya (sesuai RPJMD) sebesar 8 namun pada realisasinya hanya menyentuh angka 2 sehingga capaian kinerjanya hanya menyentuh angka 0,25
13. Berdasarkan realisasi dari Indeks Predikat Penilaian SPBE yang menyentuh angka 2,64 dengan target yang ditetapkan di RPJMD sebesar 2,75 maka dapat dikalkulasikan bahwa capaian kinerja dari Indeks Predikat SPBE berada di angka 0,96.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

No	Indikator	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi
	2	3	4	5 (3/4)*100%
1	DINAS PPO (BELUM)			
2	Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial	101%	100%	1,01
	Persentase PSKS yang Berperan Aktif	561%	100%	5,61
3	Usia Harapan Hidup	106%	90,94%	1,16
	Prevelensi Stunting	105%	90,94%	1,15
4	Indeks Pemberdayaan Gender	86,90%	99,92	0,86
5	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	68%	85,4%	0,79
6	Nilai PDRB Sektor Pengolahan	193%	99%	1,94
	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	194%	98%	1,97
7	Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar	73%	92,59%	0,79
	Persentase Capaian SPM Perumahan	70%	-	-
	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	0%	-	-
	Persentase Kesesuaian Dan Ketaatan Pemanfaatan Ruang	235%	99,13%	2,37
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	92%	91,57%	1,00
	Persentase Pengelolaan Lingkungan Hidup	36%	91,57%	0,39
9	Indeks Ketahanan Daerah	92%	100%	0,92
10	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	98,78	N/A
	Nilai SAKIP IPemerintah Daerah	N/A	99,92	N/A
	Indeks Pelayanan Publik	86%	99,05%	0,86
11	Persentase Capaian Kinerja Keuangan dan Barang Milik Daerah	82%	93,87%	0,87
	Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah dalam APBD	128%	93,12	1,37
12	Nilai Maturitas SPIP	66%	100%	0,66
13	Indeks dan Predikat Penilaian	98%	93%	1,05

	SPBE			
--	------	--	--	--

Note Jika $x > 1$ berarti Efektif, Jika $x < 1$ berarti tidak Efektif, dan Jika $x = 1$ berarti Efektif berimbang
Tabel 3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Dinas PPO

Sampai saat LAKIP ini diunggah, dinas PPO belum mengunggah LAKIP mereka.
- Indikator PPKS yang Menerima Bantuan Sosial dengan Capaian Kinerja sebesar 101% dan Penyerapan Anggaran sebesar 100% memperoleh Tingkat Efisiensi yang Efektif dengan nilai 1,01.

Indikator PSKS yang Berperan Aktif dengan Capaian Kinerja sebesar 561% dan Penyerapan Anggaran sebesar 100% memperoleh Tingkat Efisiensi yang Efektif dengan nilai 5,61.
- Indikator Usia Harapan Hidup dengan Capaian Kinerja sebesar 106% dan Penyerapan Anggaran sebesar 90,94% memperoleh Tingkat Efisiensi Efektif dengan nilai 1,16

Indikator Prevelensi Stunting dengan Capaian Kinerja sebesar 105% dengan Penyerapan Anggaran 90,94% memperoleh Tingkat Efisiensi Efektif dengan nilai 1,15
- Pada indikator Indeks Pemberdayaan Gender capaian kinerja 86,90% dengan realisasi anggaran sebesar 99,92%, sehingga tingkat efisiensinya sebesar 0,86. Capaian ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada program pemberdayaan perempuan relatif efisien meskipun masih perlu diperlukan upaya peningkatan agar capaian indikator dapat lebih optimal.
- Indikator Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Capaian Kinerja sebesar 68% dan Penyerapan Anggaran sebesar 85,4% , memperoleh Tingkat Efisiensi Tidak Efektif dengan nilai 0,79.
- Nilai PDRB Sektor Pengolahan dengan Capaian Kinerja sebesar 193% dan Penyerapan Anggaran sebesar 99% , memperoleh Tingkat Efisiensi Efektif dengan nilai 1,94.

Indikator Nilai PDRB Sektor Perdagangan dengan Capaian Kinerja sebesar 194% dan Penyerapan Anggaran sebesar 98% , memperoleh Tingkat Efisiensi Efektif dengan nilai 1,97.
- Indikator Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar memiliki capaian kinerja sebesar 72% dengan penyerapan anggaran sebesar 92,59% memiliki tingkat efisiensi sebesar 0,79. Lalu untuk berikutnya Persentase Kesesuaian dan Pemanfaatan Ruang memiliki capaian 235% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,13% sehingga tingkat efisiensi sebesar 2,37.

Sedangkan Persentase Capaian SPM Perumahan, Persentase Penanganan Kawasan Kumuh tidak bisa diukur karena dalam LAKIP Dinas PUPR sebagai pengampu indikator ini hanya menjelaskan programnya, tanpa memberikan detail indikator dari setiap program.
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan Capaian Kinerja sebesar 92% dan Penyerapan Anggaran 91,57% memperoleh Tingkat Efisiensi yang berimbang di angka 1,00.
- Indikator Indeks Ketahanan Daerah dengan Capaian Kinerja sebesar 92% dan Penyerapan Anggaran sebesar 100% , memperoleh Tingkat Efisiensi Tidak Efektif dengan nilai 0,92.
- Indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP Pemerintah Daerah belum bisa diukur Tingkat Efisiensinya dikarenakan belum adanya hasil penilaian dari MenpanRB untuk kedua indikator ini.

Sedangkan untuk Indeks Pelayanan Publik dengan Capaian Kinerja sebesar 86% dan Penyerapan Anggaran sebesar 99,05% , memperoleh Tingkat Efisiensi Tidak Efektif dengan nilai 0,86.
- Persentase Capaian Kinerja Keuangan dan Barang Milik Daerah dengan Capaian Kinerja sebesar 82% dan Penyerapan Anggaran sebesar 93,87% , memperoleh Tingkat Efisiensi Tidak Efektif dengan nilai 0,87.

Persentase Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah dalam APBD dengan Capaian Kinerja sebesar 128% dan Penyerapan Anggaran sebesar 93,12% , memperoleh Tingkat

- Efisiensi Efektif dengan nilai 1,37.
12. Nilai Maturitas SPIP dengan Capaian Kinerja sebesar 66% dengan Penyerapan Anggaran 100% memperoleh Tingkat Efisiensi Tidak Efektif dengan nilai 0,66.
13. Indeks dan Predikat Penilaian SPBE dengan capaian kinerja 98% dan Penyerapan Anggaran sebesar 93% memperoleh nilai sebesar 1,05.
6. Analisis Program yang Mendukung Capain Target Kinerja dan Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Program		
			Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Dinas PPO							
2	Meningkatnya Layanan Sosial Dasar Kepada PPKS	Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial	80	81,54	1,01 (101%)	Rp. 34.050 .000	Rp. 34.050.00 0	100%
		Persentase PSKS yang Berperan Aktif	7	39,27	5,61 (561%)	Rp. 36.491 .000	RP. 36.491.00 0	100%
3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	69,08	73,19	1,06 (106%)	Rp. 135.34	Rp. 123.082.6	90,94%
		Prevelensi Stunting	8	8,4	1,05 (105%)	4.585. 084	42.382	
4	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	55	47,8	0,86 (86%)	Rp. 40.997 .000	Rp. 40.997.00 0	100%
5	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	1,8	1,24	0,68 (68%)	Rp. 2.547. 913.09 0	Rp. 2.174.635 .060	83,40%
6	Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Perindustrian	Nilai PDRB Sektor Pengolahan	12,519 M	24,200M	1,93 (193%)	Rp 647.86 6.200	Rp.645.06 6.520	99,50%
		Nilai PDRB Sektor Perdagangan	311,37 6M	607,016M	1,94 (194%)	Rp. 338.22 6.300	Rp. 332.943.6 10	98,44%

7	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Infrastruktur	57,03	41,88	0,73 (73%)	Rp. 5.804.781.655 (Irigasi)	Rp. 5.321.080.686	91,67
						Rp. 9.848.630.268 (SPAM)	Rp. 9.052.863.577	91,92
						Rp. 7.440.175.000 (Sanitasi)	Rp. 7.117.734.040	95,67
						Rp. 41.970.199.605 (Jalan)	Rp. 38.229.115.415	91,09
	Meningkatkan SPM Bidang Perumahan	Persentase Capaian SPM Perumahan	100	70	0,70 (70%)	-	-	-
8	Meningkatkan Penanganan Kawasan Kumuh	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	13	0	0 (0%)	-	-	-
	Meningkatkan Kesesuaian dan Ketaatan Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian dan Ketaatan Pemanfaatan Ruang	40	94,12	2,35 (235%)	Rp. 591.885.000	Rp. 586.717.462	99,13
8	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82,91	76,51	0,92 (92%)	Rp. 3.245.403.935	Rp. 2.971.891.893	91,57%
		Persentase Pengelolaan Lingkungan Hidup	54,90	20,14	0,36 (36%)			
9	Meningkatnya Kesiagaan Terhadap Resiko Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,5	0,46	0,92 (92%)	Rp. 686.063.000	Rp. 672.533.431	98%
10	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	67,84	Belum Dapat Dinilai	N/A	Rp. 39.574.400	Rp. 39.091.800	98,78%
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	62,95	Belum Dapat Dinilai	N/A	Rp. 14.107.000	Rp. 14.097.000	99,92%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,88	3,36	0,86 (86%)	Rp. 21.672.000	Rp. 21.467.200	99,05%

	Publik							
11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Efektivitas Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan dan Barang Milik Daerah	100	82,51	0,82 (82%)	Rp. 213,00 9,202, 010	Rp. 199,951,9 95,357	93,87%
		Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah dalam APBD	4,5	5,76	1,28 (128%)	Rp. 842,10 0,830	Rp. 784,185,4 92	93,12%
12	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Efektivitas Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP	3	2	0,66 (66%)	Rp. 67.732 .000	Rp. 67.732.00 0	100%
13	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi	Indeks dan Predikat Penilaian SPBE	2,68	2,64	0,98 (98%)	Rp. 215.17 8.000	Rp. 200.851.8 75	93%

Tabel 3.6. Anali

Tabel 3.6. Program yang Mendukung Capaian Kinerja

Berdasarkan data yang sudah disajikan diatas dapat ditarik suatu penjelasan yakni sebagai berikut :

1. Dinas PPO
Sampai saat LAKIP ini diunggah, dinas PPO belum menunggah LAKIP mereka.
2. Pada sasaran kedua yakni Meningkatnya Layanan Dasar Kepada PPKS terdapat 2 indikator yaitu : (1) Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial dan (2) Persentase PSKS yang Berperan Aktif. Pada indikator pertama Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial dengan target sebesar 80% dan realisasinya sebesar 81,54% dengan capaian sebesar 1,01 atau jika dipersentasekan menjadi 101% . Indikator ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.34.050.000 dengan capaian sebesar 100% atau berjumlah Rp. 34.050.000. Sedangkan pada indikator kedua Persentase PSKS yang Berperan Aktif memiliki target sebesar 7% dan realisasinya sebesar 39,27% dengan capaian 5,61 atau jika 561%. Indikator ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 36.491.000 dengan capaiannya 100% atau berjumlah Rp. 36.491.000.
3. Sasaran ketiga yakni Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat memiliki 2 indikator yaitu : (1) Usia Harapan Hidup dan (2) Prevelensi Stunting. Pada indikator pertama Usia Harapan Hidup dengan target 69,08% dengan realisasi sebesar 73,19% dan capaian sebesar 1,06 atau 106%. Sedangkan pada indikator kedua Prevelensi Stunting memiliki target 8% dengan realisasi 8,6% memiliki capaian sebesar 1,05 atau 105%. Kedua indikator ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 135.344.585.084 dengan capaian sebesar 90,94% atau berjumlah Rp. 123.082.642.382.
4. Sasaran keempat yakni Meningkatnya Ksetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 1 indikator yakni Indeks Pemberdayaan Gender yang memiliki

target sebesar 55% dan realisasinya sebesar 47,8% dengan capaian sebesar 0,86 atau 86%. Indikator ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 40.997.000 dengan capaian 100 % atau berjumlah Rp. 40.997.000.

5. Sasaran kelima yakni Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki 1 indikator Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target sebesar 1,8% dengan capaian 0,68 atau 68% atau dengan persentase realisasinya sebesar 1,24%. Indikator ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 2.547.913.090 dengan capaian sebesar 83,40% atau sebesar Rp. 2.174.635.060
6. Sasaran keenam yakni Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Perindustrian memiliki 2 indikator yakni : (1) Nilai PDRB Sektor Pengolahan dan (2) Nilai PDRB Sektor Perdagangan. Pada indikator pertama Nilai PDRB Sektor Pengolahan memiliki target 12,52M dengan realisasi 24,20M dengan total capaian 1,93 atau 193%. Indikator ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 647.866.200 dengan capaian sebesar 99,50% atau realisasinya sebesar Rp.645.066.520.

Sedangkan pada indikator kedua Nilai PDRB Sektor Perdagangan memiliki target 311,38M dengan realisasinya sebesar Rp. 607,02M dengan realisasinya capaian nya sebesar 1,94 atau 194%. Indikator ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 338.226.300 dengan realisasinya sebesar Rp. Rp. 332.943.610 dengan capaian 98,44%.

7. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar . Indikator: Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar Pada tahun 2025, realisasi Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar tercatat sebesar 57,03 dari target yang ditetapkan sebesar 41,88, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 73,44%. Capaian ini didukung oleh pelaksanaan empat program utama dengan rincian penyerapan anggaran sebagai berikut:

- a. Program Irigasi

Program Irigasi memiliki pagu anggaran sebesar Rp5.804.781.655 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp5.321.080.686 atau setara 91,67%. Tingkat penyerapan yang tinggi ini mencerminkan pelaksanaan program irigasi yang berjalan lancar dan tertib administrasi. Optimalisasi jaringan irigasi yang dibiayai melalui program ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan indeks kualitas infrastruktur dasar, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air bagi masyarakat pertanian.

- b. Program SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)

Program SPAM dialokasikan dengan pagu anggaran terbesar kedua yakni Rp9.848.630.268 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp9.052.863.577 atau 91,92%. Capaian penyerapan yang mendekati 92% ini menunjukkan keseriusan dalam pelaksanaan program penyediaan air minum bagi masyarakat. Peningkatan akses air minum yang aman dan layak merupakan komponen penting dalam pembentukan indeks kualitas infrastruktur dasar.

- c. Program Sanitasi

Program Sanitasi memiliki pagu anggaran sebesar Rp7.440.175.500 dengan realisasi sebesar Rp7.117.734.040 atau 95,67% — merupakan tingkat penyerapan tertinggi di antara keempat program infrastruktur. Hal ini mengindikasikan bahwa program sanitasi dilaksanakan dengan sangat efektif dari sisi pemanfaatan anggaran. Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan indeks infrastruktur dasar secara keseluruhan.

d. Program Jalan

Program Jalan memiliki pagu anggaran terbesar yakni Rp41.970.199.605 dengan realisasi sebesar Rp38.229.115.415 atau 91,09%. Sebagai program dengan porsi anggaran paling dominan, pembangunan dan pemeliharaan jalan menjadi tulang punggung peningkatan konektivitas wilayah. Meski penyerapan sedikit lebih rendah dibandingkan program sanitasi, realisasi yang melampaui 91% tetap menunjukkan kinerja pelaksanaan yang baik.

Sasaran: Meningkatkan Kesesuaian dan Ketaatan Pemanfaatan Ruang, Indikator: Persentase Kesesuaian dan Ketaatan Pemanfaatan Ruang

Indikator ini mencatat realisasi sebesar 45,51% dari target tahun 2025 sebesar 40%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 113,78% — melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian ini didukung oleh program pengendalian pemanfaatan ruang dengan pagu anggaran sebesar Rp591.885.000 yang terealisasi sebesar Rp586.717.462 atau 99,13%. Kombinasi antara capaian kinerja yang melampaui target (113,78%) dan penyerapan anggaran yang hampir sempurna (99,13%) menunjukkan bahwa program penataan ruang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Keberhasilan ini mencerminkan semakin baiknya upaya pengendalian, pengawasan, dan penegakan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Capaian di atas target ini menjadi prestasi yang patut dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun berikutnya.

Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Sasaran: Meningkatkan Persentase Permukiman Layak Huni, Indikator: Persentase Capaian SPM Perumahan

Target capaian SPM Perumahan ditetapkan sebesar 100% pada tahun 2025. Namun demikian, data realisasi capaian kinerja maupun data pagu dan realisasi anggaran untuk indikator ini seluruhnya tidak tersedia (-), sehingga analisis efisiensi tidak dapat dilakukan. Ketiadaan data ini merupakan permasalahan serius yang perlu segera ditangani. Tanpa data realisasi, tidak dapat diketahui sejauh mana pemenuhan hak dasar masyarakat atas hunian yang layak telah terpenuhi. Diperlukan perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih tertib agar akuntabilitas program perumahan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Indikator: Penanganan Kawasan Kumuh. Target penanganan kawasan kumuh tahun 2025 ditetapkan sebesar 13,00%. Sama halnya dengan indikator SPM Perumahan, data realisasi kinerja, pagu, maupun realisasi anggaran tidak tersedia (-), sehingga evaluasi efisiensi tidak dapat dilaksanakan. Penanganan kawasan kumuh merupakan salah satu prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Ketiadaan data realisasi bukan hanya menghambat proses evaluasi, tetapi juga berpotensi memengaruhi perencanaan anggaran dan program pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pencatatan data dan pelaporan kinerja pada bidang perumahan dan kawasan permukiman menjadi hal yang sangat mendesak untuk segera dilakukan.

8. Indikator kedelapan Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan 2 indikatornya yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persentase Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada indikator pertama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup memiliki target 82,91% dengan realisasi 76,51 dan capaian kerjanya sebesar 0,92 atau 92%. Sedangkan untuk indikator kedua Persentase Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki target 54,90% dengan realisasi sebesar

20,14% dan capaiannya sebesar 0,36 atau 36%. Kedua indikator ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 3.245.403.935 dengan capaian sebesar 91,57% atau jika diuangkan sebesar Rp. 2.971.891.893.

9. Indikator kesembilan yaitu Meningkatnya Kesiagaan Terhadap Resiko Bencana dengan satu indikator nya yaitu Indeks Ketahanan Daerah dengan target sebesar 0,5 dan realisasi sebesar 0,46 dan capaiannya sebesar 0,92 atau 92%. Indikator ini memiliki pagu anggara sebesar Rp. 686.063.000 dan capaiannya sebesar 98% atau jika dirupiahkan menjadi Rp. 672. 533.43.
10. Sasaran berikutnya yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Pada sasaran pertama Meningkatnya Akntabilitas Kinerja Pemerintahan terdapat 2 indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP Pemerintah Daerah. Untuk Indeks Reformasi Birokrasi memiliki target 67,84 namun untuk realisasinya belum dapat dinilai hal ini disebabkan karena tim penilai dari KEMENPANRB belum memberikan evaluasi serta nilai untuk indikator ini. Untuk inidkator ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 39.574.400 dengan capaian 98,78% atau realisasinya sebesar Rp. 39.091.800. Lalu indikator berikutnya yaitu Nilai SAKIP Pemerintah Daerah memiliki target sebesar 62,95% , namun untuk realisasinya belum dapat dinilai lagi-lagi karena belum adanya penilaian yang diberikan oleh evaluator dari KEMENPANRB. Untuk target dari indikator ini sebesar Rp. 14.107.000 dan capaiannya sebesar 99,2% atau jika dirupiahkan sebesar Rp. 14.097.000.

Sedangkan sasaran berikutnya Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik memiliki memiliki target sebesar 3,88 dan realisasinya sebesar 3,36 dengan capaian sbesar 0,86 atau 86%. Indikator ini sendiri memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 21.672.000 dengan capaian 99,05% atau sebesar Rp. 21.467.200.

11. Sasaran berikutnya yakni Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Efektivitas Pemerintah Daerah. Sasaran ini memiliki 2 indikator yakni : (1) Persentase Capaian Kinerja Keuangan dan Barang Milik Daerah dan (2) Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah dalam APBD. Dalam indikator pertama Persentase Capaian Keuangan dan Barang Milik Daerah memiliki target sebesar 100% dengan realisasi 82,51% dengan capaian sebesar 0,82 atau 82%, lalu untuk pagu anggarannya sendiri sebesar Rp. 213,009,202,010 dengan capaian sebesar 93,87% atau Rp. 199,951,995,357.

Untuk indikator berikutnya Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah dalam APBD memiliki target sebesar 4,5 % dengan realisasi sebesar 5,76 dengan capaiannya 1,28 atau 128%. Lalu untuk pagu anggaran indikator ini sebesar Rp. 842,100,830 dengan realisasi sebesar 93,12% atau sebesar Rp. 784,185,492.

12. Sasaran berikutnya Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Efektivitas Pemerintahan Daerah dengan indikatornya Nilai Maturitas SPIP memiliki target sebesar 3 dan realisasinya 2 sehingga dari target dan realisasi tersebut capaian kinerja nya sebesar 0,66 atau 66%. Pagu anggaran untuk indikator ini sebesar Rp. 67.732.000 dengan capaian sebesar 100% atau berada dikisaran Rp. 67.732.000.
13. Sasaran terakhir yakni Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi yang memiliki indikator yakni Indeks Predikat dan Penilaian SPBE memiliki target sebesar 2,68 dan realisasi nya sebesar 2,64 serta capaian kinerjanya berada di kisaran 0,98 atau 98%. Indikator ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 215.178.000 dengan capaian 93% atau sekitar Rp. 200.851.875

B. Realisasi Anggaran

- 1. Dinas PPO
Sampai saat LAKIP ini diunggah dinas PPO belum mengunggah LAKIP sama sekali
- 2. Dinas Sosial

Alokasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 adalah Rp.3.837.223.557,- dengan realisasi sebesar Rp 3.576.667.420,- atau 93,21%. Rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.5. berikut:

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.2.603.630.857	2.344.335.987	90
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 20.940.000	20.940.000	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.2.382.154.497	2.122.859.627	89
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 119.062.360	119.062.360	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 10.895.000	10.895.000	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.339.000	4.339.000	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 66.240.000	66.240.000	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 36.491.000	36.491.000	100
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 36.491.000	36.491.000	100
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp. 4.500.000	3.300.000	73
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Rp. 4.500.000	3.300.000	73
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 682.956.300	682.956.300	100
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 671.761.800	671.761.800	100
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp. 11.194.500	11.194.500	100
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 34.050.000	34.050.000	100
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 34.050.000	34.050.000	100
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 475.595.400	475.534.133	99,9
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp. 475.595.000	475.533.733	99,9
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 400	400	100
Total	Rp.3.837.223.557	3.576.667.420	93,21

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Program Dinas Sosial

3. Dinas Kesehatan

NO	PROGRAM	PAGU (RP)	REALISASI KINERJA (RP)	PERSENTASE PENCAPAIAN (%)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	97.958.210.581	85.640.193.145	87,43
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	124.258.736.486	113.278.444.154	91,16
C	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	10.068.523.254	8.857.923.522	87,98
D	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	586.115.000	570.361.440	97,31
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	431.210.344	375.913.267	87,18
Total		233.302.795.665	208.722.835.528	89,46

Tabel 3.8

Realisasi Anggaran Program Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur memiliki 5 program, terdiri dari 1 program urusan penunjang dan 4 program urusan wajib, yang dalam mewujudkan IKU Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Timur, 4 program urusan wajib ini memiliki peran inti. Berdasarkan di atas, diketahui bahwa total pagu anggaran yang dipilih untuk pelaksanaan seluruh program sebesar Rp233.302.795.665, dengan realisasi anggaran sebesar Rp208.722.835.528 atau mencapai 89,46% dari total anggaran yang tersedia. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dengan tingkat penyerapan anggaran yang relatif tinggi. Meskipun demikian, masih terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar 10,54%, yang dapat disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan kegiatan, penyesuaian kebutuhan anggaran, serta adanya kegiatan yang tidak terlaksana secara penuh. Jika ditinjau berdasarkan masing-masing program, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan program dengan alokasi anggaran terbesar, yaitu Rp124.258.736.486 dengan realisasi sebesar Rp113.278.444.154 atau 91,16%. Tingginya realisasi anggaran pada program ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Program dengan alokasi anggaran terbesar berikutnya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp97.958.210.581 dan realisasi sebesar Rp85.640.193.145 atau 87,43%. Persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan penyelenggaraan administrasi, perencanaan, pengelolaan keuangan, serta operasional perangkat daerah telah terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian kecil anggaran yang tidak terserap yang kemungkinan disebabkan oleh efisiensi belanja operasional maupun adanya kegiatan yang tidak terlaksana secara optimal.

Selanjutnya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan memiliki pagu anggaran sebesar Rp10.068.523.254 dengan realisasi sebesar Rp8.857.923.522 atau 87,98%. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan seperti pelatihan, bimbingan teknis, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia kesehatan telah terlaksana dengan cukup baik, meskipun masih terdapat sebagian kecil anggaran yang tidak terserap. Sedangkan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman memiliki pagu anggaran sebesar Rp586.115.000 dengan realisasi sebesar Rp570.361.440 atau 97,31%, yang merupakan tingkat penyerapan anggaran tertinggi di antara seluruh program. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan pendistribusian sediaan farmasi serta alat kesehatan dapat dilaksanakan secara optimal sehingga hampir seluruh anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efektif.

Sementara itu, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan memiliki pagu anggaran sebesar Rp431.210.344 dengan realisasi sebesar Rp375.913.267 atau 87,18%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan seperti peningkatan peran serta masyarakat, promosi kesehatan, dan penguatan kegiatan berbasis masyarakat telah terlaksana dengan baik, meskipun masih terdapat sebagian kecil anggaran yang tidak terserap.

Secara keseluruhan realisasi anggaran program pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang cukup baik dengan tingkat penyerapan mencapai 89,46% . Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2025	TOTAL REALISASI	
			KEUANGAN 2025	
			RP	%
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		40.977.000	40.977.000	100,00
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		22.847.000	22.847.000	100,00
-	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	22.847.000	22.847.000	100,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		18.130.000	18.130.000	100,00
-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.130.000	18.130.000	100,00

Tabel 3.9
Realisasi Angggaran Program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Berdasarkan tabel yang sudah dilampirkan diatas Indikator Indeks Pemberdayaan Gender memiliki 1 program kerja utama yakni Program Pengarusutaaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan total anggaran sebesar Rp. 40.997.000 dengan persentase capaian juga 100%. Program ini terbagi menjadi 2 kegiatan yakni Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Msyarakat Kabupaten/Kota dan Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSANTASE PENCAPAIAN (%)
A.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.841.272.590,00	1.478.747.178,00	80,31
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.735.000,00	17.705.000,00	99,83
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.235.000,00	12.205.000,00	99,75
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000,00	500.000,00	100
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000,00	500.000,00	100
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000,00	500.000,00	100
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	500.000,00	500.000,00	100
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	100
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	100
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.674.272.690,00	1.311.897.061,00	78,36
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.573.385.290,00	1.227153.487,00	77,59
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	98.287.400,00	82.143.574,00	83,57
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300.000,00	300.000,00	100

4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	500.000,00	500.000,00	100	2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	500.000,00	500.000,00	100
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000,00	500.000,00	100	3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	500.000,00	500.000,00	100
6.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	300.000,00	300.000,00	100	4.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	600.000,00	600.000,00	100
7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	500.000,00	500.000,00	100	5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.360.900,00	70.252.700,00	99,85
8.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	500.000,00	500.000,00	100	1.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.045.300,00	25.045.300,00	100
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	100	2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.007.600,00	6.007.600,00	100
1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	300.000,00	300.000,00	100	3.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.020.000,00	9.020.000,00	100
2.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	300.000,00	300.000,00	100	4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.140.000,00	29.033.800,00	100
3.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	300.000,00	300.000,00	100	5.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500.000,00	500.000,00	100
4.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	300.000,00	300.000,00	100	6.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	648.000,00	648.000,00	100
5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	300.000,00	300.000,00	100	6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.624.000,00	12.624.000,00	100
6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	300.000,00	300.000,00	100	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.002.000,00	2.002.000,00	99,88
4.	Administrasi Kepegawaian				2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.884.000,00	7.884.000,00	100
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.380.000,00	62.368.417,00	99,98		Penyediaan Jasa Pemeliharaan			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.340.000,00	61.328.417,00	99,98	3.	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	1.000.000,00	1.000.000,00	100
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.040.000,00	1.040.000,00	100	4.	Perluasan Kesempatan Kerja	1.000.000,00	1.000.000,00	100
B.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	512.909.500,00	507.633.455,00	98,97	2.	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.070.000,00	11.910.000,00	98,67
1.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	499.874.500,00	494.628.455,00	98,96	1.	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	1.000.000,00	1.000.000,00	100
1.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	491.005.000,00	485.883.955,00	98,96	2.	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	11.070.000,00	10.910.000,00	98,55
2.	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	8.869.500,00	8.744.500,00	98,59	3.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	20.416.500,00	20.316.500,00	99,51
2.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	13.035.000,00	13.005.000,00	99,77	1.	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	648.000,00	648.000,00	100
3.	Pembinaan Lembaga Pelatihan	12.005.000,00	12.005.000,00	100,00	2.	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	2.000.000,00	2.000.000,00	100
					3.	Job Fair/Bursa Kerja	17.768.500,00	17.668.500,00	99,44
						Pelindungan PMI (Pra dan Purna			

1.	<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	54.090.000,00	52.240.000,00	96,58
1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	33.860.000,00	32.175.000,00	95,02
2.	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	1.500.000,00	1.500.000,00	100
3.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	18.730.000,00	18.565.000,00	99,12
2.	<i>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	19.035.000,00	18.154.627,00	95,37
1.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.035.000,00	16.154.627,00	94,83
2.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	100
E.	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	46.782.500,00	44.826.300,00	95,82
1.	<i>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</i>	46.782.500,00	44.826.300,00	95,82
1.	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	46.782.500,00	44.826.300,00	95,82
	TOTAL	2.547.913.090,00	2.174.635.060,00	85,35

Tabel 3.10
 Realisasi Anggaran Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Realisasi Anggaran Urusan Ketenagakerjaan

Pada urusan ketenagakerjaan telah dialokasi anggaran pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

- e. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan alokasi
Anggaran sebesar Rp. 512.909.500,00. Terealisasi sebesar Rp. 507.633.455,00 atau sebesar 98,97 persen. Dengan 2 kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 499.874.500,00. Terealisasi sebesar Rp. 494.628.455,00 atau sebesar 98,96 persen. Anggaran ini dimanfaatkan untuk melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi bagi Tenaga Kerja dengan jumlah peserta sebanyak 56 orang.
 - 2) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.035.000,00. Terealisasi sebesar Rp. 13.005.000,00 atau sebesar 99,97 persen. Anggaran ini dimanfaatkan untuk koordinasi dan monitoring kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja yang beroperasi di Kabupaten Manggarai Timur sejumlah 3 BLK.
- f. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 78.823.500,00. Terealisasi sebesar Rp. 73.033.500,00 atau sebesar 98,93 persen.
Dengan 4 kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.310.000,00. Terealisasi sebesar Rp. 27.780.000,00 atau sebesar 98,13 persen. Anggaran ini dimanfaatkan untuk memfasilitasi pelayanan antar kerja dan monitoring terhadap peserta pelatihan tenaga kerja untuk memastikan peserta pelatihan tenaga kerja sudah bekerja sejumlah 161 orang.
 - 2) Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.070.000,00. Terealisasi sebesar Rp. 11.910.000,00 atau sebesar 98,67 persen. Anggaran ini dimanfaatkan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Manggarai Timur sejumlah 4 LPTKS.
 - 3) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.416.500,00. Terealisasi sebesar Rp. 20.316.500,00 atau sebesar 99,51 persen. Anggaran ini dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan *Job Fair* di Kecamatan Borong dengan jumlah peserta sebanyak 10 orang dan yang mendapatkan pekerjaan sebanyak 2 orang.
 - 4) Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.027.000,00. Terealisasi sebesar Rp. 13.027.000,00 atau sebesar 100 persen. Anggaran ini dimanfaatkan Pelayanan Terpadu Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Asal Kabupaten Manggarai Timur sejumlah 17 orang.
- g. Program Hubungan Industrial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 73.125.000,00. Terealisasi sebesar Rp. 70.394.627,00 atau sebesar 96,27 persen. Dengan 2 kegiatan yang dilaksanakan yaitu
 - 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.090.000,00. Terealisasi sebesar Rp. 52.240.000,00 atau sebesar 96,58 persen. Anggaran ini dimanfaatkan untuk melaksanakan pendampingan dan pembinaan terhadap perusahaan – perusahaan agar dapat menerapkan tata kelola layak sejumlah 17 perusahaan.
 - 2) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.035.000,00. Terealisasi sebesar Rp. 18.154.627,00 atau sebesar 95,37 persen. Anggaran ini dimanfaatkan untuk melakukan mediasi penyelesaian kasus hubungan industrial sebanyak 3 (tiga)

kasus, dengan kasus hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama sebanyak 2 (dua) kasus.

6. Dinas Perdagangan , Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.582.865.681	2.383.040.409	96
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.634.400	18.564.400	99%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.739.000	5.684.000	99%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.015.000	3.000.000	99%,
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.880.400	9.880.400	100%,
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.333.881.218	2.145.888.633	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,	2.147.676.581	1.987.971.283	92%,
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN,	181.804.700	153.517.350	84%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD,	4.400.000	4.400.000	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	565.000	547.000	96%
	Penatausahaan Barang milik Daerah Pada SKPD,	565.000	547.000	96%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.446.000	118.300.750	98%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	2.000.000	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.096.000	18.016.000	100%
	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.500.000	3.491.000	100%
	Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	2.000.000	2.000.000	99%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.850.000	92.793.750	99%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.364.000	9.374.284	%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	988.000	988.000	100%
	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	9.376.000	6.386.284	68%
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	2.000.000	2.000.000	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	59.940.00	51.708.492	99%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	56.440.000	48.208.000.	85%
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan			
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3.500.000	3.500.000	100%
2	Program Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam	209.400	0	0%
	Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilaya Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	104.700	0	0%
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah	104.700	0	0%
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	104.700	0	0%
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabuaten/Kota	104.700	0	0%
3	Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	2.054.600	1.750.000	85%
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kab/Kota.	2.054.600	1.750.000	85%
	Penguatan tata Kelola Kelembagaan Koperasi	1.474.700	1.290.000	87%
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten Kota	579.900	460.000	79%
4	Program Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	2.224.400	1.855.000	83%
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.224.400	1.855.000	83%
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota,	2.149.600	1.855.000	86%
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Resiko Kinerja Keuangan dan Permodalan	74.000	0	0%
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	84.796.100	80.215.000	95%
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	84.796.100	80.215.000	95%S
	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	72.000.000	71.635.000	99%
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	12.796.100	8.580.000	67%
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	679.454.000	676.537.075	%,
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	679.050.200	676.255.575	99%,
	Koordinasi dan Sikronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	204.000	126.500	62%
7	Program Pengembangan UKM	34.800	0	%
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	34.800	0	%,
	Pengembangan Usaha Mikro	34.800	0	%,
8	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	2.020.000	2.010.000	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Swalayan	810.000	800.000	98%
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perijinan Terintegrasi	810.000	800.000	98%
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjualan Langsung Minum di Tempat	1.210.000	1.210.000	100%
	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	1.210.000	1.210.000	100%
	Pengendalian Fasilitasi Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten.Kota	0	0	0
	Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	0	0	0
9	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	315.679.800	311.997.610	99%
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	315.679.800	311.997.610	99%
	Penyediann Sarana Distribusi Perdagangan	306.532.800	303.912.610	99%
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9.165.000	8.085.000	88%

11	Program Pengembangan Ekspor	2.625.000	2.376.500	91%
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.625.000	2.376.500	91%
	Pameran dagang Lokal	2.625.000	2.376.000	90%
12	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	910.000	900.000	99%
	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera-Tera Ulang, dan Pengawasan	910.000	900.000	99%
	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang,	910.000	900.000	99%
13	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	467.700	339.500	73,06%
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	467.700	339.500	73,06%
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	409,800	339,500	88,19%
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	54,900	0	0
14	Program Perencanaan dan pembangunan Industri	466,556,200	464.183.520	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.	466,556,200	464,183,520	99,49%
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	300,000,000	298,503,020	99,50%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	820,000	737,500	89,94%
	Koordinasi , Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	93,000		99,58%
	Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	165,643,200	164,943,000	84%
15	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	540,000	300,500	55,65%
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	540,000	300,500	55,65%
	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan terhadap perizinan berusaha sector perindustrian yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	540,000	300,500	55,65%
16	Program Pengelolaan system Informasi Industri Nasional	180,770,000	180.582.500	99,90%
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	180,770,000	180,582,500	99,90%
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas	300,000	232,500	77,50%
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	180,470,000	180,350,000	99,93%

Tabel 3.11

Realisasi Anggaran Program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah

Sasaran Indikator Utama Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Tahun 2025, Indikator kinerja Turunan Dinas Perdagangan, Koperasi UKM sebagai berikut :

- a. Urusan Wajib (Koperasi dan UKM)
- Sasaran utamanya adalah: Meningkatnya Sektor UMK dan Koperasi. Program kegiatan yang mendukung sasaran :
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Kegiatan Ini membawahi sub kegiatan :
 - ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dialokasikan anggaran Rp.5.739.000,- dan realisasi Rp. 5.684.000 atau 99% yang digunakan untuk belanja penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah berupa Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja dan Renstra Tahun Anggaran 2025 -2029)
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dialokasikan anggaran Rp. 3.015.000,- dan realisasi Rp.3.000.000,- atau 99%, digunakan untuk belanja penyusunan Dokumen LAKIP, LKPJ dan LPPD
 - ✓ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dialokasikan anggaran Rp.9.880.400,- dan realisasi Rp. 9.880.400,- atau 100%, digunakan untuk belanja ATK, penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan I,2,3 dan 4 serta belanja monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan ini membawahi Sub Kegiatan :
 - ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dialokasikan anggaran Rp. 2.147.676.581,- dan realisasi Rp. 1.987.971.283,- atau 92%, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan
 - ✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dialokasikan anggaran Rp. 181.804.700,- dan realisasi Rp. 153.517.350,- atau 84%, digunakan untuk belanja honorarium pengelola keuangan (Pengguna Anggaran, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Belanja honorarium Tenaga Administrasi)
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, dialokasikan anggaran Rp. 4.400.000,- dan realisasi Rp 4.400.000,- atau 100%, digunakan untuk belanja ATK penyusunan laporan keuangan bulanan dan semesteran OPD. (Neraca. LRA dan Calk)
- Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.
Kegiatan ini membawahi sub kegiatan :
 - ✓ Penatausahaan Barang milik Daerah Pada SKPD, dialokasikan anggaran Rp. 565.000,- dan realisasi Rp. 547.000,- atau 96%, digunakan untuk Belanja ATK dan Belanja Perjalanan dinas dalam rangka pendataan asset Perangkat daerah.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan ini membawahi sub kegiatan :
 - ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dialokasikan anggaran Rp.2.000.000,- dan realisasi Rp. .2.000.000,- atau 100% digunakan untuk belanja komponen instalasi listrik selama 1 tahun
 - ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dialokasikan anggaran Rp. 18.096.000,- dan realisasi Rp. 18.016.000,- atau 99%, digunakan untuk belanja ATK kantor selama 1 tahun.
 - ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, di alokasikan anggaran Rp. 2.000.000,- dan realisasi Rp. 2.000.000,- atau 100% digunakan untuk belanja cetak dan ATK kantor.
 - ✓ Fasilitas Kunjungan Tamu, dialokasikan anggaran Rp. 3.500.000,- dan realisasi Rp 3.491.000,- atau 99%. digunakan untuk belanja makan dan minum kantor selama 1 tahun.
 - ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dialokasikan anggaran

Rp.92.850.000,- dan realisasi Rp. 92.793.750,- atau 99%, digunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi pelaksanaan tugas umum pemerintahan bidang Koperasi, UKM, Perdagangan dan perindustrian

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini membawa sub kegiatan :

- ✓ Pengadaan peralatan dan mesin lainnya, di alokasikan anggaran Rp. 39.035.000 ,- dan realisasi Rp. 38.656.850 atau 99%, digunkan untuk belanja pengadaan peralatan kantor dan mesin lainnya.

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini membawahi sub kegiatan :

- ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dialokasikan anggaran Rp. 988.000,- dan realisasi Rp. 988.000,- atau 100%,, digunakan untuk belanja meterai, biaya fotocopy dan amplop.
- ✓ Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya Air dan listrik, dialokasikan anggaran Rp. 9.376.000,- dan realisasi Rp. 6.386.284,- atau 68%, digunakan untuk belanja Air dan Listrik kantor selama 12 bulan.
- ✓ Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor, dialokasikan anggaran Rp. 2.000.000,- dan realisasi Rp. 2.000.000,- atau 100%, digunakan untuk belanja peralatan pembersih kantor

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini membawahi sub kegiatan :

- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Jabatan, dialokasikan anggaran Rp. 56.440.000,- dan realisasi Rp. 48.208.492.- atau 85%,- digunakan untuk belanja pemeliharaan kendaraan roda dua sebanyak 5 unit dan belanja pajak kendaraan dinas roda empat 1 unit
- ✓ Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dialokasikan anggaran Rp.3.500.000,- dan realisasi Rp. 3.500.000.- atau 100%,- digunakan untuk belanja pemeliharaan computer dan printer.

➤ Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Indikator Program:Presentasi Koperasi Simpan Pinjam Yang berkembang, target 55% dan realisasi 38,78% .

- Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota

Kegiatan ini membawahi sub kegiatan:

- ✓ Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam Pembukaan Kantor cabang, Cabang Pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota dialokasikan anggaran Rp.104.700,- dan realisasi Rp.0,- atau 0%.

- Penerbitan Izin Pembukaan kantor cabang Cabang Pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota.

Kegiatan ini membawai sub kegiatan :

- ✓ Fasilitasi pemenuhan izin Pembukaan Kantor cabang , Cabang Pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota dialokasikan anggaran Rp.104.700,- dan realisasi Rp.0,- atau 0%,

➤ Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi

Indikator Program : Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang Patuh dan Taat terhadap Peraturan, dengan target 76% dan realisasi 51,02%. Dengan kegiatan :

- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang

wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kab./Kota. Indikator Kegiatan : Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Yang Kontrol dan dikendalikan, dengan target 42 Koperasi dan realisasi 42 koperasi. Kegiatan ini membawahi sub kegiatan :

- ✓ Penguatan tata kelolah kelembagaan koperasi, dialokasikan anggaran Rp.1.474.700 dan realisasi Rp. 1.290.000,- atau 87%, digunakan untuk Belanja makan minum rapat bersama koperasi primer kabupaten dalam rangka penguatan tata kelolah kelembagaan koperasi di wilayah kabupaten Manggarai Timur
- ✓ Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dialokasikan anggaran Rp579.900,- dan realisasi Rp. 460.000,- atau 79%, digunakan untuk Belanja ATK, belanja kertas cover, belanja bahan computer, i dan belanja perjalanan dinas dalam rangka pengawasan koperasi dan pemeriksaan koperasi.

➤ Program Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi

Indikator Program : Persentase Koperasi Sehat, dengan target 80% dan realisasi 51,02%. Dengan kegiatan :

- Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Penilaian Koperasi, dengan target 3 Dokumen dan realisasi 3 Dokumen Kegiatan ini membawahi sub kegiatan :
 - ✓ Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenanga Kabupaten/Kota, dialokasikan anggaran Rp.2.149.600,- dan realisasi Rp.1.855.000,- atau 86%, digunakan untuk belanja ATK, belanja bertas dan cover, dan belanja perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan usaha koperasi simpan pinjam.
 - ✓ Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi tata kelolah, profil resiko, kinerja keuangan dan permodalan, dialokasikan anggaran Rp.74.800,- dan realisasi, Rp.0 atau 0%. Kegiatan ini tidak dilaksanakan

➤ Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Indikator Program:Presentase Pertumbuhan Omset Koperasi dengan target 65% dan realisasi 65%. Dengan kegiatan : Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota. Kegiatan ini membawahi sub kegiatan :

- ✓ Fasilitasi kemitraan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota dialokasikan anggaran Rp.72.000.000,- dan realisasi Rp.71.635.000,- atau 99%, digunakan untuk belanja pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan belanja akta. Notaris bagi Koperasi Desa Merah Putih untuk 17 Kelurahan di wilayah Kabupaten Manggarai Timur.
- ✓ Pemberdayaan Koperasi dengan keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota dialokasikan anggaran Rp.12.796.000,- dan realisasi Rp.8.580.000,- atau 67%, digunakan untuk belanja ATK dan Belanja perjalan dinas dalam daerah dalam rangka pemberdayaan Koperasi.

➤ Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Indikator Program : Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro, dengan target 20% dan realisasi 35%. Dengan kegiatan :

- Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan. Indikator kegiatan : Jumlah Usaha Menengah Kecil dan Mikro yang diberdayakan,

dengan target 55 UMKM dan Realisasi 9 UMKM. Kegiatan ini membawahi sub kegiatan :

- ✓ Fasilitasi kemudahan perizinan Usaha Mikro Dialokasikan anggaran Rp. 199.800,- dan realisasi Rp. 155.000 atau 77%, digunakan untuk belanja ATK dalam rangka faslitasi UMKM dalam pengurusan perizinan
- ✓ Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha, Dialokasikan anggaran Rp.679.050.200,- dan realisasi Rp.676.255.575 atau 99%, digunakan untuk Belanja ATK, cetak dan penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Prnguatan Kelembagaan UMKM dan belanja Bantuan/hibah mesin dan peralatan kepada pelaku UMKM.
- ✓ Penyusunan basis data Usaha mikro Dialokasikan anggaran Rp. 204.000,- dan realisasi Rp. 126.500 atau 70%, digunakan untuk belanja ATK dalam dalam rangka penyusunan basis data UMKM

➤ Program Pengembangan UKM

Indikator Program : Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha, dengan target 24% dan realisasi 25%. Dengan kegiatan :

- Pembembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil. Inidkator kegiatan :Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain danTeknologi, dengan target 25 UMKM dan realisasi 10 UMKM. Kegiatan ini membawahi sub kegiatan :
 - ✓ Pengembangan Usaha Mikro dialokasikan anggaran Rp.199.800,- dan realisasi Rp. 155.000,- atau 77%, digunakan untuk belanja ATK dalam rangka memfasilitasi UMKM dalam mengembangkan usaha. (Pengurusan Perizanan dan Pendaftaran UMKM dalam Aplikasi OSS)

b. Urusan Pilihan (Perdagangan)

Sasaran utamanya adalah:Meningkatnya Sektor Perdagangan Program dan kegiatan yang mendukung sasaran :

➤ Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Indikator Program : Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP PUSAT PERBELANJAAN DAN IUTM/IUTS/SIUP TOKO SWALAYAN), dengan target 15% dan realisasi 25%. Dengan Kegiatan :

- Penerbitan Izin Pengelolaan pasar rakyat, Pusat perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko swalayan.

Kegiatan ini membawahi sub kegiatan :

 - ✓ Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, Pusat perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko swalayan melalui system pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, dialokasikan anggaran Rp. 810.000,- dan realisasi 800.000, atau 99% digunakan untuk belanja ATK dalam rangka fasilitasi Usaha perdagangn dalam pengurusan perizinan.
- Penerbitan Surat Izin usaha perdagangan Minuman beralkohol Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung di tempat. Kegiatan ini membawahi sub kegiatan ✓ Fasilitasi Penerbitan Izin usaha perdagangan Minuman beralkohol Golongan B dan C dialokasikan anggaran Rp. 1.210.000,- dan realisasi 1.210.000, atau100% digunakan untuk belanja ATK dalam rangka fasilitasi pengurusan perizinan bagi pelaku usaha perdagangan Minuman beralkohol

➤ Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan

Indicator program: Persentase pedagang yang memanfaatkan sarana distribusi perdagangan, target 100% dan realisasi 100% Presentase Kinerja Realisasi Pupuk : target 5 % dan realisasi 15,67% Presentase pedagang yang memanfaatkan sarana distribusi perdagangan, dengan target 100% dan realisasi 100%. Dengan kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan ini membawahi sub kegiatan :

- ✓ Penyediaan sarana distribusi perdagangan dialokasikan anggaran Rp. 306.532.800,- dan realisasi Rp.303. 912. 610- atau 99%, digunakan untuk belanja pembanguanMCK Ruko elar dan Belanja Rehabilitasi pasar Rakyat Rana Loba
- ✓ Fasilitas Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, dialokasikan anggaran Rp. 9.165.00,- dan realisasi Rp.8.085.000,- atau 99%, digunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam rangka pendataan pedagang, penagihan retribusi pasar serta monitoring dan evaluasi pemanfaatan pasar rakyat.

➤ Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Indikator Program : Presentase Pertumbuhan harga sembako di pasar Manggarai Timur, dengan target 1,5% dan realisasi >3%, Dengan kegiatan :

- Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan : Rata -rata Presentase ketersediaan barang kebutuhan pokok setiap pasar daerah dalam kabupaten, dengan target 100% realisasi 50%. Kegiatan ini membawahi sub kegiatan :

- ✓ Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat Agen dan Pasar rakyat, dialokasikan anggaran Rp.6.069.800,- dan realisasi Rp.6.000.000, atau 98%, digunakan untuk Belanja perjalanan dinas dalam rangka pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok yang beredar di pasaran.
- Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan : Data Laporan Analisa Inflasi Harga Barang di Pasar Daerah, dengan target 4 laporan dan realisasi 2 laporan. Kegiatan ini membawahi sub kegiatan :

- ✓ Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu), dialokasikan anggaran Rp. 1.500.000,- dan realisasi Rp. 1.500.000,- atau 100%, digunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam rangka pemantau harga kebutuhan pokok di pasar Manggrai Timur
- ✓ Pelaksanaan Operasi Pasar, dialokasikan anggaran Rp. 8.865.0000,- dan realisasi Rp. 7.820.000,- atau 88%, digunakan untuk belanja Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan operasi pasar dalam wilayah Kabupaten Manggarai Timur
- Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, dengan target 4 laporan dan realisasi 2 laporan. Kegiatan ini membawahi sub kegiatan :

- ✓ Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi, dialokasikan anggaran Rp. 74.000,- dan realisasi Rp.0,- atau %, digunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam rangka pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk pestisida bersubsidi.

➤ Program Pengembangan Ekspor

Indikator : Pertumbuhan Ekspor Barang Dan Jasa, target 2%. Dengan kegiatan :

- Penyelenggaraan Promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah kab/kota

Kegiatan ini membawahi sub kegiatan :

- ✓ Pameran dagang local, dialokasikan anggaran Rp. 2.625.000,- dan realisasi Rp. 2.376.500,- atau 90%, digunakan untuk belanja Makan minum kegiatan pameran

➤ Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Indikator Program : Presentase Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan (UTTP) Bertanda Terasa Yang Berlaku, dengan target 20% dan realisasi 91%. Dengan kegiatan :

- Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera-Tera Ulang, dan Pengawasan.

Indikator Kegiatan : Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan perlengkapannya yang sesuai standar, dengan target 132 unit dan realisasi 100 unit dengan sub kegiatan :

- ✓ Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang, dialokasikan anggaran Rp.910.000,- dan realisasi Rp.900.000,- atau 97%, digunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam rangka pendataan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya.

➤ Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Indikator Program :Presentase Jenis Produk Olahan Lokal yang Terjual Melalui Media Daring, Presentase Pertumbuhan Produk Olahan Yang di Jual didalam Daerah, dengan target 5 % dan realisasi 4% Dengan kegiatan :

- Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Indicator kegiatan : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail,marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi, dengan target 10 UMKM dan realisasi 10 UMKM. Kegiatan ini membawahi sub kegiatan :

- ✓ Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri ditingkat Kab/Kota, dialokasi anggaran Rp. 409.800,- dan Realisasi Rp.339.500,-atau 80% digunakan untuk belanja promosi prodak UMKM melalui kegiatan Pameran Lokal.
- ✓ Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran Rp. 54.000 dan realisasi Rp. 0,- atau 0%,

c. Urusan Pilihan (Perindustrian)

Sasaran utamanya:Meningkatnya kinerja bidang perindustria Program dan kegiatan yang mendukung sasaran :

➤ Program Perencanaan dan pembangunan Industri

Indikator Program : Persentase Pertumbuhan Industri, dengan target 8% dan realisasi 15% Dengan kegiatan :

- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Industri, dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen. Kegiatan ini membawahi sub kegiatan :
 - ✓ Penyusunan Rencana Pembangunan Industri/Kab/Kota, dialokasikan anggran Rp.300.000.000,- dan realisasiI 298.503.020,- atau 99%, digunakan untuk belanja penyusunan dokumen kawasan Industri Kabupaten Manggarai Timur ✓ Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industry, dialokasikan anggran Rp. 820.000,- dan realisasi Rp.737.500,- atau 89%, digunakan untuk belanja ATK dan Makan minum rapat Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industry
 - ✓ Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri, dialokasikan anggran Rp. 93.000,- dan realisasi Rp.0,- atau 0%, digunakan

- untuk belanja ATK dan Makan minum rapat Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industry
- ✓ Koordinasi Singkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat, dialokasikan anggran Rp. 165.643.200,- dan realisasi Rp. 164,943,000,- atau 99%, digunakan untuk : belanja Hibah Peralatan industry pengolahan kepada kelompok IKM
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- Indikator Program : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengwasan dengan jumlahPerluasan izin industri (IPUI) kecil dan menengah yang dikeluarkan intasi terkait.
- Dengan kegiatan :
- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten
 - ✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, dialokasikan anggran Rp.540.000,- dan realisasi Rp.300.500,- atau 55%, digunakan untuk belanja sosialisasi perizinan berusaha sector industry yang menajdi kewenangan kab/kota
- Program Pengelolaan system Informasi Industri Nasional
- Indikator Program : Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini, dengan target 100 % dan realisasi 100%. Dengan kegiatan :
- Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan target 5 dokumen dan realisasi 1 dokumen. Kegiatan ini membawahi sub kegiatan :
 - ✓ Fasilitasi Pengumpulan pengolahan dan analisis data Industri data kawasan industry serta data lainnya lingkup kab/kota melalui SINAS, Dialokasikan Anggran Rp.300.000,-dan realisasi, Rp. 232.350,- atau 77%, digunakan untuk belanja ATK pengolahan data Industri
 - ✓ Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas, dialokasikan anggaran Rp. 180.470.000,- dan realisasi Rp. 180.350.000,- dan realisasi 99%, digunakan untuk belanja ATK, cetak dan penggandaan, belanja koordinasi dan konsultasi kegiatan dekranasda dan belanja hibah ke Dekranasda Kabupaten Manggarai Timur.

7. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur di tahun 2024 mengelola anggaran sebesar Rp. 105.117.478.097,00, dan terealisasi sebesar Rp. 97.505.355.505,00, atau sebesar 92,76 %, realisasi anggarannya tidak mencapai 100% di sebabkan ada beberapa kegiatan fisik mengalami Retensi anggaran. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut.

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bobot
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.694.670.471	5.983.340.177	89,37
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.160.996.098		
3.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	11.231.177.900	9.702.930.228	86,39
4.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	11.237.203.520	10.728.170.673	95,47
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.262.027.000	8.912.518.656	96,23
6.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	150.000.000	116.079.022	77,39
7.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	55.736.763.883	54.828.864.853	98,37
	PROGRAM PENGEMBANGAN JALAN			

10.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	389.541.475	360.550.475	92,56
11.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	873.867.750	832.226.284	95,23
12.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.890.172.000	3.616.552.000	92,97
	TOTAL	105.117.478.097	97.505.355.505	92,76

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

8. Dinas Lingkungan Hidup

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur sebesar Rp3.245.403.935,00, realisasi belanja sebesar Rp2.971.891.893,00 atau sebesar 91,57%, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (diperuntukan gaji dan tunjangan ASN) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendanaan tersebut digunakan untuk membiayai belanja operasi sebesar Rp2.787.534.935,00, sedangkan realisasi belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa sebesar Rp2.583.391.730,00 atau sebesar 92,68%. Pendanaan untuk membiayai belanja modal sebesar Rp457.869.000,00, sedangkan realisasi belanja modal sebesar Rp388.500.163,00, atau sebesar 84,85%. Realisasi Anggaran Jenis Belanja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI (RP)	%
		INDUK (RP)	PERUBAHAN (RP)		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.710.768.871,00	1.631.640.835,00	1.521.112.295,00	93,23
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	176.922.000,00	109.648.900,00	54.300.078,00	49,52
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	281.998.800,00	505.251.800,00	479.295.883,00	94,86
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	63.999.700,00	61.481.300,00	60.826.300,00	98,93
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	123.000.000,00	60.062.000,00	59.964.300,00	99,84
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN IZIN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PLH)	125.000.000,00	38.369.000,00	38.274.000,00	99,75
7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	40.000.000,00	4.276.800,00	1.576.800,00	36,87
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	28.999.400,00	23.285.900,00	22.745.900,00	97,68
9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	20.000.000,00	7.250.000,00	0	0
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	15.000.000,00	5.955.000,00	5.890.000,00	98,91
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	814.932.400,00	798.182.400,00	727.906.337,00	91,20
TOTAL ANGGARAN		3.400.621.171,00	3.245.403.935,00	2.971.891.893,00	91,57

Tabel 3.13
Realisasi Angggaran Program Dinas Lingkungan Hidup

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN DAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025		
		ANG GARAN	REALISASI	ERSENTASE (%)
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	2.624.761.859	2.422.786.404	92
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.938.698.859	1.750.252.973	90
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.667.600	12.667.600	100
1.05.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	8.000.000	100
1.05.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.667.800	1.667.800	100
1.05.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.999.800	2.999.800	100
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.571.078.122	1.383.934.943	88
1.05.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.428.399.122	1.270.333.785	89

1.05.01.2.02.002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000	2.000.000	100
1.05.01.2.02.007	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	140.679.000	111.601.158	79
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	630.000	550.000	87
1.05.01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	630.000	550.000	87
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.317.600	101.151.205	99
1.05.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	15.000.000	100
1.05.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	14.999.500	99
1.05.01.2.06.008	Facilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000	1.000.000	100
1.05.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.317.600	70.151.705	99
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.500.000	6.788.000	90
1.05.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100
1.05.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.000.000	3.288.000	82
1.05.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.000.000	2.000.000	100
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	245.505.537	245.161.225	99

	Daerah			
1.05.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.140.000	118.076.661	99
1.05.01.2.09.003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	127.365.537	127.084.564	99
1.05.03.2	Program Penanggulangan Bencana	686.063.000	672.533.431	98
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	373.887.600	364.485.032	97
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	326.802.600	318.940.532	97
1.05.03.2.01.004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	47.085.000	45.544.500	96
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	78.173.400	76.793.400	98
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	22.174.500	22.164.500	99
	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	42.474.000	41.854.000	98
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap	13.524.900	12.774.900	94

1.05.03.2.03.003	Pencairan,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	42.456.000	42.456.000	100
1.05.03.2.03.009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	119.748.000	118.070.199	98
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	56.898.000	55.828.800	98
1.05.03.2.04.003	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	23.950.000	22.900.000	95
1.05.03.2.04.010	Koordinasi Penanganan Bencana Kabupaten/Kota	32.948.000	32.928.800	99
JUMLAH		2.624.761.859	2.422.786.404	92

Tabel 3.14
 Realisasi Anggaran Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah

10. Bagian Organisasi

Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Pencapaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	62.631.600	1.495.800	
Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	62.631.600	1.495.800	
Belanja Honorarium Bendahara Barang	4.800.000	-	-
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000	-	-
Belanja Jasa Tenaga Supir	18.000.000	-	-
Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu	4.200.000	-	-
Belanja Honorarium PPKD/KPA	7.800.000	-	-
Belanja Honorarium PPTK	6.840.000	-	-
Belanja iuran Jaminan Kesehatan/ Asuransi (BPJS)	2.700.000	1.350.000	50
Belanja iuran Jaminan Kecelakaan (JKK)	129.600	64.800	50

Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Bahan Cetak	137.600	137.600	100
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.872.000	20.776.529	94,99
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.550.000	5.430.000	97,83
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.410.900	8.410.900	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.410.900	8.410.900	100
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover	2.272.500	2.272.500	100
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak	1.384.400	1.384.400	100
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Komputer	4.754.000	4.754.000	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.290.000	46.188.996	99,78
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.290.000	46.188.996	99,78
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	46.290.000	46.188.996	99,78

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	36.399.600	35.792.352	98,33
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover	-	-	
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Bahan Cetak	205.600	61.600	29,96
Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Kudapan/ Snack	1.000.000	1.000.000	100
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.024.000	30.620.752	98,70
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.170.000	4.110.000	98,56
Peningkatan Kinerja & Reformasi Birokrasi	39.574.400	39.091.800	98,78
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak	684.400	684.400	100
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.810.000	34.327.400	98,61
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.080.000	4.080.000	100
Monitoring, Evaluasi & Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik & Tata Laksana	21.672.000	21.467.200	99,05
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover	2.178.000	2.178.000	100
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.150.000	14.130.000	100

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Program Bagian Organisasi

Berdasarkan tabel yang telah disajikan diatas dapat di jelaskan bahwa dukungan finansial merupakan instrukmen penting dalam pencapaian kinerja Bagian Organisasi. Pada tahun anggaran 2025, Bagian Organisasi mengelola total pagu anggaran sebesar Rp. 482.731.000,00 dengan total realisasinya mencapai Rp. 417.874.629,00 atau secara akumulatif sebesar 86,56%. Secara rinci capaian realisasi anggaran pada masing-masing program adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah

Program ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan opsional internal kantor dengan rincian sebagai berikut :

1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu Rp. 1.495.500 dengan realisasi 100% atau sebesar Rp. 1.495.500
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu Rp. 40.977.600 dengan realisasi 100% atau sebesar Rp. 40.997.600

3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu Rp. 27.563.100 dengan realisasi 95,59% atau sebesar Rp. 26.347.629
4. Pengadaan Barang Milik Daerah dengan pagu Rp. 8.410.900 dengan realisasi 100% atau sebesar Rp. 8.410.900
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan pagu Rp. 46.290.000 dengan realisasi 99,78 atau sebesar Rp. 46.188.996

B. Program Substansi Organisasi dan Tata Laksana

Program berikut merupakan inti dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Organisasi dalam mendukung Reformasi Birokrasi. Rinciannya sebagai berikut :

1. Penataan Organisasi menjadi program dengan pagu anggaran terbesar yaitu Rp. 324.420.900 dengan realisasi sebesar 99,25% atau sebesar Rp. 322.016.804
2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.339.600 dengan realissi sebesar 98,33% atau sebesar Rp. 35.792.352
3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 39.574.400 dengan realisasi sebesar 98,78% atau sebesar Rp. 39.081.900
4. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik Serta Tata Laksana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 21.672.000 dan realisasi sebesar 99,05% atau sebesar Rp. 21.467.200
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.107.000 dengan realisasi sebesar 99,92% atau sebesar Rp. 14.097.000

11. Badan Keuangan Daerah

Total alokasi anggaran untuk Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 yaitu Rp237,839,209,872.00 dan realisasi mencapai Rp229,743,493,826.00 atau 96,60 %. Rincian anggaran dan realisasi belanja per program tahun 2025 :

N o	Program	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Keterangan
1	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.623.599.896	16.016.949.484	65,05	Program Penunjang
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	212.574.789.010	199.598.709.490	93,90	Program Pendukung IKU
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	434.413.000	353.285.867	81,32	
4	Program Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	842.100.830	784.185.492	93,12	
5	Jumlah	238.474.902.736	216.753.130.333	90,89	

- 1) Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Total anggaran yang dialokasikan untuk program Penunjang Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Badan Keuangan Daerah pada Tahun 2025 adalah Rp24,623,599,896,00 Dari total anggaran tersebut realisasi sebesar Rp16.016.949.484,00 atau capaian 65,05%. Mengacu pada Skala Nilai Peringkat Kinerja maka, Capaian Realisasi Keuangan Program Penunjang termasuk katergori “ **Rendah**”. Rendahnya capaian Realisasi Keuangan diantaranya disebabkan tidak terlaksananya sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi merupakan salah satu sub kegiatan dari kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Pendidikan dan Pelatihan yang direncanakan yaitu Pendidikan dan Pelatihan bagi Penilai Pemerintah . Pendidikan dan Pelatihan bagi Penilai Pemerintah diselenggarakan oleh kementerian keuangan. Hasil koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian terkait dimana pada tahun 2025 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penilai Pemerintah tidak diselenggarakan. Alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencapai Rp.75.000.000,00. Tidak optimalnya capaian Realisasi Keuangan Program Penunjang Urusan juga disebabkan oleh karena rendahnya penyerapan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun 2025 sebesar Rp 22,704,740,414.00 dan realisasi mencapai Rp14,357,340,205 atau 63%. Program Penunjang terdiri dari 1 (satu) program 8 kegiatan dan 19 sub kegiatan.. Rincian Realisasi Keuangan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang urusan Badan Keuangan Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi	Persen (%)
1	2	3	8	9	10
KEUANGAN					
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		39,844,000	39,452,500	99
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8,500,000	8,495,000	100
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	10,482,500	10,382,500	99
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	10,355,000	10,230,000	99
	Koordinasi dan Penyusunan				
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,019,000	4,987,500	99
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4,000,000	3,970,000	99
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		23,191,427,246	14,830,501,583	64
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	22,704,740,414.00	14,357,340,205	63
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	431,941,832.00	419,176,378	97
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	50,000,000	49,985,000	100
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4,392,500	4,000,000	91
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	352,500	-	-
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	15,260,000	13,870,000	91
1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	11,260,000	9,870,000	88
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,000,000	4,000,000	100
1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		670,000	645,000	96
1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	335,000	322,500	96
1.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	335,000	322,500	96

1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	6,900,000	6,351,780	92
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	15,600,000	11,665,000	75
Indikator Kinerja Utama Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Utama			24,623,999,896	16,016,949,484	65

2) Rincian Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Utama Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Utama adalah anggaran dan realisasi keuangan program dan kegiatan yang melekat pada indikator kinerja utama. Program pendukung IKU terdiri dari : Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Anggaran untuk ketiga program pendukung IKU Rp213,851,302,840,00 dan realisasi mencapai Rp200,736,180,849 atau 93.87 %. Mengacu pada Skala Nilai Peringkat Kinerja maka. Capaian Realisasi Keuangan Program Pendukung Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) termasuk katergori “ **Sangat tinggi**” Rincian anggaran dan realisasi per program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabell dibawah ini :

Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		212,574,789,010	199,598,709,490	93.90
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		1,726,097,900.00	1,399,819,196.00	81.10
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen	83,884,000.00	73,107,000	87
	Koordinasi dan Penyusunan Pembekalan				

5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	288,658,900	233,030,370	81
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	1,220,638,000	994,233,826	81
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	2,000,000	-	-
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	300,000	-	-
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	1,150,000	1,010,000	88
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	2,000,000	-	-
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Orang	19,695,000	4,530,000	23
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		1,099,537,500	1,075,390,733	98
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	645,874,000	626,768,002	97
5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan	16,594,000	15,974,000	96
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan	Dokumen			100

	Daerah sebagai Optimalisasi Kas				
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	9,564,000	8,924,000	93
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	3,914,000	2,779,000	71
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	17,880,000	17,410,000	97
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		606,005,000	593,427,896	98
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	116,624,000	113,836,853	98
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Dokumen	4,500,000	4,360,000	97
	Koordinasi Penvusunan				

	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	3,000,000	2,912,000	97
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1,000,000	-	-
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Orang	36,255,000	35,564,000	98
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota	Lembaga	19,480,000	18,320,000	94
5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Laporan	1,500,000	1,416,500	94
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		209,143,148,610	196,530,071,665	94
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	204,621,866,675	193,229,582,669	94
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1,597,497,000	1,474,378,834	92
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Laporan	2,923,784,935	1,826,110,162	62
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Program Badan Keuangan Daerah

12. Inspektorat Daerah

No	Program	Pagu	Realisasi	Prosentase Capaian
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.1.137.091.000	Rp. 1.136.740.280	99,97
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 186.010.000	Rp. 184.404.000	99,14

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Program Inspektorat Daerah

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 2 (dua) Program Pokok yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.137.091.000 dan realisasi Rp. Rp. 1.136.740.280 dengan prosentase realisasi adalah 99,97%.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 186.010.000 dan realisasi sebesar Rp. 184.404.000 dengan prosentase capaian adalah 99,14%.

13. Dinas Komunikasi dan Informatika

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentase
			2,353,986,048	2,190,168,009	93%
			2,307,284,048	2,144,076,009	93%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,022,106,048	1,876,088,571	93%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		44,223,000	43,573,000	99%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39,450,000	39,235,000	99%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,722,000	1,647,000	96%

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,051,000	2,691,000	88%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,833,545,548	1,695,318,703	92%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,742,050,148	1,604,530,067	92%
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	88,347,400	87,717,636	99%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3,148,000	3,071,000	98%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		7,200,000	7,200,000	100%
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada	7,200,000	7,200,000	100%

			4,500,000	4,500,000	100%
			4,500,000	4,500,000	100%
			4,500,000	4,500,000	100%
			4,500,000	4,500,000	100%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,280,000	50,154,500	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7,430,000	3,237,000	44%
		Penyediaan Jasa Surat	1,050,000	1,050,000	100%

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			70,000,000	67,135,563	96%
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		70,000,000	67,135,563	96%
		Diseminasi Informasi	14,952,000	14,781,000	99%
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	31,418,000	29,017,563	92%
		Penyusunan Konten	23,630,000	23,337,000	99%
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			215,178,000	200,851,875	93%
	Pengelolaan N...		22,000,000	20,400,000	93%

		Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	11,900,000	11,900,000	100%
		Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	16,504,000	14,922,300	90%
		Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	129,480,000	117,024,000	90%
			45,002,000	44,452,000	99%
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			45,002,000	44,452,000	99%
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		45,002,000	44,452,000	99%
		Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	14,500,000	14,140,000	98%
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	30,502,000	30,312,000	99%
			1,700,000	1,640,000	96%

		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1,700,000	1,640,000	96%
Jumlah			2,353,986,048	2,190,168,009	93%

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Program Dinas Komuikasi dan Informatika

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari sekian banyaknya Instansi yang menjadi pengampu dari indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur, masih banyak sekali instansi yang sampai saat ini belum dapat memenuhi target realisasi kinerja Rancangan Kinerja Perangkat Daerah (RKPD) maupun target realisasi dalam RPJMD, bahkan masih ada instansi yang belum dapat menjalankan indikator kinerja mereka karena berbagai perihal. Program yang belum berjalan secara efektif tentu saja dapat menyebabkan lambannya sistem pelayanan kepada masyarakat, bahkan bisa saja berdampak buruk juga terhadap penilaian internal dari setiap Perangkat Daerah. Hal-hal seperti inilah yang kedepannya perlu menjadi catatan penting bagi Pemerintah Daerah untuk segera diperbaiki, agar kedepannya setiap indikator dan juga program yang dijalankan oleh Perangkat Daerah dapat memenuhi target

bahkan dapat melampauinya

Namun dibalik itu semua, masih ada indikator program Perangkat Daerah yang sampai LAKIP ini diterbitkan memperoleh hasil yang baik, hal ini ditandai dengan realisasi kinerja yang dapat melampaui target yang sudah diberikan. Hal seperti inilah yang sebenarnya patut dipertahankan dan menjadi contoh bagi Perangkat Daerah lain di Kabupaten Manggarai Timur. Harapannya juga agar di tahun-tahun berikutnya Perangkat Daerah yang memperoleh hasil yang memuaskan dapat mempertahankan predikat tersebut dan dapat menjadi contoh pula bagi Perangkat Daerah lain.

B. Saran

Untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah di tahun-tahun berikutnya, diperlukan langkah-langkah strategis yang harus diambil antara lain :

1. **Penyelarasan Perencanaan Kinerja**
Rencana Strategis Perangkat Daerah perlu diselaraskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar indikator program Perangkat Daerah dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dari Kepala Daerah.
2. **Memperbaiki Kualitas Indikator**
Perbaikan kualitas indikator di setiap Perangkat Daerah perlu dilakukan secara signifikan agar jangan sampai ada lagi indikator Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah. Pemenuhan indikator ini harus didasarkan pada prinsip Spesific (Jelas), Measurable (Terukur), Achievable (Realistis), Relevant (Sesuai Tujuan), dan Time Bound (Tepat Waktu) atau lebih dikenal dengan kata SMART.
3. **Fokus pada Outcome, Jangan Hanya pada Output**
Selama ini masih banyak Perangkat Daerah yang masih berfokus pada output, sebenarnya ketika kita mengacu pada dokumen LAKIP, maka seharusnya yang dibutuhkan bukan hanya output saja melainkan beserta outcomenya juga.
4. **Menetapkan Target yang Rasional dan Berbasis Data**
Perangkat Daerah harus mampu menetapkan target sesuai dengan keadaan yang ada dan tentunya perlu mengacu juga pada data. Usahakan Perangkat Daerah harus menghindari target yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, selain itu baseline pada setiap Perangkat Daerah harus menjadi acuan utama dalam penentuan LAKIP kedepannya. Bahkan melakukan perbandingan dengan target dan realisasi dari daerah lain yang dianggap berhasil diperlukan agar Perangkat Daerah dapat belajar untuk memperbaiki kesalahan di tahun-tahun sebelumnya.
5. **Memperkuat Cascading Kinerja di setiap Perangkat Daerah**
Usahakan indikator dan program yang masuk kedalam cascading harus saling bersinggungan dan tidak boleh berdiri sendiri agar kesesuaian dapat tercipta mulai dari level atas yaitu RPJMD → Renstra → OPD → Perjanjian Kinerja → SKP Individu.
6. **Pelaksanaan Kegiatan Dilakukan Secara Konsisten**
7. **Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara Berkala**
8. **Memperkuat Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Teknis Aparatur**
9. **Memperkuat Kolaborasi antar Instansi agar indikator yang bersifat lintas sektor dapat berjalan dengan baik**

C. Lampiran

1. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Manggarai Timur 2025

3	Mewujudkan Infrastruktur Berkelanjutan			Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	53,58	69,47	DINAS PUJR, DINAS PERHUBUNGAN
	Meningkat Kualitas Infrastruktur Publik			Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	53,57	53,57	DINAS PUJR, DINAS PERHUBUNGAN
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	79,66	82,91	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Capaian Penataan Ruang	Persen	NA	70	DINAS PUJR
				Capaian Penataan Tanah	Persen	100	100	DINAS PUJR
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Inovatif Dan Berorientas Pelayanan	Meningkatnya Kesiagaan Terhadap Resiko Bencana		Indeks Resiko Bencana	Nilai	Nilai 143,75	140	BNPB
				Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	54,01 Kategori (CC)	45,14 Kategori (CC)	
				Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	60,85	62,95	

	Pemerintah Daerah								
			Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP			
			Nilai Maturitas SPiP	Level	2	3			
			Indeks dan Predikat Penilaian SPBE	Nilai	2,62 Baik	2,68 Baik			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	75,87	80,00			

Borong, 10 Maret 2025



BUPATI MANGGARAI TIMUR

Agas Andreas

AGAS ANDREAS

2. Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Boni Hasudungan

Jabatan : Pj. Bupati Manggarai Timur

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahtraan Sosial			Indeks Pembangunan Manusi (IPM)	Indeks	62,3	67,82		
				Angka Kemiskinan	Persen	25,35	24,29		
		Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Pendidikan		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,3	12,90		
				Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,42	7,96		
			Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Tingkat Partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	22,21	25,05	28,1	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
				Tingkat Partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam	Persen	88,58	90,20	92,3	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

				Pendidikan Dasar					
				Tingkat Partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persen	74,67	79,8	82,8	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
				Tingkat Partisipasi warga Negara usia 7-18 yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan	Persen	12,30	15,80	17,50	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
				Presentase Lembaga Pendidikan Terakreditasi	Persen	100,00	100,00	100,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Meningkatnya Literasi Berbasis Perpustakaan		Indeks Pengelolaan Perpustakaan	Nilai	0,052	0,057	0,062	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Survey Kepuasan Masyarakat terhadap	Kategori	n/a	Baik	Baik	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

				Pelayanan Perpustakaan					
		Meningkatnya Prestasi dan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan		Presentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan	Persen	76	78,25	80,5	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			Usia Harapan Hidup	Tahun	68,29	69,08	69,77	Dinas Kesehatan
				Prevalensi Stunting (%)	Persen	9,00	8,00	7,00	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan		Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	383,2	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
				Angka Kematian Bayi	Per 1000 kelahiran hidup	8,7	0	0	Dinas Kesehatan
				Persentase Balita Gizi Buruk (%)	Nilai	1,28	<1	<1	Dinas Kesehatan
				Persentase Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)	Nilai	2,22	1,15	<1,15	Dinas Kesehatan
				IKM Bidang Kesehatan	Nilai	82,78	88,20	90,0	Dinas Kesehatan
		Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk		Jumlah Angka Kelahiran (Total Fertility Rate)	Nilai	3,34	3,19	3,17	
	Meningkatnya Kesetaraan Gender,			Indek Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	98,6	99,2	99,6	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

		Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak							Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	53,02	55	60	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Pemenuhan Kabupaten Layak Anak	Nilai	442	500	600	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan social (Ppks)		Persentase PPKS yang sejahteraan	Persentase	52,46	100	100	Dinas Sosial
			Meningkatnya Layanan Sosial Dasar Kepada PPKS	Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial	Persentase	86	90	93	Dinas Sosial
				Presentase Capaian SPM Bidang Sosial	Persentase	72,21	100	100	Dinas Sosial
				Persentase PPKS yang Berperan Aktif	Persentase	5	7	10	Dinas Sosial

		Menurunkan tingkat Pengangguran Terbuka		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Nilai	1,89	1,50		Dinas Tenaga Kerja
			Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih dan ditempatkan	Persen	74,11	80	85	Dinas Tenaga Kerja
			Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang dikelola	Persen	0	1	1	Dinas Tenaga Kerja
2	Meningkatnya Prekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,74	4,72	5,25	
		Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Manggarai Timur berbasis Potensi Lokal		Nilai PDRB sektor Unggulan	Nilai	1,244.966	1.483.845	1.569.166	
			Meningkatnya Sektor Pertanian	Nilai PDRB sektor Pertanian	Nilai	609.756,17	722.717,89	762.851,60	Pertanian
				Kontribusi PDRB sektor Pertanian	Nilai	27,16%	28 %	0,2795	Pertanian
			Meningkatnya Sektor Peternakan	Nilai PDRB sektor Peternakan	Rupiah (Juta)	259,214,56	309,960,44	328,138,81	Peternakan
			Meningkatnya	Persentase	Persen	214 %	165 %	170 %	Ketahanan

			Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/jagung sesuai kebutuhan)					Pangn dan Perikanan
			Meningkatnya Sektor Perikanan	Nilai PDRB Sektor Perikanan	Rupiah (Juta)	70.258,81	86,766,50	92,822,50	Ketahanan Pangn dan Perikanan
			Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Perindustrian	Nilai PDRB Sektor Perdagangan		261,248,80	311,376,09	329,280,22	PERINDAKOP
				Nilai PDRB Sektor Industri Olahan		10,504,10	12,519,58	13,239,46	PERINDAKOP
			Meningkatnya Sektor UMKM dan Keperasi	Pertumbuhan UMKM		18,09 %	20 %	22 %	PERINDAKOP
				Pertumbuhan Koperasi Sehat		7 %	6 %	6 %	PERINDAKOP
			Meningkatnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal	Peningkatan Pelestarian Jenis Objek Pemajuan Kebudayaan	Persen	55 %			PARIWISATA
			Meningkatnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal	Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Persen	14160	8 %	10 %	PARIWISATA
				Pertumbuhan Usaha Ekonomi Kreatif	%	108	5,6 %	6,48 %	PARIWISATA

			Meningkatnya Investasi	Total Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN berdasarkan izin yang diterbitkan	Miliar Rupiah	65 Miliar Rupiah	100 Miliar Rupiah	110 Miliar Rupiah	DPMPTSP
			Meningkatnya Potensi Desa	Indeks Desa Membangun	Persen	0,63	0.592	0,697	DPMD
3	Mewujudkan Infrastruktur Berkelanjutan			Indeks Pembangunan Infrastuktur	Persen	53,58	69,47	73,34	
		Meningkat Kualitas Infrastruktur Publik		Indesks Kualitas Infrastruktur	Persen	53,57	53,57		
			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Infastruktur Dasar	Persen	55,23	57,03	61,5	Dinas PUPR
			Meningkatnya Persentase Permukiman Layak Huni	Persentase Capaian SPM Perumahan	Persen	24	100	100	Dinas PUPR
				Penanganan Kawasan Kumuh	Persen	N/A	13.00	20.00	Dinas PUPR
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Prasarana Perhubungan	Rasio Konektivitas	Rasio	60	75	80	Dinas Perhubungan
		Meningkat Kualitas		Indeks Kualitas Lingkungan	Nilai	79,66	82,91	86,16	Dinas Lingkungan Hidup

		Lingkungan Hidup Penataan Ruang dan Pembangunan Tanah		Hidup					
			Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	52,14	54,90	58,15	Dinas Lingkungan Hidup
				Capaian Penataan Ruang	Persen	NA	70		
			Meningkatnya Kesesuaian dan Ketaatan Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian dan Ketaatan Pemanfaatan Ruang	Persen	36,11	40	50	Dinas PUPR
				Capaian Penataan Tanah	Persen	100	100	100	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pertanahan	Cacpaian Pelayanan Pertanahan	Persen	100	100	100	Dinas Pertanahan
		Meningkatnya Kesiagaan Terhadap Resiko Bencana		Indeks Resiko Bencana	Nilai	Nilai 143,75	140	137	BPBD
			Meningkatnya Kesiagaan Terhadap Resiko Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,45	0,5	0,55	BPBD
			Meningkatnya	Persentase	Persen	100	100	100	Satuan Polisi

			Kualitas Penyelamatan dan Peanganan Kebakaran	Capaian SPM Tantribumlinmas					Pamong Praja
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Inovatif Dan Berorientas Pelayanan			Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	54,01 Kategori (CC)	45,14 Kategori (CC)		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dan Efektivitas Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	60,85	62,95	65,53	
			Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Komponen Pelaporan dalam SAKIP	Nilai	10,50	10,33	10,72	Sekretariat Daerah
				Rata-rata Pencapaian Program Sekretariat Daerah	Persen	100	100	100	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya Kinerja Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD	Rata-rata Capaian Pelaksanaan Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD	Persen	100	100	100	Sekretariat DPRD
			Meningkatnya	Persentase	Persen	97,1	98	99	Bapeitbangda

			Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Keselarasn RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)					
				Persentase Target Prioritas RPJMD Tahun N-1 yang tercapai	Persen	65	70	75	Bapelitbangda
			Meningkatnya Profesionalitas ASN	Capaian Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	59,35	61,75	65	BKPSDM
			Meningkatnya Kualitas kajian/ Penelitian	Persentase hasil kajian/ penelitian yang termanfaatkan	Persen	100	100	100	Bapelitbangda
			Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan sesuai Standar	Cakupan pengelolaan arsip perangkat daerah	Persen	n/a	38,61 %	66,67 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP		
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persen	84,92	93,28	94,39	Badan Keaegan Daerah
			Meningkatnya Kemampuan	Rasio PAD terhadap	Persen	3,12	4,3	4,6	Badan Keaegan Daerah

			Keuangan Daerah	Pendapatan Daerah					
				Nilai Maturitas SPIP	Level	2	3	3	
			Meningkatnya Transparansi Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan (BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah)	Persen	93	100	100	Inspektorat Daerah
				Level Kapabilitas APIP	Level	2	3	3	Inspektorat Daerah
				Indeks dan Predikat Penilaian SPBE	Nilai	2,62 Baik	2,68 Baik		
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi	Tingkat Kematangan SPBE, pada Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	1,7	2,18	2,36	Dinas Komunikasi dan Informasi
				Tingkat Capaian Pelayanan Komunikasi dan Informasi	Persen	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informasi
			Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral Daerah (SSD)	Indek Pembangunan Statistik	Nilai	2,06	2,33	2,5	Dinas Komunikasi dan Informasi
		Meningkatnya		Indeks Kepuasan	Nilai	75,87	80,00	85	

		Kualitas Pelayanan Publik		Masyarakat					
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu	IKM Kinerja PTSP	Nilai	80	86	88	DPMTSP
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependidikan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	81,19	85	90	
				IKM Kinerja Kependudukan dan Catatan Sipil	Nilai	83,02	86	88	

Borong, 06 Januari 2025
Pj. **BUPATI MANGGARAI TIMUR**

Ir. Boni Hasudungan

BUPATI MANGGARAI TIMUR



AGAS ANDREAS, S.H., M.Hum.

